

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Oktober 2017

Menutup kesenjangan



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Menutup kesenjangan

Oktober 2017



Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly, IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo A. Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic dan Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Ndiame Diop and Frederico Gil Sander (*Lead Economist*). Dipimpin oleh Derek H. C. Chen, *Senior Economist* dan *lead author*, tim ini terdiri dari Magda Adriani, Arsianti, Dwi Endah Abriningrum, Indira Maulani Hapsari, Ahya Ihsan, Taufik Ramadhan Indrakesuma, Jonathan William Lain, Alief Aulia Rezza, Jaffar Al Rikabi, Dhruv Sharma, dan Pui Shen Yoong. Dukungan administrasi diberikan oleh Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Nugroho Sunjoyo, Jerry Kurniawan, dan GB Surya Ningnagara. Ucapan terima kasih untuk Edgar Janz, Jonathan William Lain, Juul Pinxten dan Nathaniel P. Adams atas bantuannya dalam pengecekan laporan ini.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Indira Maulani Hapsari (Bagian A.1 and A.2) Magda Adriani and Dwi Endah Abriningrum (Bagian A.3 dan Kotak 1), Dhruv Sharma (Bagian A.4 dan A.5), Alief Aulia Rezza (Bagian A.5 dan Kotak 2), Jaffar Al Rikabi (Bagian A.6, Kotak 3 dan 4), Jonathan William Lain and Hamidah Alatas (Bagian A7 dan Kotak 5), Taufik Ramadhan Indrakesuma (Bagian A.8), Derek H. C. Chen (Bagian A.9); Jenny Jing Chao, Jeffrey John Delmon, Ian Halvdan Ross Hawkesworth, Sunita Kikeri, Ketut Ariadi Kusuma, Ratih Dwi Rahmadanti, Alexander Weber, Andi Wibisono, dan Pui Shen Yoong, dibawah bimbingan dari Taimur Samad dan Cledan Mandri-Perrott (Bagian B: Memobilisasi sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur); Hamidah Alatas, Ratih Dwi Rahmadanti, Daim Syukriyah, Bagus Arya Wirapati untuk kontribusi data (Lapmiran: indikator sosial). Laporan ini juga mendapat masukan dari diskusi mendalam dengan dan masukan dari Sudhir Shetty (*Chief Economist*, Bank Dunia), Yongmei Zhou (*Program Leader*), Ekaterine T. Vashakmadze (*Senior Country Economist*, Bank Dunia), dan Congyan Tan (*Senior Economist*, Bank Dunia).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction dan Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs dan Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic dan Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Photo merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi dchen2@worldbank.org.

Singkatan

ADB	Asian Development Bank
AIPEG	Australia Indonesia Partnership for Economic Governance
ANRPC	Association of Natural Rubber Producing Countries
AP	Availability Payments
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	Association of South East Asia Nations
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BCA	Bank Central Asia
BI	Bank Indonesia
BKPM	Indonesia's Investment Promotion Agency
BNI	Bank Negara Indonesia
BOP	Balance of Payments
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPS	Badan Pusat Statistik
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CAGR	Compound Annual Growth Rate
CEIC	Census and Economic Information Center
CPI	Consumer Price Index
CPO	Crude Palm Oil
DJPPR	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
EBRD	European Bank for Reconstruction and Development
ECB	European Central Bank
EMCI	Emerging Market Currency Index
EMDE	Emerging Markets and Developing Economies
EPC	Engineering, Procurement, and Construction
FDI	Foreign Direct Investment
GCA	Government Contracting Authorities
GDP	Gross Domestic Product
GOI	Government of Indonesia
GR	Government Regulation
HET	Harga Eceran Tertinggi
IIF	The Institute of International Finance
IIGF	Indonesia Infrastructure Guarantee Fund
ICP	Indonesia Crude Prices
IMF	International Monetary Fund
LFPR	Labor Force Participation Rate
LHS	Left Hand Side
JCI	The Jakarta Composite Index
KPPIP	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Anti-Monopoly Supervisory Commission)
LGST	Luxury Goods Sales Tax
LNG	Liquefied Natural Gas
MOF	Ministry of Finance
MOHA	Ministry of Home Affairs
MPPD	Million Barrels Per Day
MSOE	Ministry of State-Owned Enterprises
NPL	Non-Performing Loans

NTI	Net Trade-Weighted Index
OBC	Outline Business Cases
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
O&G	Oil and Gas
O&M	Operation and Maintenance
OPEC	Organization of The Petroleum Exporting Countries
PDF	Project Development Facility
Pelindo	Pelabuhan Indonesia (Indonesian Ports)
PINA	Pembiayaan Investasi Non Anggaran (Non-Budgetary Financing of Infrastructure)
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMI	Purchasing Managers' Index
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Nasional Bukan Pajak (Other Non-Tax Revenues)
PPP	Public-Private Partnership
PRC	People's Republic of China
PSC	Public Sector Comparator
PSN	National Strategic Project
PSO	Public Service Obligation
RHS	Right Hand Side
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
SAKERNAS	Survei Angkatan Kerja Nasional (National Labor Force Survey)
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBL	Single Borrower Limit
SMI	Sarana Multi Infrastruktur
SOE	State-Owned Enterprises
S&P	Standard and Poor
SPV	Special Purpose Vehicle
SSL	Sector Specific Laws
SUN	Surat Utang Negara (Conventional Government Securities)
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TASPEN	Tabungan dan Asuransi Pensiun
UNCITRAL	United Nations Commission International Trade Law
VAT	Value Added Tax
VGf	Viability Gap Funding
VIX	Volatility Index
YOY	Year-on-Year

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	C
SINGKATAN	D
DAFTAR ISI.....	F
RINGKASAN EKSEKUTIF: MENUTUP KESENJANGAN.....	I
A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....	1
1. Lingkungan perekonomian global pada umumnya menguntungkan.....	1
2. Tingkat konsumsi mengecewakan, namun keuntungan investasi menyebabkan pertumbuhan tetap stabil	4
3. Inflasi IHK (headline inflation) meningkat pada Triwulan ke-2 akibat kenaikan harga barang yang diatur oleh Pemerintah (administered price), namun inflasi pangan, transportasi, dan inflasi inti menurun	9
4. Pasar keuangan berkinerja baik, mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi makro.....	12
5. Harga komoditas menurun sementara defisit transaksi berjalan meningkat dua kali lipat	15
6. Perbaikan pengelolaan fiskal telah ditunjukkan pada tahun 2017, namun risiko yang signifikan masih tetap ada	21
7. Pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja ²⁹	
8. Pengentasan kemiskinan masih tetap lamban, namun ketimpangan terus menurun	33
9. Perkiraan yang positif namun dengan ketidakpastian yang signifikan	35
B. TOPIK FOKUS.....	40
Memobilisasi sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur	40
a. Kurangnya investasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur yang besar di Indonesia	40
b. Untuk menutup kesenjangan infrastruktur akan memerlukan peningkatan keterlibatan sektor swasta.....	43
c. Beberapa kendala perlu diatasi untuk dapat memanfaatkan pembiayaan sektor swasta untuk infrastruktur....	46
d. Upaya untuk mengurangi hambatan terhadap investasi swasta sedang dilakukan	57
REFERENSI.....	63
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Volume perdagangan global menguat.....	2
Gambar 2: ... dan capaian yang positif pada Indeks Pembelian Manajer Gabungan terus memberi sinyal sentimen bisnis yang optimis	2
Gambar 3: Normalisasi kebijakan moneter di AS memberi dampak yang terbatas pada pasar keuangan global.....	3
Gambar 4: Harga komoditas masih lebih tinggi dibanding harga tahun lalu meski agak menurun tahun ini	3
Gambar 5: Pertumbuhan PDB tetap tidak berubah pada Triwulan ke-2 tahun 2017 karena investasi yang lebih tinggi diimbangi oleh kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan ekspor bersih	5
Gambar 6: Sektor industri mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan sektor pertanian secara substansial melambat	5
Gambar 7: Konsumsi sektor swasta mencatat pertumbuhan yang stabil; pengeluaran untuk makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi merupakan kontributor terbesar.....	5
Gambar 8: Indikator konsumsi bulanan melemah di Triwulan ke-2.....	5
Gambar 9: Investasi di Bangunan Gedung dan Struktur terus mendorong pertumbuhan investasi.....	6
Gambar 10: Indikator bulanan memberi sinyal adanya pelemahan dalam pertumbuhan investasi.....	6
Gambar 11: Kontraksi konsumsi pemerintah sebagian disebabkan oleh penurunan yang tajam pada belanja barang.....	7
Gambar 12: Total pertumbuhan ekspor anjlok karena ekspor non-migas menurun dan ekspor migas berkontraksi	8
Gambar 13: Pertumbuhan impor total juga melambat dengan kontraksi pada impor migas ..	8
Gambar 14: Sektor konstruksi mengalami peningkatan yang paling pesat, seiring dengan pertumbuhan investasi yang tinggi pada bangunan gedung dan struktur	8
Gambar 15: Inflasi IHK meningkat di Triwulan ke-2 karena adanya kenaikan tarif listrik	9
Gambar 16: Penurunan harga pangan utama dalam negeri terus berlanjut selama bulan Ramadhan tahun 2017.....	11
Gambar 17: Nilai Rupiah yang stabil di tengah menguatnya mata uang Negara-negara Pasar Berkembang.....	12
Gambar 18: ...menyiratkan adanya depresiasi efektif.....	12
Gambar 19: Sektor infrastruktur, keuangan dan barang konsumsi memimpin di Triwulan ke-2.....	13
Gambar 20: Imbal hasil obligasi turun dan selisih (spread) antara obligasi Indonesia dan AS mengecil.....	13
Gambar 21: Suku bunga pinjaman modal kerja dan investasi turun secara signifikan	13
Gambar 22: Laju pertumbuhan deposito terus meningkat di Triwulan ke-2	14
Gambar 23: Sistem perbankan tetap sehat	14
Gambar 24: Harga di tingkat global untuk enam komoditi ekspor utama di Triwulan ke-2, dengan sebagian besar harga komoditas relatif stabil dan sebagian lagi menurun	16
Gambar 25: Harga minyak mentah diperkirakan akan naik dalam jangka menengah, sementara harga batubara diperkirakan akan turun	16
Gambar 26: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih menunjukkan adanya kejutan nilai tukar perdagangan komoditas yang positif untuk Indonesia sejak Juli 2016.....	16
Gambar 27: Neraca Pembayaran (BOP) tetap surplus pada Triwulan ke-2 tahun 2017, meskipun terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sebanyak dua kali lipat.....	16
Gambar 28: Pertumbuhan ekspor barang melambat oleh karena adanya liburan Idul Fitri, yang berlangsung relatif lama.....	19

Gambar 29: Pertumbuhan impor migas yang lambat menyebabkan penurunan impor barang secara keseluruhan.....	19
Gambar 30: Pertumbuhan impor barang modal turun meskipun terjadi lonjakan impor kendaraan bermotor dan bahan bangunan serta konstruksi.....	19
Gambar 31: Total arus masuk portofolio meningkat seiring dengan lonjakan pembelian obligasi global pemerintah	20
Gambar 32: Aliran masuk ekuitas portofolio berubah negatif dan Indonesia kalah jika dibandingkan dengan negara-negara setara di kawasan	20
Gambar 33: Arus masuk FDI bersih melonjak pada Triwulan ke-2 tahun 2017	21
Gambar 34: Penerimaan terkait migas dan PPN mendorong pertumbuhan pemungutan penerimaan yang tinggi hingga saat ini	22
Gambar 35: Tingkat pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan secara bertahap dari tahun 2015	23
Gambar 36: Pergeseran dalam belanja terus berlanjut dari belanja pegawai dan subsidi ke belanja barang, modal dan sosial.....	23
Gambar 37: Target penerimaan yang ditetapkan pada APBN-P tahun 2017 lebih realistis dibandingkan dengan yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya	24
Gambar 38: Alokasi pengeluaran pada APBN-P tahun 2017 mencerminkan kualitas pengeluaran yang lebih tinggi	24
Gambar 39: Bank Dunia memproyeksikan pemungutan penerimaan turun sedikit dari target APBN 2017	24
Gambar 40: Rasio pajak terhadap PDB meningkat lagi setelah beberapa tahun mengalami penurunan	27
Gambar 41: Rancangan APBN tahun 2018 memprioritaskan belanja modal dan sosial, dan memotong belanja barang. Subsidi energi meningkat.....	28
Gambar 42: Sementara nominal belanja subsidi direncanakan meningkat pada tahun 2017, porsi belanja subsidi ini lebih kecil daripada belanja Pemerintah Pusat tahun 2017....	28
Gambar 43: Pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja, didorong oleh meningkatnya upah kerja, jumlah para pekerja mandiri di sektor non-pertanian, dan pekerjaan di lingkungan keluarga yang tidak membayar	29
Gambar 44: Pergeseran pekerja dari sektor pertanian ke jasa telah melambat, dan proporsi pekerja dengan pekerjaan di sektor industri mulai menurun	31
Gambar 45: Pendapatan rata-rata riil bertumbuh sebanyak dua digit di tahun ini sampai bulan Februari 2017.....	31
Gambar 46: Meskipun koefisien Gini untuk pendapatan riil turun dari tingkatnya yang tinggi yang diamati pada tahun 2014 dan 2015, ketidaksetaraan pendapatan mulai meningkat lagi.....	32
Gambar 47: Pengentasan kemiskinan dari bulan Maret 2016 sampai Maret 2017 melanjutkan tren pengentasan kemiskinan yang lebih lambat sejak tahun 2011.....	33
Gambar 48: Lebih dari 20 persen orang Indonesia rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan	34
Gambar 49: Setelah beberapa tahun mendekati stagnasi, koefisien Gini telah turun, menurut yoy, sebanyak empat kali berturut-turut.....	34
Gambar 50: Continued low food price inflation is expected to weigh on headline inflation in 2017 and 2018.....	36
Gambar 51: Neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar secara moderat di tahun 2018.....	38
Gambar 52: Peningkatan modal saham publik diperkirakan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi	41
Gambar 53: Stok modal publik Indonesia per orang terhadap negara-negara pasar berkembang lainnya dan negara-negara maju rendah	41

Gambar 54: Stok modal publik per kapita telah tumbuh lebih lambat dari waktu ke waktu relatif terhadap kebanyakan negara-negara setara... ..	42
Gambar 55: ... mengarah pada persepsi bahwa infrastruktur Indonesia memiliki kualitas yang relatif lebih rendah	42
Gambar 56: Belanja modal oleh Pemerintah Pusat telah meningkat.....	44
Gambar 57: ...dan suntikan modal yang cukup besar telah diberikan kepada BUMN, terutama di tahun 2015-2016.....	44
Gambar 58: Investasi swasta perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target Pemerintah... ..	45
Gambar 59: ...akan tetapi investasi swasta di infrastruktur inti terus menurun sampai saat ini	45
Gambar 60: Mengidentifikasi, menyeleksi dan mempersiapkan proyek infrastruktur KPS melibatkan banyak pelaku	49
Gambar 61: Pendapatan BUMN telah menurun dan laba tetap mendatar sebagai bagian dari PDB.....	52
Gambar 62: ... dan BUMN yang terdaftar di bursa saham memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta di sebagian besar sektor infrastruktur	52
Gambar 63: Sektor perbankan di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan di negara-negara setara di kawasan.....	54
Gambar 64: ... dan aset perbankan cukup terkonsentrasi	54
Gambar 65: Sektor infrastruktur merupakan sumber penerbitan obligasi korporasi terbesar kedua.....	56
Gambar 66: Seperti aset dana pensiun diinvestasikan pada deposito bank dengan keuntungan dalam jangka yang relatif pendek	56

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil	65
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran	65
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi	65
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor	65
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen	65
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI	65
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran.....	66
Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan.....	66
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang	66
Lampiran Gambar 10: Impor barang	66
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal.....	66
Lampiran Gambar 12: Inflasi.....	66
Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan	67
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	67
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional.....	67
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	67
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	67
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	67
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ..	68
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBI Global.....	68
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito	68
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	68
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah	68

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri	68
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018	iii
Tabel 2: Pertumbuhan di negara-negara besar menguat di Triwulan ke-2.....	1
Tabel 3: Neraca Pembayaran Indonesia (BOP - Balance of Payments)	18
Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun 2017	26
Tabel 5: Pengentasan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi pencapaiannya selama tahun lalu, sebagian karena terjadinya urbanisasi masyarakat miskin	33
Tabel 6: Ketimpangan terus menurun, karena meningkatnya pangsa konsumsi dari Kelompok 40 Terbawah dan Kelompok 40 Menengah.....	35
Tabel 7: Indikator ekonomi utama.....	37

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah	69
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran	69
Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia	70
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia.....	71

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Inflasi harga makanan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri mereda tahun ini, sebagian karena upaya Pemerintah.....	11
Kotak 2: Harga untuk sebagian besar komoditas utama Indonesia membaik dalam beberapa bulan terakhir.....	17
Kotak 3: Analisis target penerimaan pada APBN 2018	27
Kotak 4: Analisis rencana pengeluaran dalam APBN tahun 2018	28
Kotak 5: Efek perubahan metodologi di Sakernas	32
Kotak 6: Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang signifikan dalam bidang transportasi, energi dan air bersih	43
Kotak 7: Beberapa proyek KPS mengalami kesulitan karena kendala hukum dan peraturan.....	47
Kotak 8: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa instrumen pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan KPS.....	49
Kotak 9: Menilai 'nilai uang' proyek KPS	59
Kotak 10: Daftar periksa untuk mengidentifikasi moda pelaksanaan proyek yang paling relevan untuk proyek infrastruktur	60
Kotak 11: Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memobilisasi pembiayaan dari investor lembaga dalam negeri.....	61

Rinkasan eksekutif: Menutup kesenjangan



Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia tetap stabil di angka 5,0 persen...

PDB riil Indonesia meningkat sebesar 5,0 persen tahun-ke-tahun (yoy) di Triwulan ke-2 tahun 2017, tidak berubah dari Triwulan ke-1. Tingkat pertumbuhan telah stabil sebesar sekitar 5 persen sejak Triwulan ke-1 tahun 2014, lebih rendah dari yang tercatat pada awal dekade ini. Walaupun tingkat pertumbuhan ini menempatkan Indonesia di antara negara-negara besar yang pertumbuhannya paling cepat di dunia, tidak adanya percepatan menjadi masalah yang perlu diperhatikan, mengingat lingkungan eksternal dan momentum reformasi kebijakan domestik yang baik.

...meskipun peningkatan perekonomian global terus berlanjut dan adanya momentum yang kuat dalam reformasi kebijakan

Pertumbuhan perekonomian global membaik, perdagangan internasional meningkat, dan kondisi moneter di negara-negara maju tetap stabil selama triwulan terakhir. Harga komoditas, walaupun menurun selama Triwulan ke-2, tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016. Yang lebih penting lagi, fundamental ekonomi makro Indonesia baik dan telah meningkat, karena Pemerintah terus menerapkan reformasi struktural yang penting. Peningkatan peringkat baru-baru ini oleh *Standard & Poor's* mengenai *sovereign credit rating* dan meningkatnya peringkat Indonesia dalam *Doing Business* Bank Dunia mencerminkan fundamental yang terus meningkat.

Maraknya investasi

Pertumbuhan investasi naik ke tingkat tertinggi sejak Triwulan ke-4 tahun 2015, didorong oleh investasi di sektor Bangunan Gedung dan Struktur. Pertumbuhan yang tinggi dalam investasi konstruksi sebagian mencerminkan adanya peningkatan investasi infrastruktur publik pada paruh pertama tahun ini, akibat meningkatnya komposisi pengeluaran – satu contoh penting dari reformasi struktural yang dilakukan di masa lalu. Tingkat suku bunga pinjaman yang lebih rendah, sejalan dengan penurunan tingkat suku bunga kebijakan sebesar 150 basis poin pada tahun 2016, dan investasi langsung asing yang tinggi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.

Pertumbuhan konsumsi swasta tidak mengalami peningkatan di tengah kondisi yang kondusif

Pertumbuhan konsumsi swasta secara tidak terduga tetap sama di Triwulan ke-2. Momentum yang stabil dalam konsumsi swasta, yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia, berlawanan dengan beberapa faktor pendorong yang menguntungkan: pertumbuhan lapangan kerja yang tinggi (empat juta pekerjaan yang tercipta pada tahun tersebut hingga bulan Februari), kenaikan gaji sebanyak dua digit, kepercayaan konsumen yang tinggi, menurunnya inflasi harga pangan, nilai Rupiah yang stabil, dan beralihnya periode Idul Fitri ke Triwulan ke-2 tahun ini, yang biasanya menyebabkan adanya lonjakan konsumsi. Sementara itu, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya, sebagian mencerminkan dampak dasar (*base effect*) dari peningkatan belanja barang yang besar di Triwulan ke-2 tahun lalu, ditambah dengan adanya hari kerja yang lebih sedikit di Triwulan ke-2 tahun ini.

Pertumbuhan ekspor melemah, berkontribusi pada melebarnya defisit transaksi berjalan

Setelah mengalami lonjakan pada Triwulan ke-1, pertumbuhan ekspor dan impor secara signifikan melambat, sebagian mencerminkan penurunan harga komoditas pada Triwulan ke-2 dan hari kerja yang lebih sedikit karena libur Lebaran. Defisit neraca berjalan meningkat dua kali lipat menjadi 2,0 persen dari PDB di Triwulan ke-2. Peningkatan musiman pada defisit penerimaan primer dan pelebaran defisit perdagangan jasa disebabkan oleh impor jasa transportasi dan perjalanan melonjak selama masa Lebaran. Hal ini juga berkontribusi terhadap defisit neraca berjalan yang lebih besar.

Menderita dalam jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang?

Tidak adanya peningkatan dalam pertumbuhan di Triwulan ke-2, terutama konsumsi sektor swasta, adalah teka-teki yang memerlukan data dan analisis lebih lanjut. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa perekonomian menyesuaikan diri dengan reformasi baru-baru ini, sementara dampak pertumbuhan membutuhkan waktu untuk terealisasi. Misalnya, reformasi subsidi yang sedang berlangsung menyiratkan adanya kenaikan inflasi sementara yang mengurangi daya beli banyak rumah tangga menengah dan atas. Namun demikian, manfaat nyata dari reformasi ini – peningkatan ruang fiskal untuk belanja modal tambahan – hanya akan bertambah dalam jangka menengah. Penjelasan lain atas momentum pertumbuhan yang tidak terlalu besar ini adalah perkembangan perekonomian yang sensitif terhadap harga komoditas, yang menurun di Triwulan ke-2 relatif terhadap Triwulan ke-1. Selain itu, masalah perhitungan statistik yang biasa terjadi mengingat peralihan periode hari raya Lebaran dan efek dasar hari raya tersebut, kemungkinan juga berperan dalam kinerja konsumsi publik dan ekspor.

Revisi Anggaran tahun 2017 dan pemotongan suku bunga BI baru-baru ini memberikan beberapa stimulus

Kebijakan fiskal dan moneter saat ini merespon momentum pertumbuhan dengan kebijakan yang menstimulasi ekonomi namun tetap berhati-hati (*prudent*). Revisi Anggaran 2017 yang baru-baru ini disetujui oleh DPR menetapkan defisit fiskal yang lebih tinggi sebesar 2,9 persen dari PDB, naik dari 2,4 persen dalam APBN tahun 2017, terutama karena kenaikan pengeluaran, termasuk subsidi karena adanya penundaan penghapusan subsidi listrik. Penerimaan juga direvisi menurun. Defisit akan tetap berada di dalam batas legal sebesar 3,0 persen serta perbaikan pemungutan penerimaan yang diharapkan akan mencegah pemotongan anggaran menjelang akhir tahun anggaran, mencerminkan pengelolaan fiskal yang baik yang terus berlanjut. Belum lama ini BI memulai siklus pelonggaran moneter yang baru, dengan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Agustus dan September untuk mendukung pertumbuhan PDB. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa inflasi saat ini lebih rendah dari perkiraan dan pertumbuhan kredit masih lambat.

Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 dari 5,1 persen pada tahun 2017 karena reformasi terus berlanjut mulai memberikan dampak, walaupun harga komoditas yang lemah memberikan hambatan

Pertumbuhan PDB riil yang diperkirakan mencapai 5,1 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 karena perekonomian global yang mendukung dan kondisi domestik yang lebih kuat. Kuatnya perekonomian domestik ini juga

disebabkan oleh reformasi perekonomian yang terus berlanjut dan secara bertahap mulai memberikan dampak. Konsumsi swasta diproyeksikan menguat seiring dengan kenaikan upah riil dan peningkatan lapangan kerja, sementara investasi swasta akan mendapatkan keuntungan dari penurunan suku bunga BI baru-baru ini yang berdampak pada penurunan biaya pinjaman, perbaikan lingkungan bisnis, dan peningkatan investasi publik di bidang infrastruktur. Sektor eksternal diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengingat perekonomian global semakin kuat, walaupun kontribusi ini sebagian akan diimbangi oleh nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*) yang diproyeksikan menurun karena adanya penurunan harga batu bara. Defisit neraca berjalan diperkirakan akan melebar dari 1,7 persen pada tahun 2017 menjadi 1,8 persen pada tahun 2018.

APBN tahun 2018 menegaskan kembali komitmen Pemerintah terhadap kebijakan fiskal yang realistis dan bertanggungjawab

Konsumsi pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018, namun defisit akan tetap terjaga karena peningkatan kinerja penerimaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan reformasi perpajakan. Sebagai sinyal atas komitmennya terhadap disiplin fiskal, APBN tahun 2018 yang diusulkan oleh Pemerintah menyiratkan defisit sebesar 2,2 persen dari PDB, suatu sinyal yang jelas yang menyatakan bahwa kehati-hatian fiskal mendapat perhatian yang tinggi. Perkiraan penerimaan bersifat konservatif, dan penurunan defisit bergantung pada pembatasan pengeluaran yang signifikan, terutama dalam pengeluaran belanja barang. Pengelolaan fiskal yang kuat terus memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan di masa depan.

Resiko terhadap perkiraan perekonomian mencakup hambatan-hambatan eksternal...

Risiko eksternal terhadap perkiraan perekonomian (*outlook*) mencakup beberapa faktor, yaitu: adanya ketidakpastian global jika Bank Sentral Amerika Serikat (*the Fed*) menyimpang dari perkiraan normalisasi kebijakan moneter dan neracanya yang dilakukan bertahap, pelemahan harga komoditas yang terus berjalan, dan implementasi kebijakan proteksionis oleh negara-negara maju yang akan memiliki dampak negatif pada pertumbuhan global. Perekonomian Indonesia cukup bergantung pada pendanaan eksternal, baik publik maupun pihak swasta, dan oleh karena itu tetap sensitif terhadap volatilitas arus modal global.

... dan hilangnya momentum reformasi

Momentum reformasi yang sudah berjalan juga penting dipertahankan karena kesenjangan dalam modal fisik, manusia, dan kualitas kelembagaan, masih cukup besar. Bagian B dari laporan ini menyoroti kasus kesenjangan modal infrastruktur, dengan tidak mengesampingkan kekurangan-kekurangan di sektor lain yang juga memerlukan komitmen yang teguh untuk melakukan reformasi dan memastikan pelaksanaannya di lapangan. Dengan semakin dekatnya pemilihan anggota legislatif

Tabel 1: Pertumbuhan PDB riil diperkirakan meningkat menjadi 5,3 persen pada tahun 2018

		2016	2017p	2018p
PDB riil	(Perubahan persentase tahunan)	5,0	5,1	5,3
Indeks Harga Konsumen	(Perubahan persentase tahunan)	3,5	4,0	3,5
Neraca transaksi berjalan	(Persen PDB)	-1,8	-1,7	-1,8
Saldo anggaran	(Persen PDB)	-2,5	-2,7	-2,2

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Untuk tahun 2016 adalah nilai yang sebenarnya; p adalah singkatan dari perkiraan Bank Dunia

dan pemilihan presiden, peluang untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi namun mungkin tidak populer, akan semakin sempit. Jika reformasi struktural ini diabaikan, pertumbuhan potensial bisa melambat dan berdampak buruk bagi perkiraan perekonomian.

Edisi ini mencakup topik fokus yang membahas peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur

Diperlukan adanya peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur untuk menutup kesenjangan infrastruktur di Indonesia

Kebutuhan infrastruktur di perekonomian di kota-kota besar Indonesia yang berkembang pesat sangatlah besar. Namun demikian, minimnya investasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur yang besar, yang menghambat pertumbuhan Indonesia dan membatasi laju pengentasan kemiskinan. Stok modal (*capital stock*) publik per kapita Indonesia yang hanya sepertiga dari negara-negara berkembang lainnya, menyiratkan adanya kesenjangan aset infrastruktur yang diperkirakan sebesar sekitar USD 1,5 triliun. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya infrastruktur, dan sebagai titik awal, menargetkan investasi tambahan di sektor transportasi, air bersih, energi dan sektor utama lainnya, sebesar lebih dari USD 400 miliar selama tahun 2015-2019. Memanfaatkan investasi sektor swasta dapat membantu Indonesia memenuhi kebutuhan infrastrukturnya yang besar dengan lebih efisien dan efektif. Peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur akan membutuhkan adanya perbaikan dalam (i) lingkungan hukum dan peraturan yang kompleks untuk kemitraan pemerintah-swasta, (ii) perencanaan proyek, proses penilaian dan seleksi, (iii) transparansi dan efisiensi badan usaha milik negara yang mendominasi sektor infrastruktur, dan (iv) kedalaman pasar perbankan lokal dan pasar modal. Pemerintah telah mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat laju investasi sektor swasta untuk menutup kesenjangan infrastruktur dengan negara-negara berkembang lainnya.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



1. Lingkungan perekonomian global pada umumnya menguntungkan

Peningkatan pertumbuhan global berlanjut selama paruh pertama tahun 2017

Peningkatan dalam momentum pertumbuhan global terus berlanjut sepanjang paruh pertama tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan yang lebih baik dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang di Triwulan ke-2, pertumbuhan perdagangan internasional yang terus berlanjut, dan kondisi moneter global yang akomodatif, di tengah terjadinya normalisasi kebijakan moneter AS secara bertahap serta menurunnya pelonggaran kuantitatif secara terukur oleh Bank Sentral Eropa (ECB - *European Central Bank*). Walaupun harga komoditas utama telah menurun sejak awal tahun ini, namun harga komoditas tersebut masih berada di atas harga rata-rata periode yang sama tahun lalu, sehingga menyebabkan negara-negara pengekspor komoditas utama mengalami lonjakan positif nilai tukar perdagangan (*terms-of-trade*).

Negara-negara besar mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi di Triwulan ke-2

Pertumbuhan di Triwulan ke-2 untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Kawasan Eropa dan Jepang serta China meningkat, relatif terhadap Triwulan ke-1¹ (Tabel 2). Di Amerika Serikat, pertumbuhan menguat didukung oleh pemulihan yang terjadi di pasar tenaga kerja, sementara di Kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagian

Tabel 2: Pertumbuhan di negara-negara besar menguat di Triwulan ke-2
(*pertumbuhan yoy, persen*)

	Q1-2017	Q2-2017
Amerika Serikat	2,0	2,1
Kawasan Eropa	1,9	2,2
Inggris raya	2,0	1,7
Jepang	1,4	2,1
Tiongkok	6,9	6,9

Sumber: statistik OECD; CEIC; Haver Analytics; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Laju pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, disesuaikan secara musiman

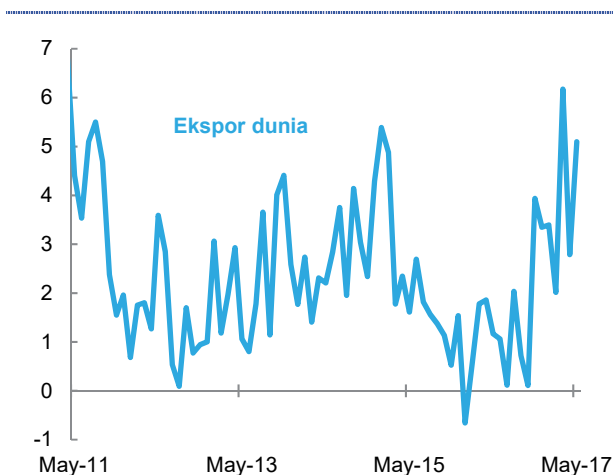
¹ Berdasarkan tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*) aktual di Triwulan ke-2, disesuaikan secara musiman dengan data OECD.

disebabkan oleh perkembangan politik yang positif, terutama dengan hasil pemilihan umum di Perancis. Di Jepang dan Tiongkok, pertumbuhan kembali pulih karena menguatnya permintaan dalam negeri dan ekspor²². Hal tersebut sebagian besar mencerminkan adanya pemulihan kondisi perekonomian di negara-negara pengekspor komoditas, pertumbuhan perekonomian di negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang (EMDEs - *emerging markets and developing economies*) juga mendapatkan momentum, didukung oleh permintaan global yang kuat dan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil.

Volume perdagangan global tumbuh paling cepat dalam enam tahun di Triwulan ke-2

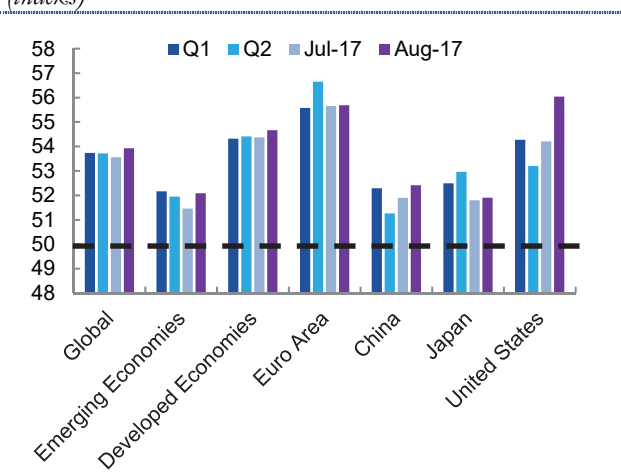
Volume perdagangan global juga mencatat pertumbuhan yang tinggi di Triwulan ke-2 sebesar 4,4 persen *yoy*, naik dari 3,2 persen di Triwulan ke-1 (Gambar 1). Pertumbuhan ekspor dan impor global menguat, seiring meningkatnya pertumbuhan perdagangan negara-negara maju yang melebihi pertumbuhan perdagangan negara-negara pasar berkembang yang lebih lemah. Pertumbuhan yang stabil dalam perdagangan global tersebut sebagian besar didorong oleh investasi, yang sebagian mencerminkan bahwa penurunan investasi global telah mencapai titik terendahnya dan mulai menuju pemulihan (*bottom out*). Perdagangan yang menguat yang didorong oleh investasi sejalan dengan peningkatan kepercayaan bisnis global yang terus berlanjut, ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembelian Manajer (*Purchasing Managers' Index* - PMI) di Triwulan ke-2, khususnya untuk Kawasan Eropa dan Jepang (Gambar 2).

Gambar 1: Volume perdagangan global menguat...
(pertumbuhan *yoy*, persen)



Sumber: CBP *World Trade Monitor*, perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 2: ... dan capaian yang positif pada Indeks Pembelian Manajer Gabungan terus memberi sinyal sentimen bisnis yang optimis
(indeks)



Sumber: *Markit Economics, Haver Analytics*, perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Hasil di atas 50 menunjukkan adanya ekspansi dan hasil di bawah 50 menunjukkan adanya kontraksi.

Pasar keuangan tetap tenang terlepas adanya kebijakan

Pasar keuangan global relatif tenang sepanjang paruh pertama tahun 2017. Hal ini sebagian besar karena pasar telah membukukan kenaikan suku bunga, kenaikan suku bunga dana federal AS pada bulan Juni baru-baru ini tidak mengganggu pasar keuangan global, seperti yang ditunjukkan oleh indeks VIX dan MOVE³ yang tetap

² Bank Dunia (2017c).

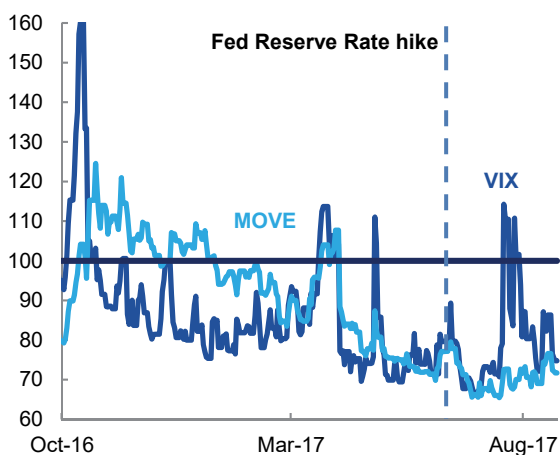
³ Indeks VIX mengukur volatilitas di pasar ekuitas, sementara indeks MOVE merupakan tolok ukur volatilitas pasar obligasi.

pengetatan moneter di Amerika Serikat

terjaga relatif rendah pasca kenaikan tersebut (Gambar 3). Di dalam negeri, imbal hasil obligasi Indonesia untuk seluruh tenor terus terjaga kestabilannya sejak kenaikan suku bunga dana federal AS⁴. Meskipun terjadi normalisasi kebijakan moneter secara bertahap di Amerika Serikat, kondisi moneter global tetap akomodatif. Bank Sentral Eropa (ECB) terus mempertahankan tingkat *refinancing* acuan pada rekor terendah sebesar nol persen, dan telah mengkonfirmasi pembelian aset bersih tersebut dimaksudkan untuk dapat berlangsung pada kecepatan bulanan sebesar 60 Miliar Euro sampai akhir bulan Desember 2017, atau lebih lama lagi, jika diperlukan. Demikian pula, *Bank of Japan* terus mempertahankan suku bunga utama jangka pendeknya tetap tidak berubah sebesar -0,1 persen dan program pembelian asetnya pada tingkat tahunan sebesar 80 triliun yen⁵.

Gambar 3: Normalisasi kebijakan moneter di AS memberi dampak yang terbatas pada pasar keuangan global

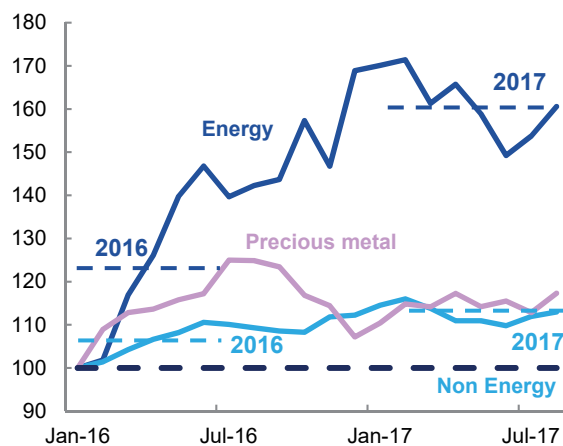
(indeks, 1 Januari 2017 = 100)



Sumber: Bloomberg; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 4: Harga komoditas masih lebih tinggi dibanding harga tahun lalu meski agak menurun tahun ini

(indeks, Januari 2016 = 100)



Sumber: *Pink Sheet* Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Garis horisontal menunjukkan indeks rata-rata harga Januari – Agustus untuk setiap kategori komoditas.

Meskipun melemah di Triwulan ke-2, harga komoditas masih lebih tinggi dibanding tahun lalu, sehingga memberi dorongan nilai tukar perdagangan yang positif bagi negara-negara utama pengekspor komoditas

Setelah melonjak di paruh kedua tahun 2016, harga-harga komoditas global telah menurun dari nilai puncaknya di awal tahun 2017, namun masih di atas nilai rata-ratanya pada periode yang sama tahun lalu (Gambar 4). Harga komoditas non-energi melemah, terutama karena menurunnya harga komoditas logam dan mineral. Harga energi mencapai puncaknya di bulan Februari dan menurun secara substansial sejak saat itu. Sementara itu, sebagian besar harga komoditas melemah di Triwulan ke-2, namun masih lebih tinggi dari nilainya tahun lalu, sehingga memberikan dorongan nilai tukar perdagangan yang positif bagi negara-negara utama pengekspor komoditas⁶.

⁴ Lihat pembahasan terinci di Bagian 4 mengenai sektor keuangan makro.

⁵ Bank of Japan (2017).

⁶ Lihat pembahasan terinci di Bagian 5 mengenai harga komoditas.

Resiko terhadap gambaran perekonomian global, yang sementara menurun, masih condong ke arah negatif

Meskipun menurun, risiko terhadap gambaran perekonomian global masih condong ke arah negatif. Ketegangan yang terus berlanjut dengan Korea Utara telah memberi tekanan hebat bagi pasar ekuitas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh lonjakan indeks VIX baru-baru ini. Eskalasi tak terduga dalam ketegangan akan memberi masalah bagi sentimen pasar, yang menyebabkan pelarian modal menuju tempat pelarian aset yang aman (*safe haven*), seperti surat utang jangka pendek (*treasury bills*) dalam Yen Jepang dan Dolar AS⁷. Pergeseran tak terduga dalam kebijakan moneter AS, termasuk rencana untuk mengurangi besaran neraca Bank Sentral (*Federal Reserve*), dapat memicu volatilitas pasar global. Demikian pula, perubahan dalam kebijakan perdagangan AS dapat meredakan aktivitas perdagangan global. Yang terakhir, penurunan harga komoditas yang tidak terduga akan memberikan tekanan terhadap melemahnya nilai tukar perdagangan para pengeksport komoditas, yang memberi masalah bagi keseimbangan eksternal dan pertumbuhan ekonomi.

2. Tingkat konsumsi mengecewakan, namun keuntungan investasi menyebabkan pertumbuhan tetap stabil

PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 5 persen selama dua triwulan berturut-turut yang didukung oleh penguatan pertumbuhan investasi

PDB riil Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen pada Triwulan ke-2 tahun 2017, tidak berubah dari Triwulan ke-1, dan sedikit di bawah ekspektasi pasar sebesar 5,1 persen. Tingkat pertumbuhan (*yoy*) telah berada di sekitar 5 persen sejak Triwulan ke-1 tahun 2014, jauh lebih rendah daripada yang tercatat pada awal dekade ini. Pertumbuhan investasi meningkat mencapai tingkat tertinggi pada enam triwulan terakhir, namun diimbangi oleh kontraksi konsumsi Pemerintah, pertumbuhan konsumsi sektor swasta yang tidak berubah, dan perlambatan pertumbuhan ekspor bersih. Meskipun melambat secara signifikan, pertumbuhan ekspor dan impor tetap positif selama tiga triwulan secara berturut-turut, setelah terjadi kontraksi selama dua tahun (Gambar 5). Di sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sektor industri, namun terbebani oleh penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan di sektor pertanian (Gambar 6).

Pertumbuhan konsumsi sektor swasta tetap tidak berubah meski pada musim perayaan di bulan Juni

Meskipun terjadi pergeseran perayaan Idul Fitri ke Triwulan ke-2 tahun ini, yang biasanya menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi, pertumbuhan konsumsi sektor swasta adalah sebesar 5,0 persen *yoy* selama empat triwulan berturut-turut. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit melambat, dengan pertumbuhan yang sebagian besar didorong oleh pengeluaran di restoran dan hotel⁸ (Gambar 7). Indikator bulanan juga mengisyaratkan melemahnya konsumsi rumah tangga. Kecuali untuk indeks kepercayaan konsumen yang lebih tinggi, penjualan eceran, penjualan mobil penumpang, dan penjualan sepeda motor juga melambat selama triwulan kedua dibandingkan dengan Triwulan ke-1 (Gambar 8). Pertumbuhan konsumsi sektor swasta yang tidak berubah dapat mengindikasikan adanya kelemahan mendasar, di mana lonjakan yang diakibatkan oleh musim hari raya, penurunan tingkat pengangguran dan lonjakan upah riil⁹ diimbangi oleh inflasi yang lebih tinggi, sebagian diakibatkan adanya pemotongan subsidi listrik, harga bahan bakar non subsidi yang lebih tinggi, dan pajak rokok, yang membebani daya beli konsumen¹⁰. Selain itu, peningkatan upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak

⁷ The Guardian (2017).

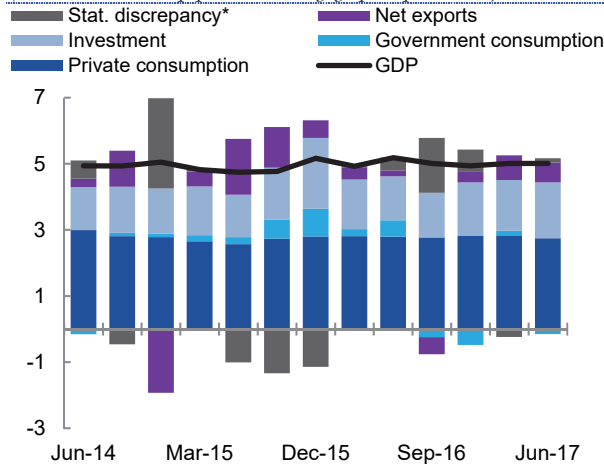
⁸ Pertumbuhan konsumsi lembaga nirlaba meningkat dari 8,0 persen pada Triwulan ke-1 menjadi 8,5 persen di Triwulan ke-2, meskipun kontribusinya tetap kecil sebesar 0,2 poin persentase terhadap total pertumbuhan konsumsi sektor swasta.

⁹ Lihat pembahasan terinci di Bagian 7 mengenai pasar tenaga kerja.

¹⁰ Indonesia Investment (2017).

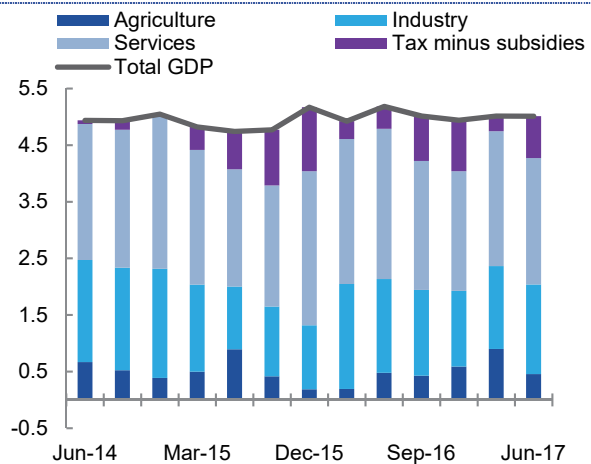
mungkin telah menyebabkan adanya tindakan antisipasi berupa penghematan yang lebih ketat dari rumah tangga berpendapatan tinggi, yang diindikasikan oleh kenaikan simpanan bank akibat rumah tangga secara efektif mengurangi konsumsi.

Gambar 5: Pertumbuhan PDB tetap tidak berubah pada Triwulan ke-2 tahun 2017 karena investasi yang lebih tinggi diimbangi oleh kontraksi konsumsi pemerintah dan perlambatan ekspor bersih
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



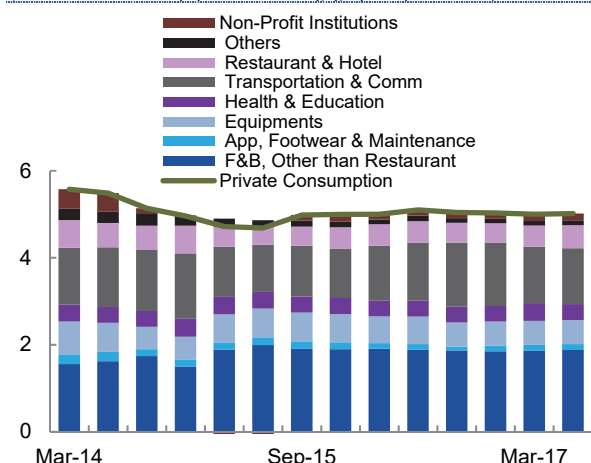
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * Perbedaan statistik mencakup perubahan persediaan.

Gambar 6: Sektor industri mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan sektor pertanian secara substansial melambat
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



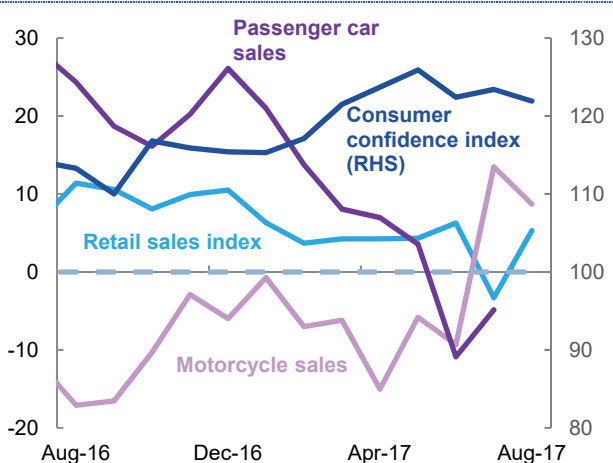
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Sektor industri terdiri dari pertambangan dan galian, manufaktur, utilitas dan konstruksi; Sektor jasa terdiri dari perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa.

Gambar 7: Konsumsi sektor swasta mencatat pertumbuhan yang stabil; pengeluaran untuk makanan dan minuman, serta transportasi dan komunikasi merupakan kontributor terbesar
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



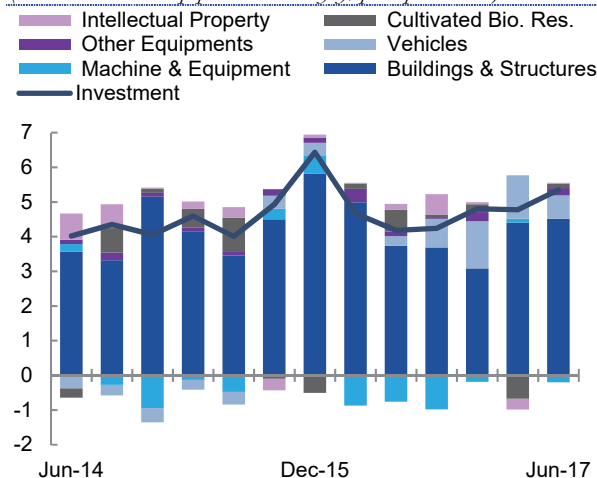
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia.

Gambar 8: Indikator konsumsi bulanan melemah di Triwulan ke-2
(pertumbuhan 3mma yoy, persen, Seb. Kiri; indeks; Seb. Kanan)



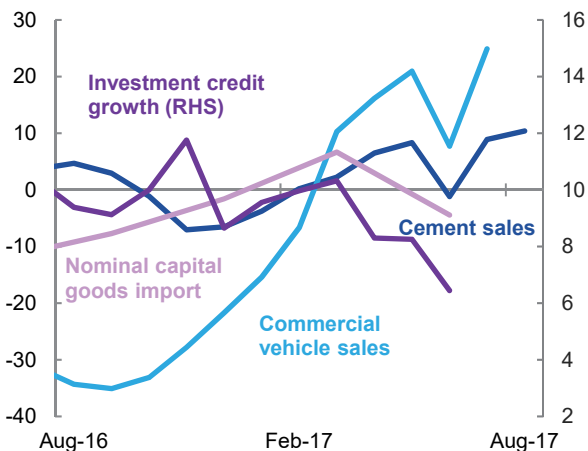
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Indeks penjualan eceran diukur secara tahun-ke-tahun (yoy). Semua variabel lainnya di sebelah kiri diukur secara rata-rata persentase pergerakan selama 3 bulan (mma) yoy.

Gambar 9: Investasi di Bangunan Gedung dan Struktur terus mendorong pertumbuhan investasi
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 10: Indikator bulanan memberi sinyal adanya pelemahan dalam pertumbuhan investasi
(pertumbuhan 3mma yoy, persen, Seb. Kiri; persen; Seb. Kanan)



Sumber: BI; BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Nilai nominal dari impor barang modal diukur secara yoy. Semua variabel lainnya di Seb. Kiri diukur secara persentase rata-rata pergerakan dalam 3 bulan (mma) yoy.

Pertumbuhan investasi meningkat mencapai tingkat tertinggi pada enam triwulan terakhir...

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar satu setengah menjadi sebesar 5,4 persen dari 4,8 persen pada Triwulan ke-1 tahun 2017, secara signifikan didorong oleh pertumbuhan investasi pada bangunan gedung dan struktur (Gambar 9), yang sejalan dengan kenaikan penjualan semen dan penjualan kendaraan niaga di Triwulan ke-2 (Gambar 10). Investasi infrastruktur pemerintah (dan BUMN) yang lebih tinggi tampaknya telah mendapat pijakan kuat meskipun terjadi perlambatan dalam pertumbuhan pengeluaran belanja modal publik dari APBN, sementara suku bunga yang lebih rendah juga memberikan kontribusi positif. Investasi pada kendaraan dan 'Peralatan Lainnya' (kategori yang mencakup peralatan kantor dan barang elektronik) juga bertumbuh dengan kuat. Sumber Daya Hayati dan Produk Kekayaan Intelektual pulih setelah berkontraksi di Triwulan ke-1, dan memberikan dorongan tambahan terhadap total investasi. Sebaliknya, investasi mesin dan peralatan mengalami kontraksi, sejalan dengan melemahnya impor barang modal. Investasi langsung asing naik ke tingkat tertingginya sejak Triwulan ke-3 tahun 2016¹¹.

¹¹ Lihat pembahasan terinci di Bagian 5 mengenai sektor eksternal ini.

...namun diimbangi oleh kontraksi dalam konsumsi Pemerintah...

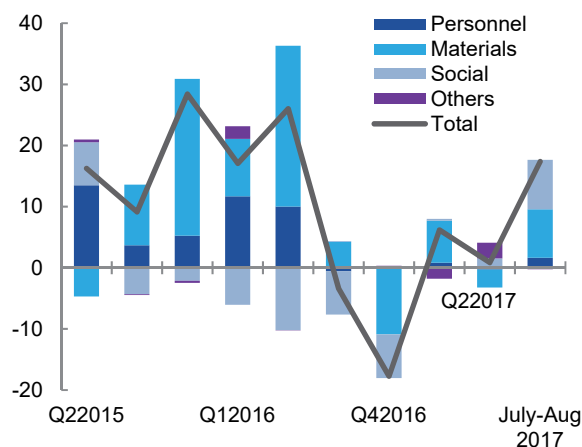
Konsumsi pemerintah, dengan pangsa sebesar 8,6 persen dari PDB, berkontraksi sebesar 1,9 persen *yy* secara riil (tingkat pertumbuhan nominal sebesar 0,8 persen), turun dari 2,7 persen pada Triwulan ke-1 (6,2 persen dalam nominal). Perlambatan tersebut sebagian disebabkan oleh penurunan belanja barang (7,0 persen *yy* secara nominal), yang mungkin mencerminkan efek dasar dari peningkatan besar dalam belanja barang selama periode yang sama tahun lalu (Gambar 11). Belanja pegawai juga menurun sebagian disebabkan oleh keterlambatan pembayaran bonus kepada pegawai negeri. Belanja sosial naik 18,6 persen (secara nominal) dari kenaikan sebesar 3,4 persen di Triwulan ke-1, setelah berkontraksi selama enam triwulan sebelumnya berturut-turut. Namun demikian, data realisasi anggaran bulanan pada bulan Juli dan Agustus menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pemerintah meningkat secara signifikan sebesar 17,4 persen *yy* secara nominal. Pemulihan pada bulan Juli dan Agustus sebagian besar didorong oleh lonjakan dalam belanja barang dan belanja sosial.

... dan pertumbuhan ekspor bersih yang melemah sebagian disebabkan oleh kelesuan sektor manufaktur

Pertumbuhan ekspor dan impor anjlok menjadi masing-masing sebesar 3,4 persen dan 0,5 persen, setelah melonjak di Triwulan ke-1. Ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB – turun dari 0,7 poin persentase pada Triwulan ke-1 tahun 2017. Hal ini berpotensi terjadi karena sejumlah besar hari libur, yang menyebabkan hari kerja menjadi lebih sedikit secara signifikan di Triwulan ke-2 tahun ini, yang menurunkan aktivitas perekonomian. Perlambatan pertumbuhan ekspor ini terutama disebabkan oleh terjadinya penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan ekspor barang, terutama pertumbuhan ekspor non-migas (Gambar 12), sementara perlambatan pertumbuhan impor terutama disebabkan oleh kontraksi impor barang-barang minyak dan gas bumi (Gambar 13). Menurunnya pertumbuhan ekspor non-migas disebabkan oleh ekspor manufaktur yang mengalami kontraksi¹², sementara penurunan impor minyak berpotensi disebabkan oleh kenaikan produksi (*lifting*) minyak mentah dalam negeri, di mana beberapa kilang kembali memproduksi setelah berhenti beroperasi pada Triwulan ke-1 akibat kerusakan generator dan perawatan rutin.

Gambar 11: Kontraksi konsumsi pemerintah sebagian disebabkan oleh penurunan yang tajam pada belanja barang

(kontribusi terhadap pertumbuhan nominal *yy*, poin persentase)



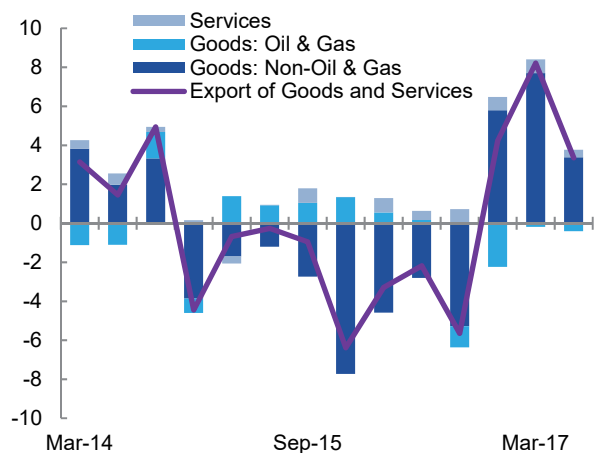
Sumber: Data realisasi anggaran bulanan, Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Realisasi konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja sosial dan pengeluaran lainnya.

¹² Lihat pembahasan terinci di Bagian 5 mengenai sektor eksternal ini.

Gambar 12: Total pertumbuhan ekspor anjlok karena ekspor non-migas menurun dan ekspor migas berkontraksi

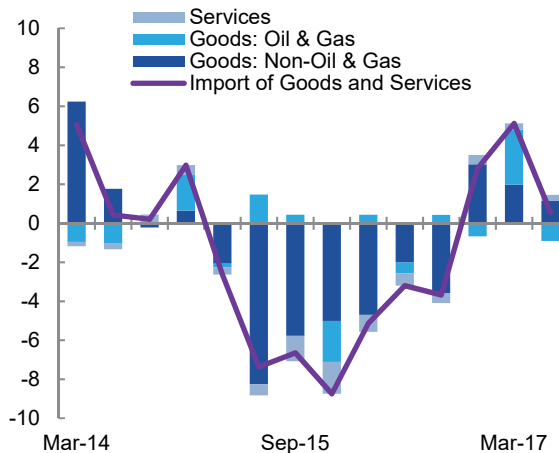
(kontribusi terhadap pertumbuhan riil yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 13: Pertumbuhan impor total juga melambat dengan kontraksi pada impor migas

(kontribusi terhadap pertumbuhan riil yoy, poin persentase)



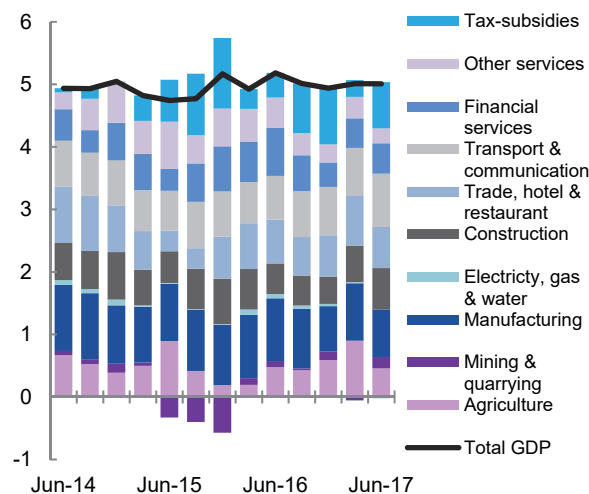
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia.

Di sisi produksi, peningkatan di sektor konstruksi dan transportasi diimbangi oleh penurunan yang signifikan di sektor pertanian

Di sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh sektor industri, terutama konstruksi, di mana pertumbuhan naik dari 5,9 persen pada Triwulan ke-1 menjadi 7,0 persen pada triwulan ini (Gambar 14), sejalan dengan kontribusi investasi di Bangunan Gedung dan Struktur terhadap total pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang kuat ini sebagian diimbangi oleh penurunan yang signifikan di sektor pertanian, yang pertumbuhannya turun dari 7,1 persen menjadi 3,3 persen di Triwulan ke-2. Pertumbuhan sektor jasa juga menurun, terutama karena perlambatan pertumbuhan Jasa-jasa Lain (termasuk layanan publik, layanan pendidikan, layanan kesehatan dan kegiatan pelayanan sosial). Pajak dikurangi dengan subsidi, yang sering dikenal sebagai pajak tidak langsung bersih¹³, tumbuh cukup tinggi sebesar 23,3 persen di Triwulan ke-2. Kategori ini umumnya tumbuh pesat selama lima tahun terakhir.

Gambar 14: Sektor konstruksi mengalami peningkatan yang paling pesat, seiring dengan pertumbuhan investasi yang tinggi pada bangunan gedung dan struktur

(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

¹³ Pajak Tidak Langsung Bersih adalah pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Pajak tidak langsung meliputi pajak penjualan, bea ekspor dan impor, cukai dan pajak lainnya, kecuali pajak penghasilan dan pajak pribadi sedangkan subsidi terdiri dari subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada unit-unit produksi.

3. Inflasi IHK (*headline inflation*) meningkat pada Triwulan ke-2 akibat kenaikan harga barang yang diatur oleh Pemerintah (*administered price*), namun inflasi pangan, transportasi, dan inflasi inti menurun

Tekanan inflasi meningkat di Triwulan ke-2 dibandingkan dengan Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-4 tahun 2016 yang didorong oleh adanya kenaikan tarif listrik...

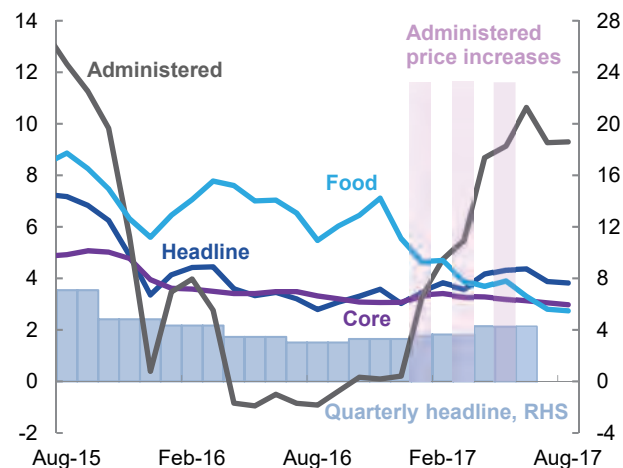
Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) mencapai level tertingginya dalam 15 bulan di bulan Juni dan meningkat menjadi rata-rata 4,3 persen *yoy* di Triwulan ke-2 tahun 2017 dari rata-rata 3,6 persen pada Triwulan ke-1 dan 3,3 persen pada Triwulan ke-4 tahun 2016. Lonjakan inflasi tersebut, yang mulai menurun pada bulan Juli dan Agustus, disebabkan oleh adanya efek gabungan dari kenaikan tarif listrik pada paruh pertama tahun ini dan masa Ramadhan dan Idul Fitri pada bulan Juni (Gambar 15). Tarif listrik dinaikkan untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900-VA (18,7 juta rumah tangga)¹⁴ pada bulan Januari, Maret dan Mei tahun ini untuk mengurangi belanja subsidi energi melalui penetapan sasaran yang lebih baik¹⁵. Inflasi inti rata-rata sebesar 3,2 persen pada Triwulan ke-2, lebih rendah dibanding rata-rata 3,4 persen di Triwulan ke-1.

... namun tekanan peningkatan harga dan inflasi menurun pada bulan Juli dan Agustus

Pada saat yang sama, meskipun terjadi kenaikan harga barang-barang yang diatur Pemerintah (*administered price*) yang relatif tajam, tekanan kenaikan harga sebagian diimbangi oleh turunnya inflasi pangan sepanjang paruh pertama tahun 2017. Kenaikan harga bahan pangan rata-rata sebesar 2,9 persen pada Triwulan ke-2, terendah dalam 13 tahun terakhir, sebagian besar disebabkan untuk kondisi cuaca yang menguntungkan dan keberhasilan program pemerintah untuk menstabilkan harga pangan (Kotak 1). Demikian pula, inflasi harga makanan siap saji menurun menjadi rata-rata 4,6 persen di Triwulan ke-2, dan menjadi yang terendah sejak Triwulan ke-1 tahun 2012.

Inflasi IHK turun pada bulan Juli dan Agustus menjadi masing-masing sebesar 3,9 dan 3,8 persen *yoy*, dari 4,4 persen pada bulan Juni, karena meredanya tekanan peningkatan sementara di H1 dan inflasi pangan yang terus menurun. Memang benar, inflasi bahan makanan turun ke level terendah selama 17 tahun ini sebesar 1,5 persen pada bulan Agustus, sementara harga makanan siap saji hanya naik menjadi 4,2 persen, terendah sejak bulan Oktober 2004¹⁶. Inflasi inti berada pada rekor

Gambar 15: Inflasi IHK meningkat di Triwulan ke-2 karena adanya kenaikan tarif listrik
(*perubahan yoy, persen; pengamatan terakhir di bulan Agustus 2017*)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Harga pangan adalah rata-rata tertimbang dari komponen harga bahan baku dan olahan dari IHK

¹⁴ Lihat bank Dunia (2017a).

¹⁵ Lihat Bank Dunia (2017d).

¹⁶ Bobot IHK saat ini dibangun berdasarkan data pengeluaran rumah tangga dalam Survei Biaya Hidup, Badan Pusat Statistik. Survei ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan survei terakhir dilakukan pada tahun 2012. Bobot untuk 'makanan siap saji' berdasarkan Survei tahun 2012 adalah 16,2 persen.

bulanan terendah sebesar 3,0 persen pada bulan Agustus, sedikit berkurang dari bulan Juni dan Triwulan ke-4 tahun 2016. Harga-harga yang stabil di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil menunjukkan bahwa perkiraan inflasi sebagian besar telah dapat dijaga, dengan nilai tukar yang stabil, harga komoditas yang rendah, serta pelonggaran inflasi makanan yang mengimbangi tekanan ke atas dari kenaikan harga listrik rumah tangga.

Kotak 1: Inflasi harga makanan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri mereda tahun ini, sebagian karena upaya Pemerintah

Periode Ramadhan dan Idul Fitri baru-baru ini di bulan Mei-Juni, yang biasanya mengalami tekanan kenaikan harga yang signifikan, mengalami tingkat kenaikan harga yang menurun (serupa dengan yang diamati pada tahun 2014 karena faktor cuaca yang menguntungkan dan adanya kebijakan impor beras¹), terutama karena menurunnya inflasi pangan terutama dari bahan makanan. Rendahnya harga bahan makanan domestik utama seperti beras, gula, ayam, dan minyak goreng, memberikan sumbangan inflasi makanan yang sangat rendah selama periode Ramadhan ini (Gambar 16).

Terlepas dari kondisi cuaca yang kondusif, inflasi harga pangan yang rendah dikaitkan dengan upaya Pemerintah untuk menstabilkan harga pangan dalam negeri yang melibatkan kementerian-kementerian terkait, lembaga-lembaga seperti Bulog (Badan Urusan Logistik), dan asosiasi perdagangan. Sebelum bulan Ramadhan, Pemerintah mengizinkan impor bawang putih, daging sapi, dan gula untuk meningkatkan stok pangan dalam negeri. Misalnya, untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daging sapi dalam negeri dan untuk mengurangi tekanan pada harga, Kementerian Perdagangan mengizinkan impor 10.000 ton daging sapi, di samping stok sebanyak 45.000 ton di gudang Bulog². Sedangkan untuk beras, gudang lokal diminta untuk menambah stok, sementara dilakukan tindakan yang keras terhadap praktek penimbunan oleh para operator lokal, yang secara historis mendorong kenaikan harga, terutama menjelang bulan Ramadhan³. Selain itu, program Jalan Tol Laut yang diluncurkan pada tahun 2015 dan meningkatnya teknologi infrastruktur digital saat ini juga berkontribusi untuk mengurangi kemacetan dalam sistem distribusi makanan⁴. Suatu portal web yang disponsori oleh bank sentral, [hargapangan.id](http://www.hargapangan.id), menampilkan harga pangan rata-rata dan kelangkaan pangan di seluruh negeri, suatu panduan yang berguna bagi pemerintah dalam mengarahkan pengiriman bahan pangan yang sangat dibutuhkan.

Pada awal tahun 2017, Pemerintah menandatangani MoU dengan sejumlah asosiasi ritel dan distributor makanan untuk menyetujui harga patokan (Harga Eceran Tertinggi atau HET) dari komoditas pangan utama. Untuk lebih mendukung efektivitas kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani MoU lain pada bulan Mei 2017, untuk menyetujui pertukaran informasi untuk mencegah kartel impor untuk menetapkan kenaikan harga bahan makanan pokok secara besar-besaran.

Selain itu, juga pada awal tahun ini, Pemerintah mengumumkan enam langkah kebijakan untuk mengendalikan inflasi tahun ini, termasuk memperbaiki infrastruktur logistik pangan, mengembangkan *database* yang memantau lalu lintas bahan pangan dan barang, menyediakan instrumen fiskal untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pangan, serta memperbaiki pola tanam makanan pokok⁵.

¹ Lihat Bank Dunia (2014).

²

http://www.salaamgateway.com/en/story/indonesia_pushing_early_beef_imports_ahead_of_ramadan_will_review_process_for_india_buffalo_meat_-_salaam02042017164159/

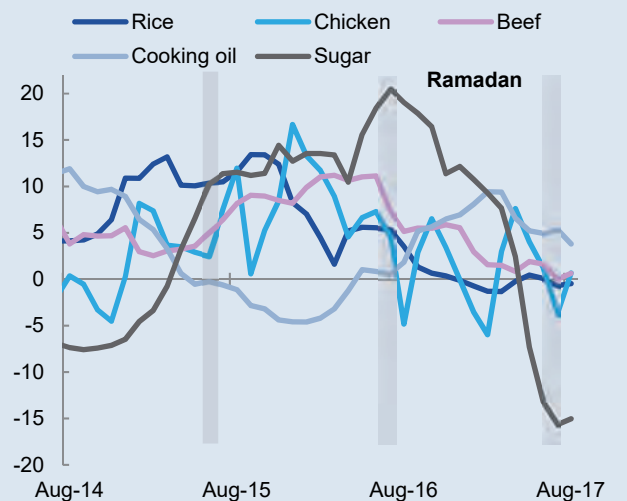
³ EIU (2017).

⁴ Siaran pers Bank Indonesia, "Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Pengendalian Inflasi", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195517.aspx, July 27, 2017.

⁵ <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/ini-enam-langkah-strategis-pemerintah-dan-bi-untuk-jaga-inflasi-2017>

Gambar 16: Penurunan harga pangan utama dalam negeri terus berlanjut selama bulan Ramadhan tahun 2017

(perubahan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

4. Pasar keuangan berkinerja baik, mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi makro

Minat investor terhadap aset Indonesia terus menguat di Triwulan ke-2

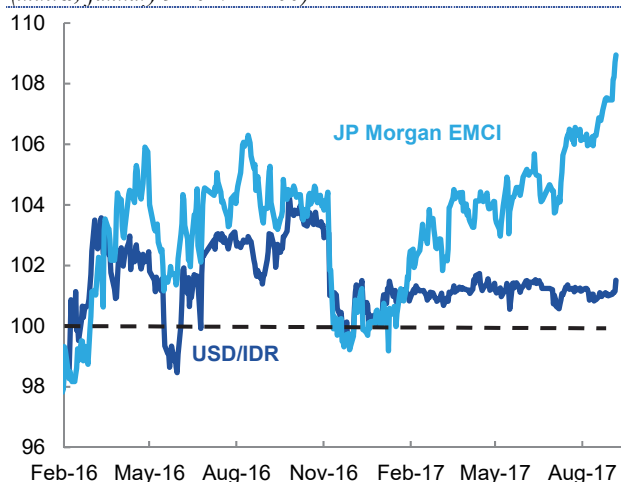
Pada Triwulan ke-2, aset Indonesia melanjutkan pola yang terlihat pada Triwulan ke-1 dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sekali lagi bertumbuh sebesar hampir 5 persen (mengungguli beberapa mitra regional kecuali India, Vietnam dan Filipina), imbal hasil obligasi menurun dan nilai Rupiah sedikit menguat terhadap dolar AS.

Nilai Rupiah stabil sementara mata uang negara-negara pasar berkembang yang setara terapresiasi

Sementara beberapa mata uang negara pasar berkembang lainnya mengalami apresiasi, stabilitas nilai Rupiah (Gambar 17) bertahan di sebagian besar Triwulan ke-2 dengan nilai yang tetap tidak berubah dan mengarah pada depresiasi efektif (Gambar 18). Kenaikan cadangan devisa yang terlihat pada semester pertama tahun ini (mendekati level rekor yang tertinggi) berkontribusi terhadap stabilitas nilai Rupiah, yang mengimbangi tekanan ke atas yang timbul dari kuatnya portofolio dan arus modal yang masuk. Namun demikian, dalam beberapa bulan terakhir ini, tren tersebut sedikit berbalik.

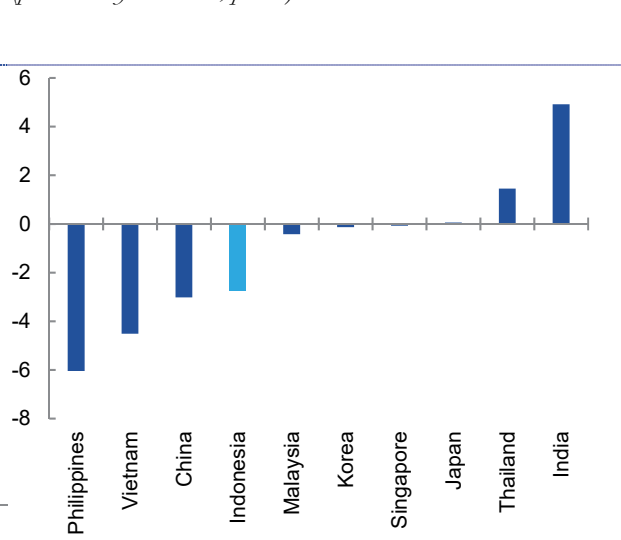
Gambar 17: Nilai Rupiah yang stabil di tengah menguatnya mata uang Negara-negara Pasar Berkembang...

(indeks, January 3 2017 = 100)



Sumber: CEIC, JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi

Gambar 18: ...menyiratkan adanya depresiasi efektif
(perubahan year-to-date, persen)



Sumber: JP Morgan Real Broad Effective Exchange Rate Index, Berbasis IHK (2010 = 100); perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi

Investor terus tertarik pada ekuitas Indonesia di Triwulan ke-2...

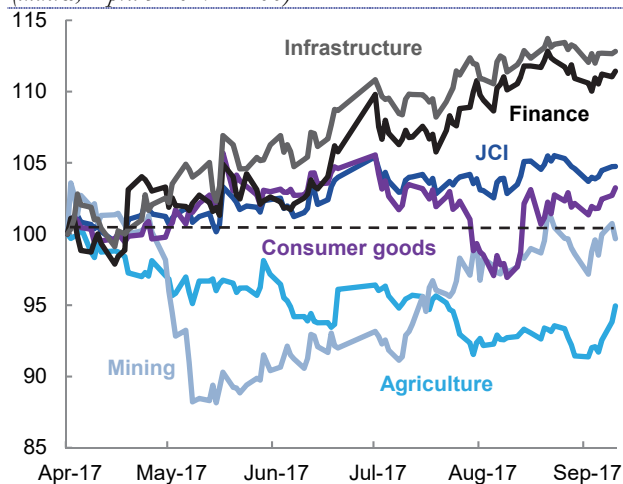
Sektor infrastruktur, keuangan dan barang konsumsi memimpin dengan penguatan yang tinggi di Triwulan ke-2 (Gambar 19). Momentum yang kuat di Triwulan ke-1 dan Triwulan ke-2 didorong oleh imbal hasil yang cukup besar menuju ke Triwulan ke-3, meskipun IHSG mencapai rekor tertinggi di awal Juli. Secara khusus, sub indeks manufaktur dan perdagangan menurun. Namun demikian, dalam apa yang mungkin menjadi pertanda baik bagi keseluruhan aktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan, sub-indeks pertambangan, infrastruktur dan keuangan naik pada Triwulan ke-3.

...serta obligasi yang imbal hasilnya terus menurun

Seperti halnya ekuitas, investor juga mencari obligasi Indonesia di Triwulan ke-2 dengan imbal hasil obligasi yang jatuh di semua tenor, namun pada laju yang lebih lambat dari yang terlihat pada Triwulan ke-1. Mengikuti tren di Triwulan ke-1 2017,

penerbitan obligasi tetap mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribed*) di Triwulan ke-2 karena investor mencari imbal hasil¹⁷. Selisih (*spread*) imbal hasil obligasi Indonesia dan AS terus berlanjut di Triwulan ke-2 (Gambar 20). Tren penurunan imbal hasil ini juga muncul di Triwulan ke-3. Imbal hasil obligasi AS dengan tenor 10 tahun telah turun 11 basis poin karena ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea menyebabkan peningkatan permintaan terhadap sarana pelarian aset yang aman (*safe haven*). Secara *year-to-date*, imbal hasil obligasi Indonesia di semua tenor masing-masing turun rata-rata sebesar 130 basis poin.

Gambar 19: Sektor infrastruktur, keuangan dan barang konsumsi memimpin di Triwulan ke-2
(indeks, April 3 2017 = 100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 20: Imbal hasil obligasi turun dan selisih (*spread*) antara obligasi Indonesia dan AS mengecil
(persen)



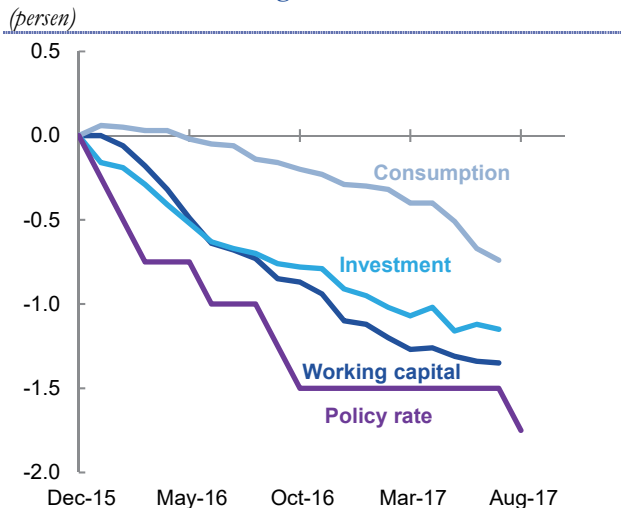
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan pertumbuhan ekonomi di Triwulan ke-2 serta inflasi yang rendah

Setelah suku bunga stabil sebesar 4,75 persen sejak bulan Oktober 2016, Bank Indonesia (BI) memulai siklus pelonggaran baru dengan memotong suku bunga acuan, *7-day reverse repo*, dengan 25 basis poin pada bulan Agustus dan September. Inflasi yang rendah dan defisit neraca transaksi berjalan yang terkelola dengan baik dipergunakan sebagai dasar oleh BI sebagai alasan utama bagi program pelonggaran baru ini. Bank sentral juga mencatat bahwa risiko eksternal

yang berasal dari laju normalisasi kebijakan moneter AS dan rencana Bank Sentral AS untuk mengurangi ukuran neraca telah menurun. Hal itu memberi tambahan ruang bagi kebijakan pelonggaran moneter. Penurunan suku bunga juga dilakukan

Gambar 21: Suku bunga pinjaman modal kerja dan investasi turun secara signifikan
(persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

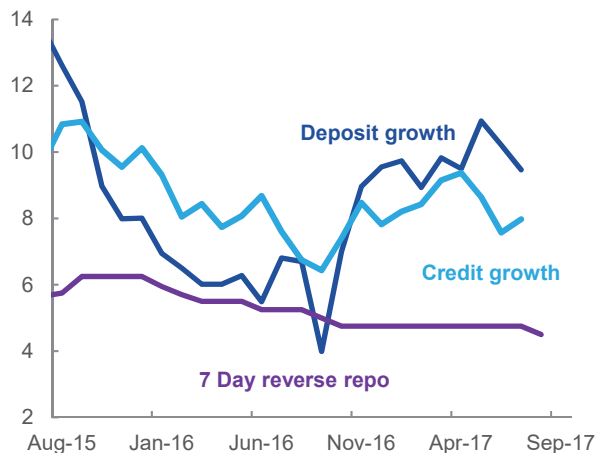
¹⁷ Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (22 Agustus 2017).

karena pertumbuhan PDB di Triwulan ke-2 yang lebih lemah dari perkiraan dan beberapa tanda bahwa pemotongan suku bunga yang dilakukan pada tahun 2016 telah mulai berdampak pada perekonomian secara riil, Tingkat suku bunga pinjaman modal kerja dan investasi telah turun dan berkontribusi terhadap pertumbuhan investasi yang lebih kuat di Triwulan ke-2. Selain itu, mengingat tekanan harga yang cukup besar dan adanya fakta bahwa APBN tahun 2018 memberi sinyal mengenai berlanjutnya komitmen terhadap kebijakan fiskal yang berhati-hati, kemungkinan akan ada ruang bagi pelonggaran lebih lanjut jika diperlukan.

Sementara suku bunga pinjaman untuk modal kerja dan investasi turun sebesar paling sedikit 100 basis poin sejak Januari 2016, suku bunga pinjaman konsumsi turun hanya sekitar 70 basis poin (Gambar 21). Sayangnya, pertumbuhan kredit juga berbalik dari lintasannya ke atas yang terlihat di akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Pertumbuhan deposito terus melampaui pertumbuhan kredit. Pertumbuhan deposito mencapai dua digit, pada bulan Mei dan Juni, untuk pertama kalinya sejak September 2015 dan telah sedikit berkurang sejak saat itu. Pertumbuhan ini, terlepas dari tingkat suku bunga simpanan utama, seperti suku bunga deposito 3 bulan, turun rata-rata sebesar 130 basis poin sejak Januari 2016 (Gambar 22).

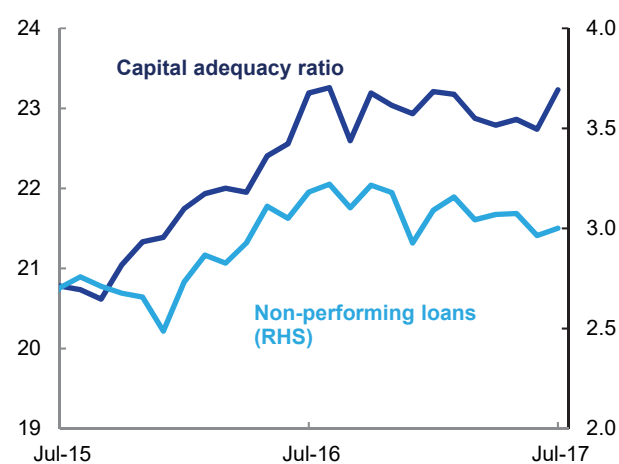
Kredit macet (NPLs - *non-performing loans*) saat ini tetap tidak berubah sejak pertengahan tahun lalu, sementara rasio kecukupan modal juga sama saja, dan tetap berada di atas ambang batas Basel III (Gambar 23). Sementara NPL tidak menjadi perhatian yang signifikan saat ini, ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang direstrukturisasi (dengan mengecualikan Kredit Macet) meningkat namun mengingat adanya penyangga yang cukup dalam sistem perbankan, hal ini bukanlah sesuatu yang harus diperhatikan pada tahap ini¹⁸.

Gambar 22: Laju pertumbuhan deposito terus meningkat di Triwulan ke-2
(pertumbuhan, persen yoy)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 23: Sistem perbankan tetap sehat
(persen)



Sumber: CEIC

¹⁸ Moody's Investor Service (24 Agustus 2017).

5. Harga komoditas menurun sementara defisit transaksi berjalan meningkat dua kali lipat

Harga untuk sebagian besar komoditas utama Indonesia cenderung stabil dan sebagian lainnya mengalami penurunan di Triwulan ke-2

Enam komoditas utama Indonesia, termasuk minyak mentah, minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, batubara, logam dasar, dan gas alam cair (*liquefied natural gas / LNG*), dan produk olahannya mencapai hampir 45 persen dari total ekspor pada bulan Juni 2017¹⁹. Harga untuk sebagian besar komoditas ekspor utama tersebut tetap stabil atau telah mengalami penurunan di Triwulan ke-2. Pengecualiannya adalah bagi harga LNG yang naik.

Setelah mencapai level tertinggi selama hampir lima tahun terakhir pada akhir tahun 2016, harga batubara mulai menurun pada awal Triwulan ke-2, sebagian karena pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melonggarkan batas produksi dalam negeri mereka. Penurunan lebih lanjut kemudian terhenti oleh gangguan pasokan yang disebabkan oleh Badai Tropis Debbie. Penurunan harga minyak di Triwulan ke-2 juga terdorong oleh kondisi pasokan. Peningkatan produksi minyak AS yang signifikan mendorong pasar minyak mentah untuk mengabaikan risiko geopolitik dan, sebaliknya, berfokus pada ketidakmampuan OPEC dan Rusia untuk mengurangi produksi untuk menyeimbangkan kembali kondisi pasar. Harga LNG terus meningkat di Triwulan ke-2 karena pasar mengantisipasi tingginya permintaan untuk keperluan pembangkit listrik selama musim panas. Harga karet dan CPO, di sisi lain, telah menurun di Triwulan ke-2 karena tingginya produksi dan melemahnya permintaan (lihat Kotak 2 untuk pembahasan lebih terinci mengenai pergerakan harga komoditas dalam beberapa bulan terakhir ini).

Tampilan data terbaru pada bulan Juli dan Agustus menunjukkan adanya kenaikan harga untuk semua komoditas. Untuk batubara, CPO, karet, dan minyak mentah, harga yang lebih tinggi di bulan Juli dan Agustus mewakili terjadinya pemulihan karena harga telah menurun setelah mencapai puncaknya pada akhir tahun lalu sampai akhir awal tahun ini. Harga LNG dan logam dasar, di sisi lain, telah menguat secara konsisten sejak paruh kedua tahun 2016 (Gambar 24).

Nilai tukar perdagangan (ToT) komoditas utama Indonesia pada akhir tahun 2017 diperkirakan berada di tingkat yang sama seperti tahun 2016, sebelum menurun pada tahun 2018

Proyeksi Bank Dunia (2017b) menunjukkan bahwa harga karet, logam dasar, LNG dan minyak kelapa sawit akan relatif tetap di tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 (Gambar 25). Harga minyak mentah diperkirakan akan naik sebesar 28,5 persen pada 2017 dan 9,1 persen pada tahun 2018²⁰. Sebaliknya, harga batubara rata-rata sebesar USD 87,5 per metrik ton pada bulan Juli, namun diperkirakan akan mencapai USD 70/mt pada tahun 2017, dan turun lebih lanjut menjadi USD 60/mt pada tahun 2018. Karena Indonesia adalah eksportir bersih batubara dan pengimpor bersih minyak, perkiraan pergerakan harga batubara dan minyak mengakibatkan adanya penurunan nilai tukar perdagangan (ToT - *terms of trade*) negara²¹. Indeks Harga Komoditas Perdagangan Bersih (*Net Trade Commodity Price Index*)²² untuk

¹⁹ Sektor pertambangan saja menyumbang 23 persen dari total ekspor, sementara tambahan sebesar 22 persen berasal dari karet olahan, minyak kelapa sawit, logam dasar, LNG dan produk minyak.

²⁰ Harga rata-rata minyak mentah adalah USD 42,8 per barel (bbl) pada tahun 2016. Diperkirakan akan meningkat menjadi USD 55/bbl dan USD 60/bbl pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing

²¹ Nilai tukar perdagangan (TOT - Terms of Trade) mengacu pada harga impor dalam hal ekspor dan didefinisikan sebagai rasio harga ekspor terhadap harga impor. Hal tersebut dapat diartikan sebagai jumlah barang impor yang bisa dibeli oleh suatu negara per satuan barang ekspor

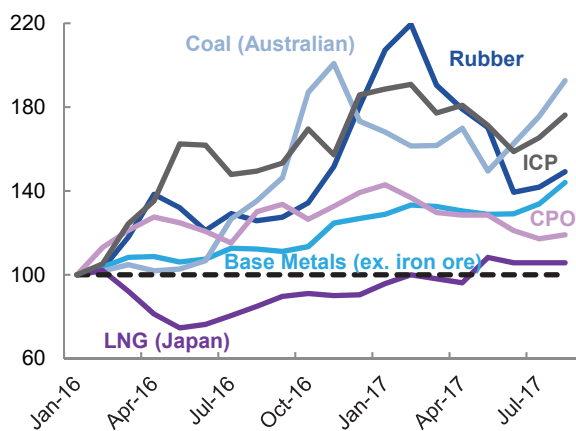
²² Indeks Harga Perdagangan Komoditas Bersih (NTI - Net Trade-Commodity Price Index)

didefinisikan sebagai: $NTI_t = \frac{Bobot_{i,p} \times Harga_{i,t}}{Harga_{i,t}}$ di mana $Bobot_{i,p} = \frac{(E_{i,t}) - (I_{i,t})}{\sum (E_{N,t}) - \sum I_{N,t}}$ dan i = jenis

komoditas; t = bulan; p = siklus periode (contoh rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T = tahun dasar; E = nilai ekspor; I = nilai impor

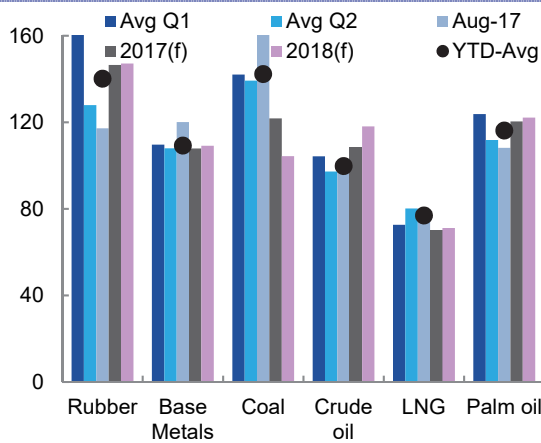
tahun 2017 diperkirakan akan sedikit lebih tinggi dari pada besaran indeks di tahun 2016. Indeks pada tahun 2018 diproyeksikan lebih rendah dari tingkat besaran indeks tahun 2016 (Gambar 26).

Gambar 24: Harga di tingkat global untuk enam komoditi ekspor utama di Triwulan ke-2, dengan sebagian besar harga komoditas relatif stabil dan sebagian lagi menurun
(indeks Januari 2016 = 100)



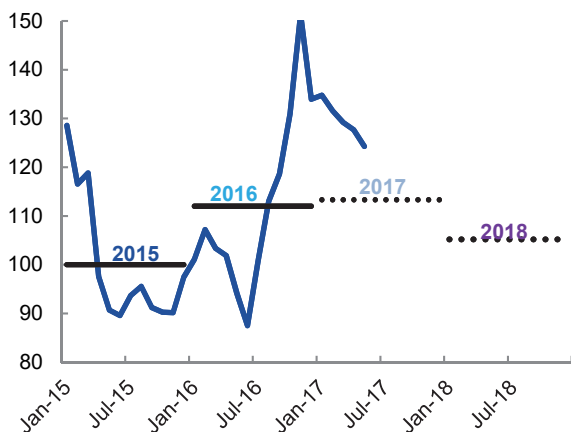
Sumber: Pink Sheet Bank Dunia; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: Gas Alam Cair (LNG - Liquefied Natural Gas)

Gambar 25: Harga minyak mentah diperkirakan akan naik dalam jangka menengah, sementara harga batubara diperkirakan akan turun
(indeks 2015=100)



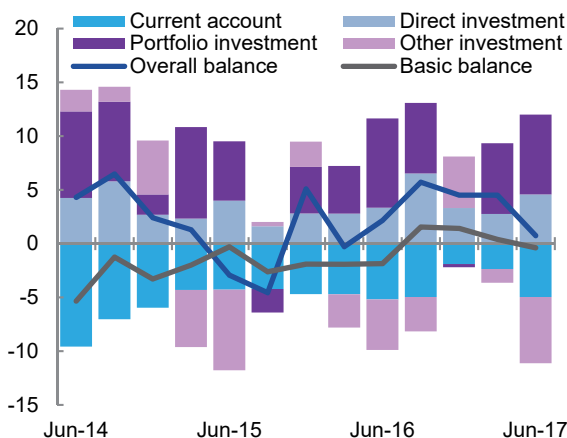
Sumber: Bank Dunia (2017); perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: f untuk perkiraan

Gambar 26: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih menunjukkan adanya kejutan nilai tukar perdagangan komoditas yang positif untuk Indonesia sejak Juli 2016
(indeks 2015=100)



Sumber: BPS; Bank Dunia; perhitungan staf Bank Dunia. Catatan: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih dibangun di atas enam komoditas ekspor utama di Indonesia (karet, logam dasar, batubara, minyak, gas, dan minyak kelapa sawit)

Gambar 27: Neraca Pembayaran (BOP) tetap surplus pada Triwulan ke-2 tahun 2017, meskipun terjadi peningkatan defisit transaksi berjalan sebanyak dua kali lipat
(USD milyar)



Sumber: CEIC dan BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Neraca Pembayaran membukukan surplus yang lebih kecil di Triwulan ke-2 tahun 2017, karena

Neraca Pembayaran (BOP) Indonesia membukukan surplus sebesar USD 0,7 miliar (0,3 persen dari PDB) pada Triwulan ke-2 tahun 2017, surplus untuk lima triwulan secara berturut-turut, namun turun dari USD 4,5 miliar (1,9 persen dari PDB) dan dari USD 2,2 miliar (0,9 persen dari PDB) yang tercatat pada masing-masing Triwulan ke-1 tahun 2017 dan Triwulan ke-2 tahun 2016 (Tabel 3). Hal yang

defisit transaksi berjalan meningkat dua kali lipat dan surplus neraca keuangan mengecil

mendasari surplus Neraca Pembayaran tersebut adalah defisit neraca transaksi berjalan yang lebih lebar, meningkat dua kali lipat menjadi 2,0 persen dari 1,0 persen dari PDB di Triwulan ke-1. Pada saat yang sama, surplus neraca keuangan menyusut menjadi 2,3 persen namun masih melampaui defisit transaksi berjalan (Gambar 27). Dengan demikian, cadangan devisa mencapai USD 123,1 miliar pada akhir Triwulan ke-2, naik USD 1,3 miliar dari akhir Triwulan ke-1, cukup untuk membiayai pembayaran hutang luar negeri pemerintah dan impor selama 8,6 bulan.

Kotak 2: Harga untuk sebagian besar komoditas utama Indonesia membaik dalam beberapa bulan terakhir

Setelah melemah dari puncak harganya pada bulan Desember tahun lalu, harga minyak mentah naik pada bulan Juli menyusul penurunan persediaan minyak mentah AS selama empat minggu berturut-turut dan pemanfaatan persediaan minyak secara besar-besaran. Harga juga didorong oleh komitmen baru dari anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk mengurangi pasokan minyak¹, kemungkinan AS akan menjatuhkan sanksi terhadap Venezuela dan pembicaraan oleh beberapa perusahaan minyak untuk mengurangi pengeluaran barang modal mereka². Harga LNG telah meningkat sebesar 5,7 persen sejak awal tahun, karena perkiraan cuaca musim panas yang lebih hangat dari biasanya di Asia. Harga LNG pada bulan Juli didorong positif oleh turunnya curah hujan yang menurunkan kapasitas pembangkit listrik tenaga air di Tiongkok dan lonjakan permintaan untuk alat pendingin, namun terimbangi oleh adanya persediaan gas yang tinggi di Korea Selatan, Taiwan dan Jepang, serta kelebihan produksi dari ladang gas tertentu di Indonesia.

Setelah merosot lebih dari 30 persen antara bulan Februari dan Juni, harga karet naik tipis pada bulan Juli dan Agustus. Tingkat kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh pergerakan harga minyak yang menguat³ dan kemungkinan pemerintah Thailand melakukan intervensi untuk meningkatkan harga karet dengan menyerap kelebihan pasokan karet produksi Thailand⁴.

Harga batu bara telah mendapatkan momentum lebih lanjut selama beberapa bulan terakhir dengan banyak faktor yang bermain. Produsen di Tiongkok telah memproduksi lebih sedikit karena kebijakan pemerintah yang membatasi produksi mereka. Setelah dilanda Badai Tropis Debbie pada bulan Maret, pasokan batubara dari Australia telah terganggu oleh mogok kerja dari para pekerja tambang. Di sisi permintaan, lonjakan permintaan listrik untuk alat pendingin selama bulan-bulan musim panas di Tiongkok, dan gangguan cuaca yang mengurangi kapasitas pembangkit listrik tenaga air telah cukup menaikkan kebutuhan untuk meningkatkan keluaran listrik dari pembangkit listrik tenaga batubara. Akibatnya, harga referensi batubara Indonesia telah ditetapkan pada level tertinggi selama tujuh bulan ini sebesar USD 83,97/mt, naik 44 persen *yoy* dan 6,4 persen lebih tinggi dari bulan Juni 2017.

Harga minyak kelapa sawit melanjutkan penurunannya pada bulan Juli, menyebabkan harga tersebut menjadi 18 persen lebih rendah dari puncaknya pada bulan Januari. Harga di bulan Juli terganggu oleh perkiraan kenaikan produksi di Malaysia dan Indonesia ketika para pekerja kembali dari hari raya Lebaran. Keluaran juga diharapkan meningkat secara bertahap, sejalan dengan pola musiman, dengan puncaknya yang biasanya terjadi pada bulan Oktober.

Harga logam dasar terus meningkat sejak awal tahun lalu, didukung oleh permintaan yang kuat, terutama dari sektor properti, infrastruktur, dan manufaktur Tiongkok. Sisi penawaran juga menjadi pendorong yang penting, terutama, karena pemogokan di antara para pekerja tambang di Chili, ketidakpastian peraturan seputar masalah nikel dan tembaga Asia Tenggara serta keputusan beberapa penambang untuk beroperasi di bawah kapasitas.

¹ Pada bulan November 2016, anggota OPEC sepakat untuk mengurangi produksi minyak gabungannya sebesar 1,2 juta bpd untuk menurunkan stok global dan menyeimbangkan pasar dengan pasokan lebih.

² <https://www.cnbc.com/2017/07/27/big-oil-reports-could-put-the-brakes-on-the-earnings-fueled-rally.html>

³ Karet sintesis, pengganti karet alam, adalah elastomer buatan yang terbuat dari bahan baku petrokimia. Oleh karena itu, harga karet pada umumnya mengikuti harga minyak dan harga bahan baku.

⁴ http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/17/e_136450651.htm

Tabel 3: Neraca Pembayaran Indonesia (BOP - *Balance of Payments*)

(USD milyar, kecuali dinyatakan lain)

	Q2-2016	Q3-2016	Q4-2016	Q1-2017	Q2-2017
Neraca Pembayaran Keseluruhan	2,2	5,7	4,5	4,5	0,7
<i>Sebagai persen PDB</i>	0,9	2,3	1,9	1,9	0,3
Neraca Transaksi Berjalan	(5,2)	(5,0)	(1,9)	(2,4)	(5,0)
<i>Sebagai persen PDB</i>	(2,2)	(2,0)	(0,8)	(1,0)	(2,0)
Neraca perdagangan barang	3,8	3,9	5,1	5,6	4,8
Neraca perdagangan jasa	(2,4)	(1,5)	(2,0)	(1,3)	(2,3)
Penerimaan	(7,8)	(8,4)	(6,2)	(7,8)	(8,5)
Neraca Modal dan Neraca Keuangan	6,8	9,78	7,6	7,9	5,9
<i>Sebagai persen PDB</i>	2,9	4,0	3,2	3,3	2,3
Investasi Langsung	3,3	6,6	3,3	2,8	4,6
Investasi Portofolio	8,3	6,5	(0,3)	6,6	7,4
Investasi Lainnya	(4,7)	(3,2)	4,8	(1,3)	(6,2)

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca transaksi berjalan melebar pada surplus perdagangan yang lebih rendah dan defisit penerimaan primer yang lebih besar

Defisit neraca transaksi berjalan melebar di Triwulan ke-2 tahun 2017, karena defisit yang lebih besar untuk perdagangan jasa dan pendapatan primer berkontribusi pada surplus perdagangan yang lebih sempit. Sejak tahun 2012, defisit neraca transaksi berjalan di Triwulan ke-2 sebagai bagian dari PDB di Indonesia selalu menjadi yang tertinggi di antara empat triwulan, terutama karena defisit musiman pada neraca penerimaan primer²³. Kondisi musiman ini sejalan dengan lonjakan pembayaran dividen yang terjadi pada akhir Triwulan ke-2 setiap tahunnya. Triwulan ke-2 tahun 2017 khususnya, mengalami peningkatan porsi dividen yang dibayarkan kepada investor asing, mengikuti arus masuk portofolio investasi bersih luar negeri yang besar selama paruh pertama tahun 2017. Selain itu, defisit neraca jasa pada periode pelaporan saat ini sebagian besar didorong oleh terjadinya lonjakan perjalanan luar negeri oleh masyarakat Indonesia selama masa liburan di akhir bulan Juni.

Perdagangan barang tetap surplus, namun mengecil bila dibandingkan dengan Triwulan ke-1

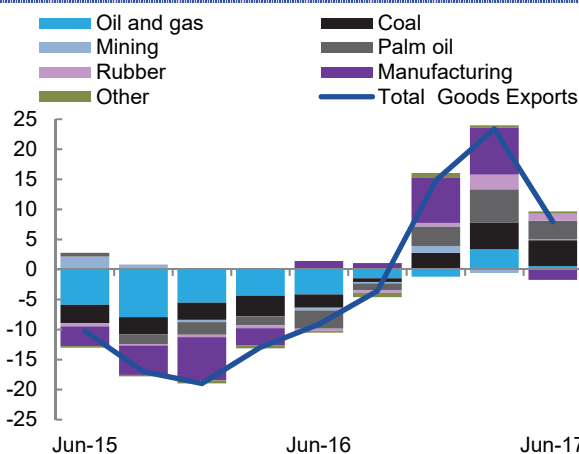
Sebagian disebabkan oleh berkurang hari kerja karena libur hari raya Idul Fitri yang relatif lebih lama, dan fakta bahwa Idul Fitri beralih ke Triwulan ke-2 tahun ini dari Triwulan ke-3 tahun lalu, ekspor barang tumbuh sebesar 7,9 persen *yoy*, jauh lebih lambat dari peningkatan sebesar 23,4 persen yang terjadi di Triwulan ke-1 (Gambar 28). Pertumbuhan impor barang juga melambat menjadi 5,6 persen (Triwulan ke-1: +15,5 persen) karena impor minyak dan gas bumi (migas) turun karena produksi migas dalam negeri yang lebih baik yang memberi lebih banyak pasokan untuk konsumsi dalam negeri (Gambar 29)²⁴. Secara keseluruhan, kenaikan impor bahan baku dan konsumsi barang untuk memenuhi permintaan untuk perayaan Idul Fitri tidak mencukupi untuk mengimbangi penurunan impor migas. Surplus perdagangan barang dengan demikian menyempit menjadi USD 4,8 miliar, turun dari USD 5,6 miliar pada Triwulan ke-1, namun masih lebih tinggi dari surplus USD 3,8 miliar yang tercatat pada Triwulan ke-2 tahun 2016.

²³ Satu-satunya pengecualian untuk hal ini adalah pada tahun 2015.

²⁴ Tingkat produksi minyak bumi pada Triwulan ke-1 tahun 2017 tercatat sebesar 0,79 juta barel per hari (mbpd) sedangkan pada Triwulan ke-2 tahun 2017 tercatat sebesar 0,82 mbpd.

Gambar 28: Pertumbuhan ekspor barang melambat oleh karena adanya liburan Idul Fitri, yang berlangsung relatif lama

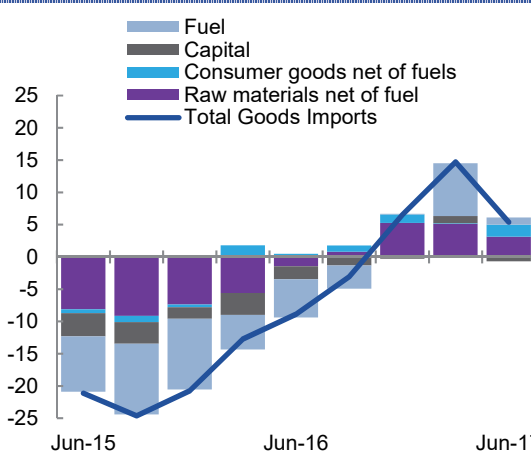
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 29: Pertumbuhan impor migas yang lambat menyebabkan penurunan impor barang secara keseluruhan

(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Ekspor non migas tumbuh sebesar 8,1 persen yoy, lebih lambat dari pertumbuhan yang tercatat di Triwulan ke-1 tahun 2017

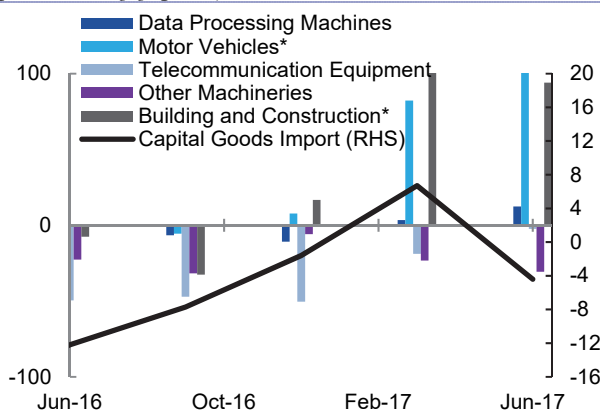
Nilai ekspor barang non migas tumbuh sebesar 8,1 persen yoy, jauh lebih lambat dari pertumbuhan sebesar 21,9 persen yang tercatat di Triwulan ke-1. Selain semakin sedikit hari kerja yang ada selama triwulan tersebut, pertumbuhan ekspor barang non migas yang lamban disebabkan oleh kontraksi ekspor manufaktur, berlawanan dengan kontribusi positif sektor ini terhadap pertumbuhan ekspor yang tercatat pada dua triwulan sebelumnya. Pada saat bersamaan, harga barang ekspor utama Indonesia, terutama produk primer seperti produk pertanian dan makanan, juga melemah. Secara khusus, penurunan harga CPO yang terus berlanjut telah mempengaruhi nilai pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Belanda²⁵.

Impor barang modal turun di Triwulan ke-2

Nilai impor barang non migas tumbuh sebesar 5,6 persen yoy, jauh lebih lambat dari pertumbuhan sebesar 15,5 persen di Triwulan ke-1. Impor pada Triwulan ke-2 didorong oleh peningkatan impor barang konsumsi (terutama buah dan sayuran segar, termasuk angkutan laut) baik secara nominal maupun riil, serta impor bahan baku (terutama untuk peralatan telekomunikasi, suku cadang kendaraan, dan

Gambar 30: Pertumbuhan impor barang modal turun meskipun terjadi lonjakan impor kendaraan bermotor dan bahan bangunan serta konstruksi

(pertumbuhan yoy, persen)



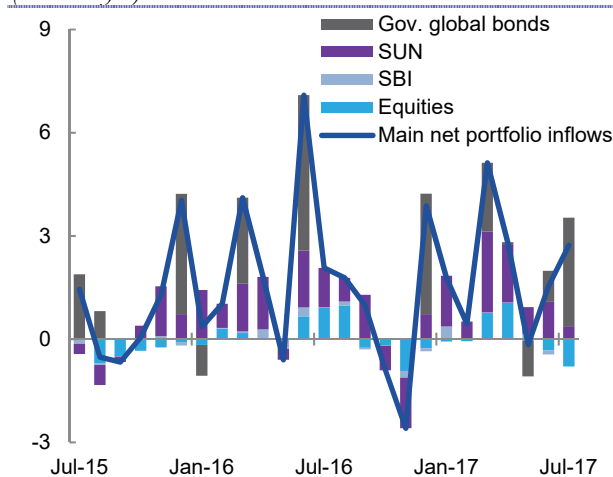
Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Sumbu Seb. Kiri terpotong pada angka 100. Pada Triwulan ke-1 tahun 2017 impor mesin bangunan gedung dan konstruksi tumbuh sebesar 128 persen. Pada Triwulan ke-2 tahun 2017, impor kendaraan bermotor meningkat sebesar 208 persen.

²⁵ Bank Indonesia (2017).

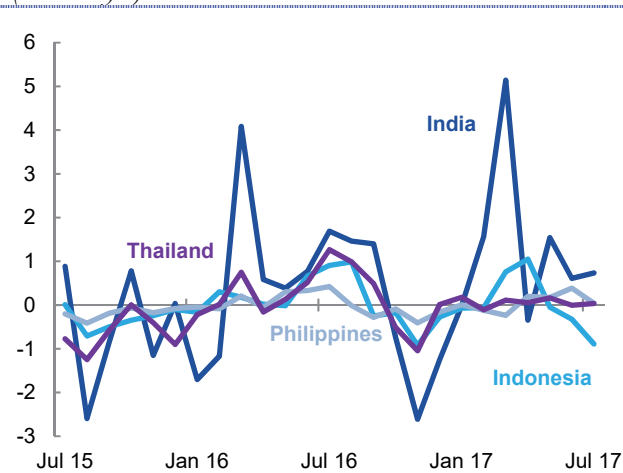
pakannya²⁶. Impor barang modal menyusut 4,4 persen, meskipun terjadi lonjakan impor barang modal untuk kendaraan bermotor dan bangunan gedung serta konstruksi (Gambar 30)²⁷.

Gambar 31: Total arus masuk portofolio meningkat seiring dengan lonjakan pembelian obligasi global pemerintah
(USD milyar)



Sumber: Database Institute of International Finance (IIF), perhitungan Staf Bank Dunia
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN)

Gambar 32: Aliran masuk ekuitas portofolio berubah negatif dan Indonesia kalah jika dibandingkan dengan negara-negara setara di kawasan
(USD milyar)



Sumber: Database Institute of International Finance (IIF), perhitungan Staf Bank Dunia

Surplus neraca keuangan mengecil oleh karena adanya arus keluar dari investasi lain

Surplus neraca keuangan mengecil pada Triwulan ke-2 menjadi 2,3 persen dari PDB, dari 3,3 persen pada Triwulan ke-1. Peningkatan peringkat utang negara (*sovereign credit rating*) oleh *Standard and Poor's* pada akhir Mei sebagian telah menyebabkan masuknya arus modal asing yang lebih tinggi dengan arus masuk investasi asing langsung (FDI) mencapai titik tertinggi sejak Triwulan ke-3 tahun 2016 dan yang kedua tertinggi sejak Triwulan ke-3 tahun 2014. Aliran portofolio juga mencatat arus masuk yang lebih tinggi di Triwulan ke-2 dibandingkan dengan Triwulan ke-1 terutama karena adanya pembelian bersih obligasi global pemerintah (Gambar 31). Kepemilikan asing atas obligasi pemerintah tetap stabil sekitar 40 persen. Arus investasi lain terlihat lebih banyak arus yang keluar dibandingkan dengan periode yang manapun sejak Triwulan ke-2 tahun 2015, sebagian disebabkan karena penumpukan simpanan valuta asing oleh bank dalam negeri selama periode perayaan Idul Fitri²⁸.

Pembelian bersih saham asing menjadi negatif karena investor asing terus menarik diri dari ekuitas Indonesia, dengan masuknya arus masuk bersih ke dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami kontraksi pada bulan Juli dalam

²⁶ Bank Indonesia (2017).

²⁷ Proses kepabeanan menjadi sangat lambat pada akhir Triwulan ke-2, sebagian karena pemerintah meningkatkan upayanya untuk memerangi impor ilegal dan pemogokan pekerja pelabuhan. Efeknya berdampak pada ekspor dan impor, namun demikian, kemungkinan besar hal ini terjadi hanya sekali saja dan tidak akan terulang (*one off*).

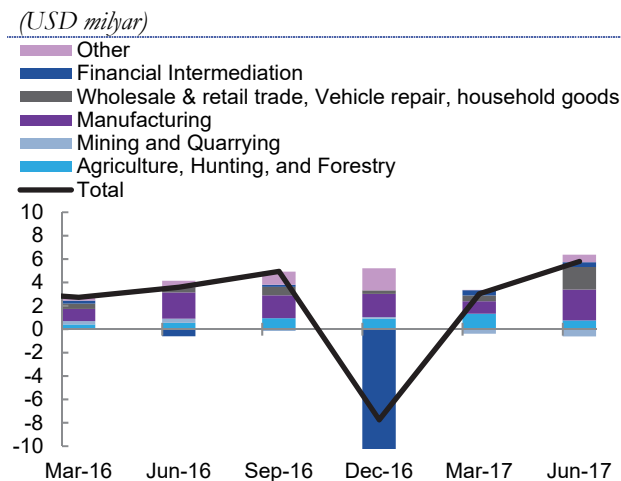
²⁸ Bank Indonesia (2017).

skala yang sama dengan yang terakhir terlihat pada akhir tahun 2016²⁹. Dalam hal ini, Indonesia kalah dari negara-negara setara di kawasan (Gambar 32).

Arus investasi asing langsung bersih meningkat di Triwulan ke-2

Investasi langsung asing (FDI) bersih melanjutkan momentum yang terlihat pada Triwulan ke-1 dan mencatat arus masuk bersih terbesar sejak Triwulan ke-3 tahun 2016. Arus masuk di sektor manufaktur terlihat positif dengan nilai yang terbesar, dengan arus masuk FDI sekitar USD 2,6 miliar, sekitar 57 persen dari total FDI di Triwulan ke-2 (Gambar 33). Penjualan grosir dan eceran kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan arus masuk di sektor barang pribadi dan barang rumah tangga juga meningkat. Sektor pertambangan mengalami arus keluar bersih untuk 2 triwulan secara berturut-turut.

Gambar 33: Arus masuk FDI bersih melonjak pada Triwulan ke-2 tahun 2017



Sumber: CEIC and BI; World Bank staff calculations

6. Perbaikan pengelolaan fiskal telah ditunjukkan pada tahun 2017, namun risiko yang signifikan masih tetap ada

Pengelolaan fiskal sudah lebih baik, namun risiko masih tetap ada

Pengelolaan kebijakan fiskal pada tahun 2017 telah meningkat terutama dibandingkan dengan tahun 2016, dengan peningkatan pemungutan penerimaan dan pengeluaran yang lebih berkualitas. Melanjutkan tren dari paruh pertama tahun ini, penerimaan terkait minyak dan gas bumi (migas) dan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi pendorong bagi total pemungutan penerimaan yang lebih tinggi di bulan Agustus. Di sisi pengeluaran, pelaksanaan anggaran sejauh ini terus membaik, meskipun dilakukan secara bertahap seperti pada tahun 2016. Sampai akhir Agustus, belanja modal dan belanja barang secara tahun-ke-tahun (*yoy*) meningkat, melanjutkan tren tahun lalu, belanja sosial mengalami kenaikan, dan belanja subsidi terus menurun. Yang juga penting adalah, sementara di tahun 2016 terdapat pemotongan anggaran, APBN-P tahun 2017 meningkatkan total belanja sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan APBN tahun 2017 yang awal³⁰. Pembiayaan pemerintah berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Pada bulan Juli 2017, Pemerintah telah menggalang dana sebesar Rp 484 triliun atau setara dengan 70,7 persen dari kebutuhan pembiayaan bruto (Rp 685 triliun).

²⁹ Pada umumnya arus masuk ekuitas portofolio merupakan bagian yang relatif kecil dari total arus masuk portofolio. Namun demikian, mengingat bahwa ekuitas portofolio tersebut dapat dengan mudahnya berubah, ekuitas portofolio tersebut dapat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi arus masuk portofolio secara total.

³⁰ Silakan lihat Kotak 4 untuk pembahasan rencana belanja dalam Rancangan APBN tahun 2018.

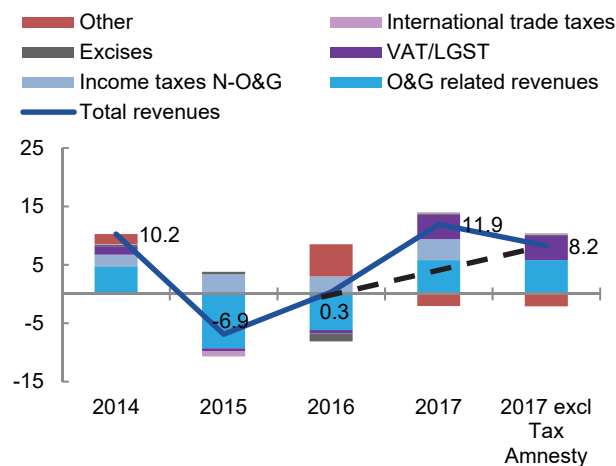
Penerimaan terkait minyak dan gas bumi seta PPN mendorong pemungutan penerimaan yang baik

Total penerimaan pada akhir Agustus 2017 tumbuh sebesar 11,9 persen *yoy* secara nominal, atau sebesar 8,2 persen jika penerimaan yang dipungut dari program amnesti pajak dikeluarkan (Gambar 34). Seperti pada triwulan-triwulan sebelumnya tahun ini, penerimaan pajak di luar program amnesti pajak didorong terutama oleh penerimaan pajak penghasilan migas dan oleh PPN, masing-masing tumbuh sebesar 62,8 persen dan 15,6 persen *yoy* (Gambar 34).

Pertumbuhan PPN yang baik ini sangat penting mengingat pertumbuhan konsumsi sektor swasta yang tidak berubah di paruh pertama tahun ini. Tingkat penerimaan yang lebih tinggi, yang difasilitasi oleh pemberlakuan e-faktur PPN sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi Pemerintah, tampaknya membuahkan hasil. Penerimaan dari cukai, yang turun pada tahun 2016, sekarang tumbuh sebesar 3,2 persen *yoy*, namun secara rata-rata masih jauh di bawah tahun 2015, 2014 atau 2013.

Gambar 34: Penerimaan terkait migas dan PPN mendorong pertumbuhan pemungutan penerimaan yang tinggi hingga saat ini

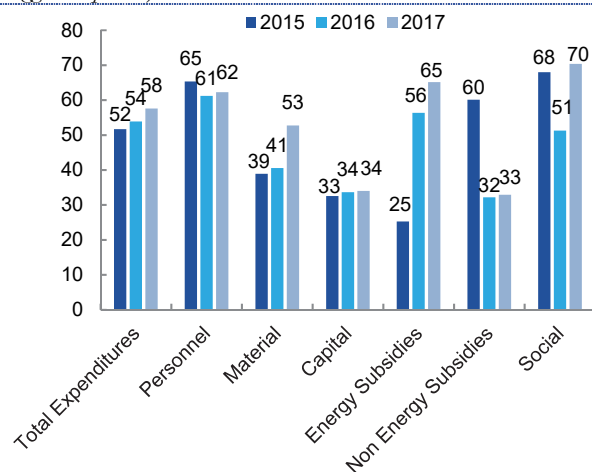
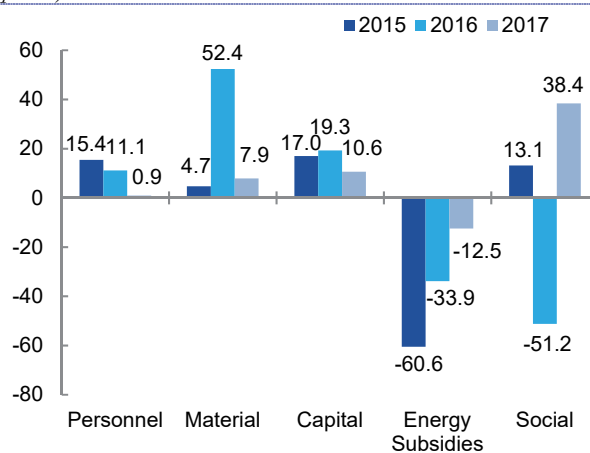
(pertumbuhan nominal realisasi penerimaan Januari-Agustus *yoy*, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Migas adalah singkatan dari minyak dan gas bumi, Non-migas adalah singkatan dari non- minyak dan gas bumi; PPNBm adalah singkatan dari pajak penjualan barang mewah; "Lainnya" meliputi: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan bukan pajak non-migas; penerimaan bukan pajak lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), dan penerimaan bukan pajak lainnya (PNBP) APBN-P adalah singkatan dari APBN Perubahan.

Realisasi pengeluaran mencerminkan peningkatan kualitas belanja, dengan belanja modal yang lebih tinggi, dan pulihnya belanja sosial

Belanja modal mendorong pertumbuhan belanja tahun ini dengan peningkatan sebesar 10,6 persen *yoy* pada realisasi bulan Januari-Agustus. Hal ini mencerminkan tekad Pemerintah untuk memperluas investasi di bidang infrastruktur dan meningkatkan kualitas alokasi belanja secara keseluruhan (Gambar 35). Total realisasi belanja pada akhir Agustus 2017 mencapai pertumbuhan sebesar 6,1 persen *yoy* secara nominal. Rasio tingkat pelaksanaan anggaran pemerintah terus meningkat secara bertahap seperti pada tahun 2016 (Gambar 36). Belanja sosial sampai bulan Agustus mengalami pemulihan, melonjak 38,4 persen *yoy*, setelah terjadi penurunan sebesar 51,2 persen di tahun 2016. Menurut besarnya, belanja sosial masih lebih rendah dari tingkat belanja selama tahun 2012-15. Penurunan yang signifikan di tahun 2017 terjadi pada belanja subsidi, dimana subsidi energi mengalami penurunan sebesar 12,6 persen selama periode yang sama. Kontraksi ini terutama disebabkan oleh reformasi subsidi energi Pemerintah dan kenaikan tarif listrik yang terkait.

Gambar 35: Tingkat pelaksanaan anggaran menunjukkan peningkatan secara bertahap dari tahun 2015*(realisasi pengeluaran Januari-Agustus sebagai bagian dari target anggaran, persen)***Gambar 36: Pergeseran dalam belanja terus berlanjut dari belanja pegawai dan subsidi ke belanja barang, modal dan sosial***(realisasi pertumbuhan nominal pengeluaran Januari-Agustus yoy, persen)*

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Gambar 35 mengilustrasikan belanja sebagai bagian dari target dalam APBN dalam persen sementara Gambar 36 menunjukkan pertumbuhan realisasi pengeluaran nominal yoy. APBN tahun 2017 memiliki target belanja modal 9,4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016, oleh karena itu peningkatan realisasi belanja modal dari Gambar 36 tidak tertangkap sebagai peningkatan porsi belanja modal dalam pelaksanaan anggaran yang sama besarnya pada Gambar 35.

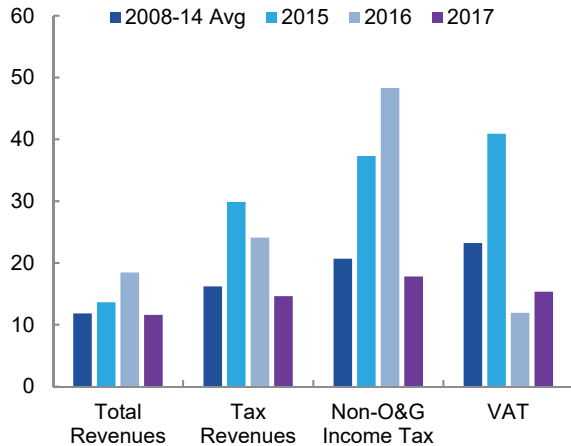
Target penerimaan pada APBNP 2017 sedikit turun, namun masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi

APBN-P 2017 disetujui oleh DPR pada tanggal 26 Juli 2017. Di dalamnya, nominal target penerimaan ditetapkan sedikit turun di level Rp 1.736 triliun, 0,8 persen lebih rendah dari target penerimaan semula sebesar Rp 1.750 triliun pada APBN 2017. Meskipun demikian, target baru tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 11,6 persen terhadap realisasi actual tahun 2016, sejalan dengan tujuan Pemerintah untuk meningkatkan rasio penerimaan terhadap PDB. Selain itu, fitur utama dari APBN-P tersebut adalah target penerimaan yang realistis jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN-P sebelumnya (Gambar 37). Dengan demikian, tingkat pertumbuhan yang dibutuhkan untuk memenuhi target penerimaan tahun 2017 dari realisasi actual tahun 2016 lebih rendah daripada pertumbuhan yang dianggarkan di dalam APBN-P tahun 2016 dari realisasi actual tahun 2015.

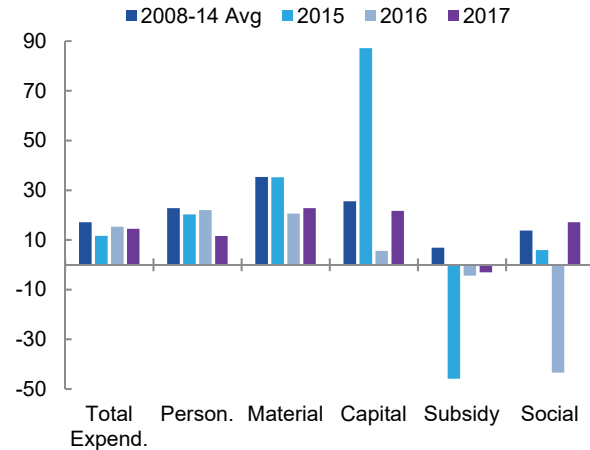
Target pengeluaran meningkat, didorong oleh belanja barang, belanja subsidi dan belanja sosial yang lebih tinggi

Di sisi pengeluaran, APBN-P tahun 2017 menetapkan target belanja total sebesar Rp 2.133 triliun, meningkat 2,5 persen dibandingkan dengan target APBN tahun 2017 sebesar Rp 2.081 triliun (Gambar 38). Terhadap APBN tahun 2017, Revisi Anggaran tersebut meningkatkan alokasi belanja barang (18,2 persen), belanja subsidi (5,5 persen) dan belanja sosial (4,2 persen), serta mengurangi alokasi belanja modal (6,6 persen). Meskipun perubahan-perubahan tersebut telah dilakukan, alokasi dalam APBN-P masih merupakan suatu peningkatan kualitas belanja dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 38 terhadap realisasi actual tahun 2016, alokasi belanja modal, misalnya, mewakili kenaikan sebesar 21,7 persen, alokasi belanja sosial meningkat sebesar 17,1 persen, dan belanja subsidi menurun sebesar 3,1 persen.

Gambar 37: Target penerimaan yang ditetapkan pada APBN-P tahun 2017 lebih realistis dibandingkan dengan yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya
(APBN-P sebagai rasio dari realisasi aktual di tahun sebelumnya, persen)



Gambar 38: Alokasi pengeluaran pada APBN-P tahun 2017 mencerminkan kualitas pengeluaran yang lebih tinggi
(APBN-P sebagai rasio dari realisasi aktual di tahun sebelumnya, persen)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

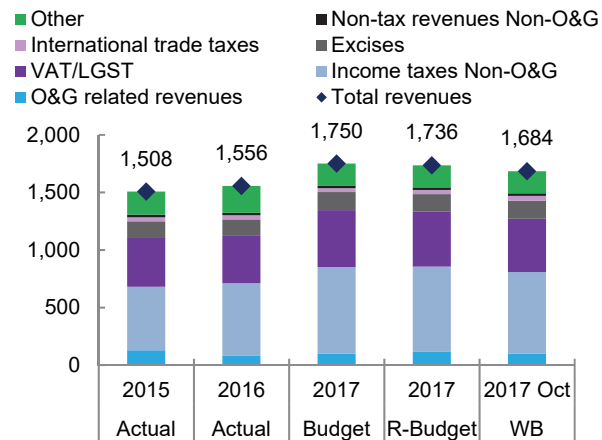
Catatan: Pada Gambar 37, Total penerimaan mencakup penerimaan pajak (ditunjukkan dalam gambar) dan penerimaan bukan pajak (tidak ditunjukkan). Penerimaan Pajak mencakup komponen pajak lainnya (termasuk cukai dan pajak internasional) yang tidak ditunjukkan dalam gambar. Pada Gambar 38, Total pengeluaran mencakup alokasi pengeluaran lainnya yang tidak ditunjukkan dalam gambar, termasuk transfer ke pemerintah daerah dan pembayaran bunga.

Proyeksi defisit fiskal Bank Dunia meningkat menjadi 2,7 persen dari PDB pada tahun 2017

Total penerimaan diproyeksikan mencapai Rp 1.684 triliun pada tahun 2017 (Gambar 39), kenaikan penerimaan nominal sebesar 8,2 persen *yoj*, yang sebagian mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan penerimaan diperkirakan berbasis luas, dengan proyeksi peningkatan pemungutan penerimaan di seluruh penerimaan pajak dan bukan pajak. Dengan target APBN-P sebesar Rp 1.736 triliun, proyeksi ini menyiratkan adanya penurunan sebesar Rp 52,1 triliun atau 3,1 persen dari total penerimaan.

Total belanja diproyeksikan mencapai Rp 2.052 triliun pada tahun 2017, suatu kenaikan nominal sebesar 10,1 persen

Gambar 39: Bank Dunia memproyeksikan pemungutan penerimaan turun sedikit dari target APBN 2017
(IDR triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Migas adalah singkatan dari minyak dan gas bumi, Non-migas adalah singkatan dari non- minyak dan gas bumi; PPNBm adalah singkatan dari pajak penjualan barang mewah; "Lainnya" meliputi: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan bukan pajak non-migas; penerimaan bukan pajak lainnya (keuntungan perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum (BLU), dan penerimaan bukan pajak lainnya (PNBP) APBN-P adalah singkatan dari APBN Perubahan.

tahun-ke-tahun. Dengan demikian, defisit fiskal diproyeksikan sedikit melebar, mencapai 2,7 persen dari PDB, namun lebih rendah dari perkiraan APBN-P tahun 2017 sebesar 2,9 persen dari PDB (Tabel 4). Proyeksi defisit Bank Dunia yang lebih rendah ini didorong oleh tingkat pencairan anggaran sebesar 96,2 persen dibandingkan dengan asumsi APBN-P yang sebesar 100 persen.

Resiko terhadap penerimaan dan pengeluaran berasal dari perlambatan dalam reformasi pajak, resiko harga komoditas yang lebih lemah, dan tren ekonomi makro yang lebih luas

Resiko terhadap penerimaan dan pengeluaran dari perlambatan dalam administrasi perpajakan dan reformasi kebijakan serta dari paparan harga minyak tetap penting, dan menjadi sangat signifikan pada jangka menengah³¹. Sumber risiko lainnya adalah terkait dengan ekonomi makro yang lebih luas. Perlambatan dalam pertumbuhan konsumsi sektor swasta, dan/atau perlambatan hasil manufaktur akan merugikan pemungutan penerimaan, dengan PPN yang menjadi pendorong utama penerimaan pajak Indonesia, dan sektor manufaktur yang menjadi penyumbang utama terhadap pemungutan pajak penghasilan perusahaan³². Diperlukan adanya reformasi pajak secara struktural yang memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak untuk mengurangi risiko tersebut. Reformasi akan memungkinkan Pemerintah untuk mengembangkan pagu anggaran pengeluarannya sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja prioritas termasuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, tanpa melanggar peraturan defisit fiskal sebesar 3 persen.

³¹ Lihat Bank Dunia (2017b).

³² Sebagaimana dibahas di Bagian 2, ada tanda-tanda yang mengindikasikan bahwa konsumsi sektor swasta bisa melemah. Pada saat yang sama, pertumbuhan sektor manufaktur melambat di Triwulan ke-2, relatif terhadap Triwulan ke-1, dan dapat terus melambat oleh karena adanya sentimen yang lemah di sektor bisnis manufaktur.

Tabel 4: Bank Dunia memproyeksikan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rendah dibandingkan dengan APBN tahun 2017

(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018
	LKPP	LKPP	APBN	APBNP	Outlook Kemenkeu	Bank Dunia	RAPBN
A. Penerimaan	1.508	1.556	1.750	1.736	1.736	1.684	1.878
(% dari PDB)	13,1	12,5	12,5	12,8	12,8	12,4	12,6
1. Penerimaan pajak	1.240	1.285	1.499	1.473	1.473	1.432	1.609
(% dari PDB)	10,7	10,4	10,9	10,8	10,8	10,6	10,8
Pajak penghasilan	602	666	788	784	784	745	853
Migas	50	36	36	42	42	36	35
Non-Migas	553	630	752	742	742	709	817
PPN/PPNBm	424	412	494	475	475	462	535
Pajak Bumi dan Bangunan	29	19	17	15	15	17	17
Cukai	145	144	157	153	153	157	155
Pajak perdagangan internasional	35	35	34	36	36	41	39
Bea masuk	31	32	34	33	33	38	36
Pajak ekspor	4	3	0	3	3	3	3
Pajak lainnya	6	8	9	9	9	9	10
2. Penerimaan negara bukan pajak	256	262	250	260	260	249	268
(% dari PDB)	2,2	2,1	1,8	1,9	1,9	1,8	1,8
Penerimaan dari sumber daya alam	101	65	87	96	96	87	99
Migas	78	44	64	72	72	64	77
Non-Migas	23	21	23	23	23	23	22
Penerimaan negara bukan pajak lainnya	155	197	163	165	165	162	169
3. Hibah	12	9	1	3	3	3	1
B. Pengeluaran	1.806	1.860	2.080	2.133	2.099	2.052	2.204
(% dari PDB)	15,6	15	15,2	15,7	15,4	15,1	14,8
1. Pemerintah pusat	1.183	1.149	1.316	1.367	1.343	1.302	1.443
(% dari PDB)	10,3	9,3	9,6	10,0	9,9	9,6	9,7
Belanja pegawai	281	305	345	340	331	328	369
Barang	233	260	270	319	302	301	281
Modal	215	169	221	206	203	204	231
Pembayaran bunga pinjaman	156	183	221	219	219	220	248
Subsidi	186	174	160	169	169	165	172
Energi	119	107	77	90	90	93	103
BBM	61	44	32	44	44	30	51
Listrik	58	63	45	45	45	64	52
Non-energi	67	67	83	79	79	71	69
Hibah	4	7	2	6	6	8	1
Sosial	97	50	56	58	58	54	76
Lainnya	10	6	41	50	56	22	64
2. Transfer ke daerah	623	710	710	766	756	751	761
(% dari PDB)	5,4	5,7	5,5	5,6	5,6	5,5	5,1
Saldo Keseluruhan	-298	-308	-308	-397	-363	-368	-326
(% dari PDB)	-2.6	-2.5	-2.4	-2.9	-2.7	-2.7	-2.2
<i>Asumsi</i>							
Tingkat pertumbuhan riil PDB (%)	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,4
IHK (%)	6,4	3,5	4,0	4,3	4,3	4,3	3,5
Nilai tukar (Rp/USD)	13.389	13.300	13.300	13.400	13.400	13.359	13.500
Harga minyak mentah (USD/barrel)	36	51	45	48	48	55	48

Sumber: Kementerian Keuangan

Kotak 3: Analisis target penerimaan pada APBN 2018

Pada tanggal 16 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo menyampaikan rancangan APBN tahun 2018 kepada DPR. Asumsi ekonomi makro utamanya adalah tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi, sebesar 5,4 persen (dibandingkan dengan 5,2 persen pada APBN-P 2017) dan inflasi sebesar 3,5 persen (dibandingkan dengan 4,3 persen untuk tahun 2017). Harga minyak mentah ditetapkan sebesar USD 48 per barel, tidak berubah dari APBN-P 2017, namun diasumsikan produksi minyak dan gas bumi lebih rendah.

Target penerimaan relatif konservatif

Rancangan APBN tahun 2018 menetapkan target penerimaan nominal yang relatif konservatif, suatu perubahan penting dari tahun-tahun sebelumnya. Total penerimaan dan penerimaan pajak diproyeksikan masing-masing meningkat sebesar 11,2 persen dan 11,7 persen, dibandingkan dengan target APBN-P 2017 yang tidak termasuk penerimaan dari program Amnesti Pajak. Sebaliknya, total penerimaan nominal dan penerimaan pajak pada tahun 2017 ditetapkan masing-masing tumbuh 13,7 persen dan 18,5 persen *yoj*, meskipun ini berasal dari basis yang lebih rendah.¹ Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Non-migas diperkirakan akan mendorong pemungutan pajak tahun 2018, dengan proyeksi dari kedua pajak tersebut masing-masing bertumbuh sebesar 15,0 persen dan 12,6 persen (Gambar 40).

Pelaksanaan reformasi perpajakan dapat berdampak positif

Tahun 2018 ditetapkan sebagai tahun yang kritis bagi reformasi penerimaan pajak dengan Pemerintah yang menetapkan agenda reformasi pajak yang ambisius. Reformasi penerimaan yang saat ini sedang dibahas mencakup beberapa undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemungutan pajak dan memperluas basis pajak, sehingga menghasilkan rasio pajak terhadap PDB yang meningkat². Reformasi ini dikoordinasikan oleh Tim Reformasi di bawah Kementerian Keuangan. Usulannya meliputi:

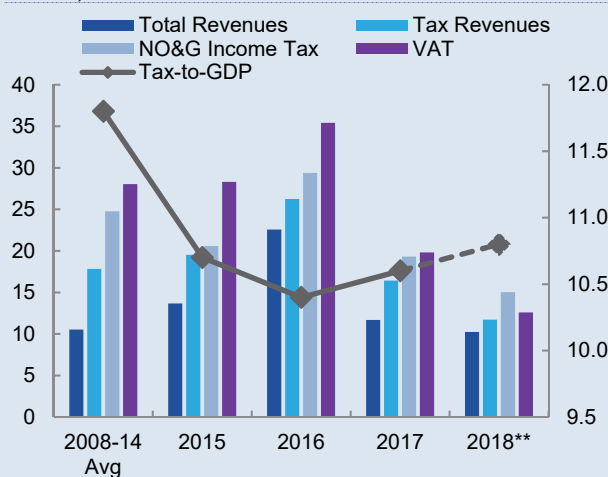
- Reformasi administrasi perpajakan yang memberikan peningkatan otonomi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memfasilitasi reformasi organisasi dan SDM DJP, dan melakukan investasi yang signifikan dalam sistem TI DJP
- Reformasi PPN yang merasionalisasi pengecualian, dan menetapkan ambang pendaftaran PPN yang baru yang mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi Indonesia dan yang sebanding dengan negara-negara lain di kawasan.
- Reformasi pajak penghasilan, termasuk untuk memperkuat upaya mengatasi penyusutan basis dan pengalihan keuntungan, dan untuk merestrukturisasi sistem perpajakan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- Reformasi cukai, termasuk cukai baru yang diusulkan untuk minuman yang mempergunakan bahan pemanis

Tingkat keberhasilan Pemerintah dalam mengesahkan undang-undang tersebut melalui DPR dan menerapkannya secara efektif akan membentuk upaya Indonesia untuk melakukan lebih banyak lagi pemungutan penerimaan dalam jangka menengah. Selain itu, pelaksanaan reformasi dengan cara-cara yang cepat (*quick win reforms*) juga dapat menghasilkan keuntungan pada 2018 itu sendiri, dengan dampak yang positif untuk target APBN tahun 2018.

¹ Pertumbuhan tahun 2017 *yoj* dihitung dengan tidak memasukkan penerimaan dari program Amnesti Pajak. Tahun 2016 merupakan tahun yang sangat buruk bagi pemungutan penerimaan, dengan jumlah penerimaan pajak yang menurun jumlah nominalnya, tidak termasuk penerimaan dari program Amnesti Pajak. Meskipun demikian, efek dasarnya tidak cukup untuk menjelaskan target penerimaan yang konservatif pada tahun 2018. Bukti tambahan dapat ditemukan saat menganalisis Rancangan APBN tahun 2017. Hal ini mengasumsikan pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 16,4 persen terhadap realisasi di tahun 2016 meskipun memperkirakan pertumbuhan PDB yang lebih rendah sebesar 5,2 persen, menurunkan harga minyak mentah menjadi sebesar 45 USD/ribu barel, dan target produksi minyak dan gas bumi yang lebih rendah.

² Indonesia termasuk di antara negara-negara di kawasan yang memiliki rasio pajak terhadap PDB yang terendah. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat Bank Dunia (2017a), hal. 25

Gambar 40: Rasio pajak terhadap PDB meningkat lagi setelah beberapa tahun mengalami penurunan
(target rancangan APBN sebagai rasio realisasi anggaran dari tahun sebelumnya, Seb. Kiri; rasio pajak terhadap PDB, Seb. Kanan)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Untuk perbandingan Rancangan APBN tahun 2018, kami menggunakan APBN-P tahun 2017 yang pemungutan penerimaan lebih sedikit pada tahap ketiga dari program Amnesti Pajak karena realisasi di Akhir Tahun belum tercapai dan penerimaan yang dipungut dari program Amnesti Pajak diperlakukan sebagai kejutan positif yang terjadi hanya sekali saja dan tidak akan terulang kembali (one-off).

Kotak 4: Analisis rencana pengeluaran dalam APBN tahun 2018

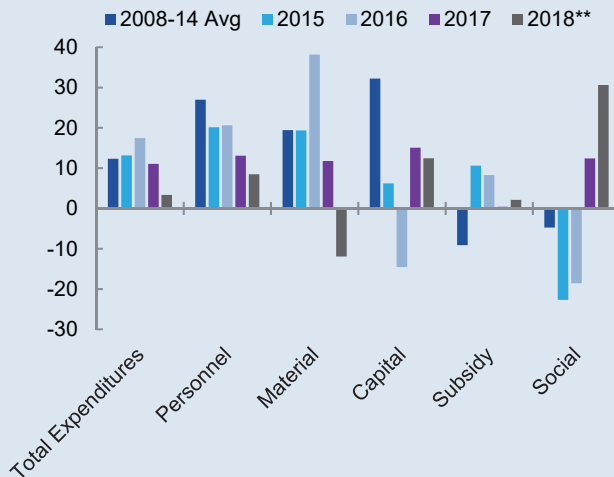
Rencana pengeluaran dalam Rancangan APBN tahun 2018 telah memancing munculnya banyak kepentingan umum. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, total target belanja nilainya rendah, namun membandingkan komposisi APBN dengan komposisi tahun lalu mencerminkan masih adanya prioritas yang berlanjut untuk belanja modal dan juga belanja sosial. Belanja barang akan menurun, sementara belanja subsidi meningkat.

Target belanja yang tidak terlalu tinggi dan defisit yang rendah

Total nominal belanja dalam Rancangan APBN direncanakan meningkat minimal 3,3 persen dibandingkan target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017. Sebaliknya, Rancangan APBN tahun 2017 memperkirakan total pertumbuhan belanja sebesar 11,1 persen terhadap realisasi anggaran tahun 2016 (Gambar 41). Pertumbuhan belanja yang relatif rendah memungkinkan Pemerintah untuk menurunkan defisit fiskal, yang diperkirakan sebesar 2,2 persen dari PDB dibandingkan dengan 2,7 persen untuk tahun 2017 (proyeksi Perkiraan Kementerian Keuangan, lihat Tabel 4).

Gambar 41: Rancangan APBN tahun 2018 memprioritaskan belanja modal dan sosial, dan memotong belanja barang. Subsidi energi meningkat

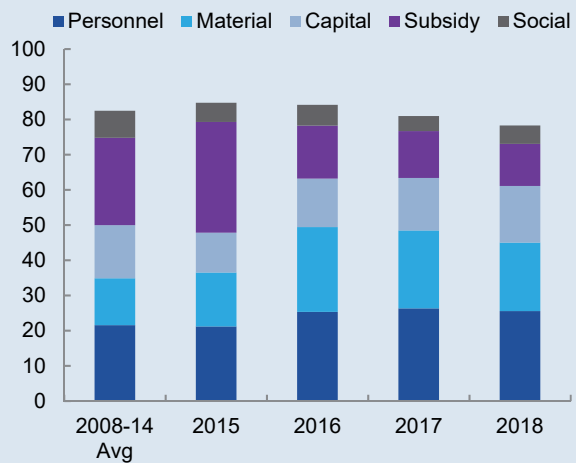
(rancangan APBN sebagai rasio dari realisasi tahun sebelumnya)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Perbandingan Rancangan APBN tahun 2018 menggunakan target pengeluaran APBN-P tahun 2017 oleh karena realisasi akhir tahun belum tercapai.

Gambar 42: Sementara nominal belanja subsidi direncanakan meningkat pada tahun 2017, porsi belanja subsidi ini lebih kecil daripada belanja Pemerintah Pusat tahun 2017

(komponen belanja sebagai bagian dari belanja Pemerintah Pusat)



Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Kategori lain dari pengeluaran pemerintah pusat yang tidak dipaparkan di sini termasuk pembayaran bunga pinjaman dan hibah.

Tingkat investasi infrastruktur yang lebih tinggi dipertahankan, namun subsidi berangsur-angsur naik

Rancangan APBN tahun 2018 mencerminkan berlanjutnya komitmen Pemerintah untuk berinvestasi di bidang infrastruktur, dengan nominal belanja modal yang mengalami peningkatan sebesar 12,4 persen dibandingkan dengan APBN-P 2017. Berawal dari basis yang tinggi, target belanja modal ini mewakili lebih dari sepertiga dari kontribusi terhadap total pertumbuhan belanja. Belanja sosial juga memberikan kontribusi yang tinggi, tumbuh sebesar 30,6 persen dibandingkan dengan APBN-P tahun 2017 (merupakan seperempat dari kontribusi terhadap total pertumbuhan belanja). Namun demikian, belanja barang menurun sebesar 11,9 persen. Bergantung pada sub-komponen belanja barang mana yang akan dipotong, penurunan ini dapat diartikan sebagai perbaikan lebih lanjut dalam kualitas alokasi pengeluaran secara keseluruhan.

Namun demikian, ada kejutan dengan kenaikan nominal subsidi energi, yang membalikkan kebijakan pemotongan tahun-ke-tahun sejak tahun 2015. Angka tersebut mengindikasikan penghentian kebijakan Pemerintah untuk menaikkan tarif listrik. Namun demikian, pengeluaran yang lebih tinggi untuk subsidi energi harus diimbangi oleh kenyataan bahwa subsidi tersebut lebih rendah dari tahun 2010-16 dalam besaran nominalnya (Gambar 42).

7. Pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja

Perekonomian Indonesia menciptakan hampir 4 juta lapangan kerja tahun ini sampai dengan bulan Februari 2017

Jumlah individu yang dipekerjakan tumbuh sebesar 3,2 persen (4 juta jiwa secara absolut) pada tahun ini hingga bulan Februari 2017, mencapai 124,5 juta pekerja.³³ Laju pertumbuhan lapangan kerja melampaui laju pertumbuhan angkatan kerja secara luas – yang tumbuh sebesar 3,0 persen, menjadi 131,5 juta jiwa – dan pertumbuhan penduduk usia kerja – yang tumbuh sebesar 1,6 persen menjadi 190,6 juta jiwa (Gambar 43).³⁴ Hal ini membuat tingkat lapangan kerja berada di 65,3 persen, naik dari 64,3 persen pada bulan Februari 2016.³⁵ Selain itu, selama periode yang sama, pengangguran secara luas³⁶ turun dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen, angka yang terendah sejak pertama kali tercatat pada tahun 2000, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja semakin menegang.

Perbedaan gender yang besar dalam partisipasi angkatan kerja dan tingkat lapangan kerja masih tetap ada

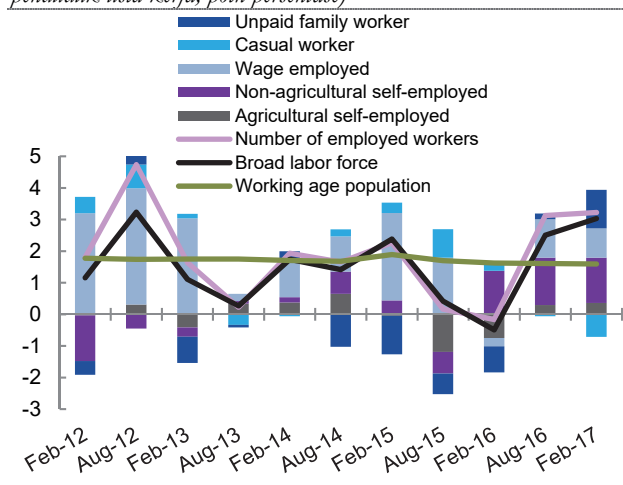
Tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR - *labor force participation rate*) sebesar 69,0 persen pada Februari 2017, namun LFPR secara luas untuk perempuan dan laki-laki masing-masing adalah sebesar 55,0 persen dan 83,0 persen. Kesenjangan gender tersebut sedikit menyempit dari bulan Februari 2016 ketika LFPR luas untuk perempuan adalah sebesar 52,7 persen dan LFPR luas untuk laki-laki adalah sebesar 83,5 persen. Meskipun ada sedikit kesenjangan gender dalam LFPR, tingkat kesenjangan ketenagakerjaan perempuan dan laki-laki masih sangat berbeda pada bulan Februari 2017, masing-masing sebesar 52,1 persen dan 78,6 persen.

Pekerja mandiri non-pertanian dan

Kerja dengan upah masih tetap merupakan komponen ketenagakerjaan terbesar, yang terdiri dari 38,1 persen dari semua jenis pekerjaan pada bulan Februari 2017,

Gambar 43: Pertumbuhan lapangan kerja melampaui pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja, didorong oleh meningkatnya upah kerja, jumlah para pekerja mandiri di sektor non-pertanian, dan pekerjaan di lingkungan keluarga yang tidak dibayar

(*pertumbuhan lapangan kerja, angkatan kerja, dan jumlah penduduk usia kerja, poin persentase*)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

³³ Menurut data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS).

³⁴ Sesuai dengan konvensi BPS, 'usia kerja' didefinisikan sebagai orang yang berusia 15 tahun atau lebih.

³⁵ Tingkat lapangan kerja adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja.

³⁶ Berdasarkan 'inti', pengangguran adalah individu-individu yang tidak bekerja, tetapi yang secara aktif mencari pekerjaan. Definisi dari 'luas' mencakup pengangguran inti, serta para pengangguran tidak kentara (*discouraged workers*), mereka yang membangun bisnis baru, dan mereka yang memiliki pekerjaan tetapi masih di masa depan. Data mengenai pengangguran secara luas hanya tersedia sejak tahun 2000, namun tingkat pengangguran inti dapat dihitung sampai sejauh tahun 1986. Sementara pengangguran luas saat ini berada pada tingkat pertumbuhan yang terendah, tingkat pengangguran inti ini – yang sebesar 3,3 persen pada Februari 2017 – sebenarnya lebih rendah pada akhir tahun 1980an dan awal 1990an, sebesar 2,6 persen pada tahun 1991.

pekerja di lingkungan keluarga yang tidak membayar memberi kontribusi lebih pada pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan upah kerja

tumbuh sebesar 2,4 persen dari tahun sebelumnya. Namun demikian, pada periode yang sama, para pekerja mandiri di sektor non-pertanian tumbuh sebesar 6,5 persen, dengan proporsi yang meningkat dari 22,1 persen menjadi 22,8 persen. Dengan demikian, para pekerja mandiri di sektor non-pertanian memberi kontribusi yang lebih pada pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan kerja dengan upah. Selain itu, jumlah pekerja di lingkungan keluarga yang tidak membayar tumbuh sebesar 8,8 persen, dan proporsi dari pekerja tersebut mencapai 14,6 persen, tingkat yang tertinggi sejak bulan Februari 2015. Penciptaan lapangan kerja mulai bergeser dari kerja dengan upah, mengubah tren yang ada antara tahun 2010 dan 2015.

Transisi struktural angkatan kerja dari pertanian ke jasa melambat

Maraknya sektor jasa sebagai penyedia pekerjaan bagi angkatan kerja Indonesia terus berlanjut hingga awal tahun 2017, meski dengan laju yang lebih lambat (Gambar 44). Pada bulan Februari 2017, 47,6 persen pekerja dipekerjakan di sektor jasa, sementara 31,8 persen berada di sektor pertanian.^{37,38} Ini mencerminkan kenyataan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini angkatan kerja telah beralih ke sektor jasa, terutama dengan beralihnya angkatan kerja dari sektor pertanian. Antara Februari 2007 dan Februari 2017, proporsi pekerja di sektor jasa naik rata-rata 0,9 poin persentase per tahun, sementara proporsi pekerja di sektor pertanian turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Namun, pada tahun ini hingga Februari 2017, proporsi pekerja di bidang jasa tumbuh hanya 0,4 poin persentase sementara proporsi pekerja di sektor pertanian meningkat sedikit, sebesar 0,1 poin persentase.

Data terakhir memberikan bukti lebih lanjut mengenai kenaikan tajam dalam pertumbuhan upah riil

Pendapatan rata-rata untuk pekerja upahan melonjak sebesar 19,5 persen secara riil dan 23,9 persen secara nominal di tahun ini hingga bulan Februari 2017³⁹, lebih jauh lagi menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mengetat (Gambar 45). Pendapatan rata-rata untuk pekerja upahan juga meningkat sebesar 8,2 persen dan 14,3 persen masing-masing dalam nilai nominal dan riil.⁴⁰ Perbedaan antara pertumbuhan sebagai *mean* (nilai rata-rata) dan *median* (data yang tepat berada di tengah-tengah data lainnya) tersebut mencerminkan fakta bahwa pertumbuhan upah selama periode ini tidak berpihak pada masyarakat miskin, karena kelompok pendapatan yang lebih tinggi menikmati pertumbuhan upah yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok pendapatan yang lebih rendah. Hasil terakhir ini konsisten dengan pertumbuhan upah yang mengejutkan yang tercatat di tahun tersebut sampai dengan bulan Agustus 2016, ketika pendapatan rata-rata untuk pekerja upahan tumbuh

³⁷ Ini berarti bahwa pada bulan Februari 2017, 59,3 juta pekerja bekerja dalam pekerjaan di sektor jasa dan 39,7 juta pekerja dipekerjakan di sektor pertanian.

³⁸ 'Pertanian' mencakup pekerja yang bergerak di sektor pertanian, perburuan, kehutanan, dan perikanan. 'Industri' mencakup pekerja yang bekerja di sektor (1) pertambangan dan galian; (2) manufaktur; (3) listrik, gas, dan air bersih; dan (4) konstruksi. 'Jasa' mencakup pekerja yang bekerja di sektor (1) perdagangan grosir dan eceran, serta hotel dan restoran; (2) transportasi, penyimpanan barang, dan komunikasi; (3) pembiayaan, asuransi, real estat, dan layanan bisnis; dan (4) layanan masyarakat, sosial, dan pribadi.

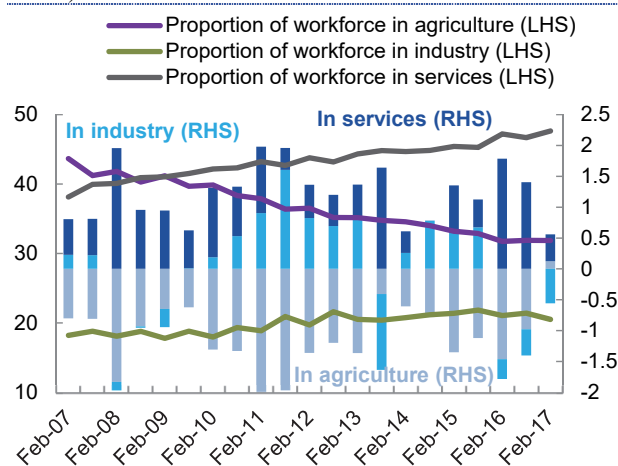
³⁹ Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

⁴⁰ Jika pendapatan para pekerja mandiri dan pekerja lepas – satu-satunya pekerja lain yang pendapatannya diambil sebagai sampel oleh Sakernas – dimasukkan, maka pertumbuhan pendapatan rata-ratanya adalah sebesar 16,2 persen secara riil dan 20,6 persen secara nominal. Pertumbuhan pendapatan rata-rata untuk sampel yang diperluas ini adalah sebesar 5,0 persen, baik secara riil maupun nominal. Perbedaan antara pertumbuhan riil di median pendapatan dan pertumbuhan nominal di median pendapatan tidak selalu sesuai dengan rata-rata inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) karena data pendapatan dipersempit dengan menggunakan IHK kota / provinsi, yang dapat dipergunakan untuk menyusun ulang pengamatan di dalam tahun yang sama.

sebesar 20,0 persen secara riil dan 23,4 persen secara nominal.⁴¹ Oleh karena itu, pendapatan mengalami penyesuaian naik yang curam, yang secara parsial mengkompensasi penurunan pendapatan riil yang dialami pada tahun 2014 dan 2015. Namun demikian, mengingat perubahan metodologis terhadap pengukuran pendapatan yang diterapkan pada Sakernas bulan Februari 2017, ketika membuat perbandingan upah di sepanjang waktu harus dilakukan dengan hati-hati (Kotak 5).

Gambar 44: Pergeseran pekerja dari sektor pertanian ke jasa telah melambat, dan proporsi pekerja dengan pekerjaan di sektor industri mulai menurun

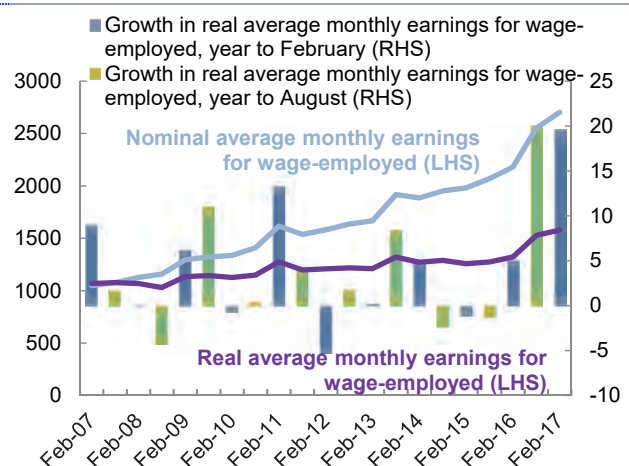
(proporsi pekerja yang bekerja, persen, Seb. Kiri; poin persentase perubahan dalam proporsi pekerja yang bekerja yoy, persen, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Gambar 45: Pendapatan rata-rata riil bertumbuh sebanyak dua digit di tahun ini sampai bulan Februari 2017

(pendapatan, Rp seribu, Seb. Kiri; Pertumbuhan persentase pendapatan bulanan rata-rata, persen, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas

Tren terbaru dalam pertumbuhan pendapatan riil belum menyebabkan adanya perubahan dalam konsumsi rumah tangga

Pertumbuhan pendapatan riil baru-baru ini nampaknya tidak menyebabkan perubahan apapun dalam konsumsi rumah tangga, yang memberikan teka-teki empiris. Pada tahun tersebut sampai dengan bulan Maret 2016⁴², nilai rata-rata konsumsi per kapita riil hanya tumbuh sebesar 4,0 persen, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas, sama seperti pertumbuhan pendapatan riil yang sudah mulai meningkat.^{43,44} Perbedaan antara tren pendapatan dan tren konsumsi sebagian disebabkan oleh data Sakernas yang terakhir kali dipublikasikan lebih baru dari data Susenas yang terakhir, sehingga data Susenas yang terakhir tersebut belum menangkap kemungkinan kenaikan konsumsi riil. Selain itu, kenaikan pendapatan cenderung memiliki dampak yang lemah pada konsumsi per kapita, sepanjang pendapatan tambahan dibagi di antara semua anggota rumah tangga, termasuk mereka yang menjadi tanggungan. Mungkin saja rumah tangga melihat bahwa kenaikan pertumbuhan pendapatan riil ini bersifat sementara dan oleh karena itu melakukan penghematan untuk memperlancar konsumsi mereka. Namun demikian,

⁴¹ Mengingat bahwa survei Sakernas pada bulan Februari 2017 dikumpulkan dengan menggunakan sampel baru yang menargetkan populasi yang sama dan tahun-tahun sampai dengan Agustus 2016 dan Februari 2017 sebagian tumpang tindih, hasil survei terakhir membantu memvalidasi angka-angka tersebut untuk pertumbuhan pendapatan yang diamati antara bulan Agustus 2015 dan Agustus 2016.

⁴² Tahun terbaru di mana datamikro (microdata) telah tersedia.

⁴³ Dalam perhitungan ini, konsumsi per kapita dipersempit dengan menggunakan IHK kota / provinsi dan bukan dengan garis kemiskinan provinsi / perkotaan-pedesaan agar sesuai dengan metodologi yang digunakan untuk memperkecil data pendapatan.

⁴⁴ Median (data yang tepat berada di tengah dari sekumpulan data) dari data konsumsi per kapita meningkat sebesar 7,0 persen pada tahun tersebut sampai dengan bulan Maret 2016.

kepentingan relatif dari faktor-faktor tersebut hanya dapat diketahui ketika data baru sudah tersedia.

Kotak 5: Efek perubahan metodologi di Sakernas

BPS terkadang melakukan penyesuaian terhadap metodologi pengumpulan data Sakernas. Banyak dari penyesuaian ini yang seharusnya memiliki pengaruh yang kecil terhadap penghitungan tren historis dalam metode utama penghitungan pasar tenaga kerja. Misalnya, jumlah sampel untuk Sakernas bulan Agustus 2016 hanya seperempat dari jumlah sampel Sakernas bulan Agustus 2015, namun oleh karena sampel tersebut dikurangi kira-kira secara merata di setiap kabupaten / kota, bobot sampel tersebut masih dapat diterapkan untuk memulihkan perkiraan nasional yang konsisten dengan putaran survei sebelumnya. Demikian pula, penyesuaian di tahun 2015 terhadap strategi pengambilan sampel – ketika BPS mulai melakukan stratifikasi sampel menurut sektor dan juga menurut indeks kekayaan dan lokasi (pedesaan-perkotaan) – tidak memiliki dampak yang jelas terhadap perhitungan statistik secara nasional atau sektoral.

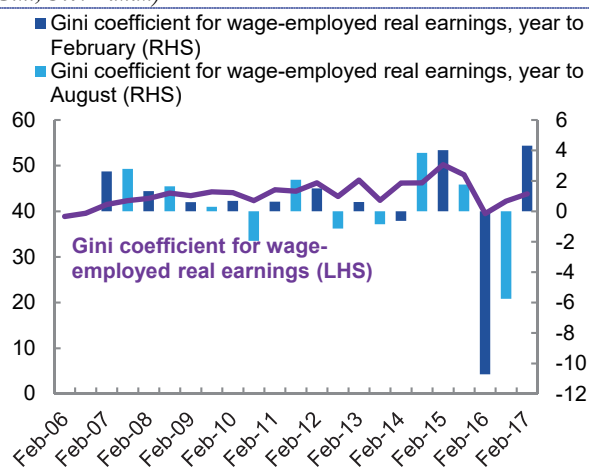
Namun demikian, dalam Sakernas Februari 2017, pertanyaan yang diajukan kepada beberapa responden tentang pendapatan mereka diubah sedemikian rupa sehingga berpotensi memiliki efek yang lebih mendalam terhadap pengukuran pendapatan dari waktu ke waktu. Secara khusus, responden yang bekerja dengan upah tidak lagi diminta untuk memperkirakan jumlah gaji atau upah yang mereka terima di bulan sebelumnya (baik dari sisi uang maupun barang), namun mereka diminta untuk secara eksplisit memisahkan gaji dan tunjangan, upah lembur, dan tunjangan khusus transportasi dan tunjangan makanan. Hal ini, pada tingkat tertentu, sejalan dengan meningkatnya jumlah kategori konsumsi dalam survei sosial ekonomi rumah tangga, yang – berdasarkan pengalaman negara-negara lain – pada umumnya menghasilkan konsumsi total terukur yang lebih tinggi. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa perkiraan upah yang diperoleh dari Sakernas Februari 2017 terlalu dibesar-besarkan, yang akan membuat data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan putaran survei sebelumnya. Oleh karena itu penting untuk berhati-hati saat menafsirkan data pendapatan terbaru dan melihat tren pendapatan dari waktu ke waktu.

Ketimpangan pendapatan meningkat lagi

Koefisien Gini untuk pendapatan riil pekerja upahan adalah 43,8 pada bulan Februari 2017, meningkat sebesar 4,3 poin dari tahun sebelumnya (Gambar 46).⁴⁵ Hal ini mengikuti penurunan yang nampak sebesar 10,7 poin di tahun tersebut sampai dengan bulan Februari 2016. Dengan demikian, peningkatan secara bertahap dalam ketimpangan pendapatan yang terjadi antara pertengahan tahun 2000an dan 2014, yang nampak mereda pada tahun 2015 dan 2016, telah mulai muncul kembali. Selain itu, koefisien Gini untuk konsumsi – dibahas di Bagian A.8 – biasanya tetap lebih rendah dibandingkan dengan koefisien Gini untuk pendapatan selama beberapa

Gambar 46: Meskipun koefisien Gini untuk pendapatan riil turun dari tingkatnya yang tinggi yang diamati pada tahun 2014 dan 2015, ketidaksetaraan pendapatan mulai meningkat lagi

(Koefisien Gini, indeks, Seb Kiri; titik perubahan yoy pada koefisien Gini, Seb. Kanan)



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

⁴⁵ Jika para pekerja mandiri dan pekerja lepas disertakan, koefisien Gini untuk pendapatan mencapai 45,8 pada Februari 2017, meningkat 4,1 poin dari Februari 2016.

tahun terakhir. Oleh karena itu, pekerja berpendapatan rendah memiliki risiko tidak menikmati peningkatan rata-rata dalam upah riil.

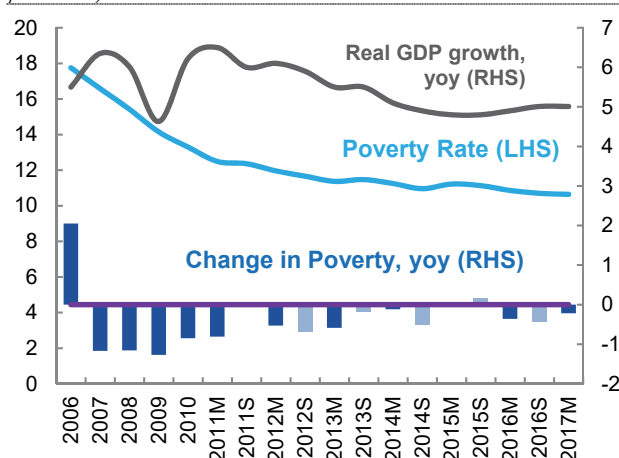
8. Pengentasan kemiskinan masih tetap lamban, namun ketimpangan terus menurun

Tingkat kemiskinan sedikit menurun, melanjutkan tren pengentasan kemiskinan sejak tahun 2011

Tingkat kemiskinan resmi adalah 10,6 persen pada bulan Maret 2017, 0,2 persen lebih rendah dari bulan Maret 2016 (Gambar 47). Jumlah penduduk miskin juga turun dari 28 juta orang menjadi 27,8 juta orang pada periode yang sama. Perkembangan ini mengindikasikan adanya kelanjutan penurunan laju pengentasan kemiskinan, yang rata-rata sebesar 1,1 poin persentase per tahun dari 2007-2011, dan sebagian mencerminkan tren pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat sejak tahun 2011⁴⁶. Selain itu, karena tingkat kemiskinan menurun, jumlah penduduk miskin yang tersisa berada di bawah garis kemiskinan, yang memerlukan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi untuk mempertahankan tingkat pengentasan kemiskinan.

Gambar 47: Pengentasan kemiskinan dari bulan Maret 2016 sampai Maret 2017 melanjutkan tren pengentasan kemiskinan yang lebih lambat sejak tahun 2011

(tingkat kemiskinan, persen; perubahan dalam kemiskinan, poin persentase)



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Catatan: M untuk bulan Maret dan S untuk bulan September.

Tingkat kemiskinan bulan Maret dan September tidak dapat secara langsung diperbandingkan, karena kemiskinan musiman belum dapat dipahami dengan baik

Pengentasan kemiskinan berjalan lamban meski terjadi peningkatan garis kemiskinan yang lebih kecil

Garis kemiskinan nasional⁴⁷ meningkat 5,7 persen antara Maret 2016 dan Maret 2017 ke tingkat Rp 374.478 per orang per bulan. Ini lebih rendah dari kenaikan di tahun 2015-2016 sebesar 7,1 persen, dan kenaikan di tahun 2014-2015 sebesar 9,3 persen. Hal ini mengindikasikan tingkat inflasi yang rendah untuk kelompok barang yang dikonsumsi orang miskin. Namun demikian, tingkat inflasi yang lebih rendah

⁴⁶ Pertumbuhan PDB riil Indonesia rata-rata telah turun menjadi rata-rata sebesar 5,3 persen untuk periode tahun 2012-16 dari rata-rata sebesar 6,2 persen selama tahun 2007-11, tidak termasuk tahun terjadinya krisis keuangan global, tahun 2009.

⁴⁷ “Garis kemiskinan nasional” ini hanya merupakan rata-rata tertimbang dari 67 garis kemiskinan (1 untuk DKI Jakarta dan 1 perkotaan + 1 pedesaan untuk semua provinsi lainnya) yang benar-benar digunakan dalam perhitungan tingkat kemiskinan.

Tabel 5: Pengentasan kemiskinan di pedesaan lebih tinggi pencapaiannya selama tahun lalu, sebagian karena terjadinya urbanisasi masyarakat miskin (jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, jutaan; tingkat kemiskinan, persen)

	Mar-16	Mar-17	Δ16-17
Jumlah penduduk di perkotaan	132,7	138,2	+5,5
Jumlah penduduk di pedesaan	125,2	122,8	Δ 2,0
Jumlah penduduk miskin di perkotaan	10,3	10,7	0,3
Jumlah penduduk miskin di pedesaan	17,7	17,1	Δ 0,6
Tingkat kemiskinan di perkotaan	7,8	7,7	-0,1
Tingkat kemiskinan di pedesaan	14,1	13,9	-0,2

Sumber: Susenas

untuk kelompok barang bagi masyarakat miskin ini belum cukup untuk memacu laju pengentasan kemiskinan.

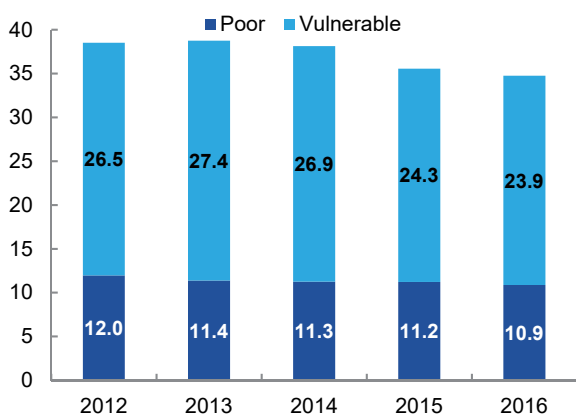
Pengentasan kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan, sebagian didorong oleh adanya urbanisasi

Kemiskinan di pedesaan, sebesar 14,1 persen, tetap lebih tinggi daripada kemiskinan di perkotaan (7,8 persen). Namun demikian, sepanjang tahun lalu, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan turun lebih dari dua kali lipat lebih cepat dari penurunan kemiskinan di perkotaan (Tabel 5). Jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 570.000 orang, sementara jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebanyak 330.000 orang. Meningkatnya urbanisasi bisa menjadi alasan: sebagaimana yang ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan dan jumlah penduduk pedesaan yang menyusut, lebih banyak orang (termasuk orang miskin) pindah ke daerah perkotaan. Namun demikian, beberapa dari penduduk tersebut pindah mungkin disebabkan karena adanya pemekaran kabupaten dan/atau daerah pedesaan tersebut direklasifikasi sebagai daerah perkotaan. Ke depan, kebijakan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan perlu mempertimbangkan implikasi dari profil kemiskinan perkotaan yang semakin meningkat di Indonesia⁴⁸.

Lebih dari satu dari lima orang Indonesia masih rentan terhadap kemiskinan

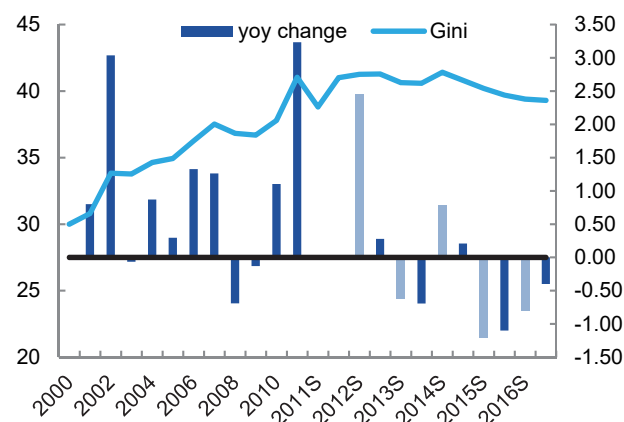
Meskipun kemiskinan telah menurun, sebagian besar penduduk masih berada tepat di atas garis kemiskinan (Gambar 48). Penduduk yang “rentan” ini, yang didefinisikan sebagai mereka yang memiliki tingkat konsumsi di bawah 1,5 kali garis kemiskinan, berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan oleh karena dipicu oleh guncangan yang terkecil sekalipun. Pada bulan Maret 2016, hampir 24 persen dari jumlah penduduk, atau 61,6 juta orang, termasuk di dalam kategori ini. Tingkat kerentanan telah turun secara konsisten antara tahun 2013 dan 2016, namun masih tetap tinggi.

Gambar 48: Lebih dari 20 persen orang Indonesia rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan
(tingkat kemiskinan dan tingkat kerentanan, persen dari jumlah penduduk)



Sumber: Susenas (survei bulan Maret)
Catatan: “Rentan” didefinisikan sebagai memiliki tingkat konsumsi di atas Garis Kemiskinan tetapi di bawah 1,5 kali Garis Kemiskinan

Gambar 49: Setelah beberapa tahun mendekati stagnasi, koefisien Gini telah turun, menurut yoy, sebanyak empat kali berturut-turut
(koefisien Gini, poin; perubahan koefisien Gini, poin)



Sumber: Susenas
Catatan: M untuk bulan Maret dan S untuk bulan September. Koefisien Gini bulan Maret dan bulan September tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena kemiskinan musiman dan ketimpangan belum dipahami dengan baik

⁴⁸ Bank Dunia telah memprakarsai dilaksanakannya analisis lebih lanjut untuk dapat lebih memahami “urbanisasi kemiskinan di Indonesia”.

Koefisien Gini terus menurun, karena konsumsi Kelompok 40 terbawah dan Kelompok 40 Menengah naik ke Kelompok 20 Teratas

Ketimpangan – yang diukur dengan koefisien Gini untuk konsumsi – terus menurun. Koefisien Gini untuk bulan Maret 2017 adalah 39,3, turun 0,4 poin dari 39,7 pada bulan Maret 2016

(Gambar 49). Ini melanjutkan tren yang dimulai pada bulan September 2015 ketika koefisien Gini mulai turun setelah naik tajam dari tahun 2000-2011 dan relatif tetap stabil antara 2011-2015. Selama tahun lalu, baik Kelompok 40 Terbawah (kuintil 1 dan 2) dan Kelompok 40 Menengah (kuintil 3 dan 4) meningkatkan pangsa konsumsi nasional mereka secara keseluruhan dibandingkan dengan Kelompok 20 Teratas (kuintil 5) (Tabel 6). Namun demikian, pertumbuhan konsumsi Kelompok 40 Terbawah masih lemah, relatif terhadap Kelompok 40 Menengah. Dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang memungkinkan akses terhadap pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi semua orang, membangun ketahanan terhadap guncangan dan membuat kebijakan fiskal lebih inklusif akan membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk menurunkan koefisien Gini menjadi 36 pada tahun 2019.

Tabel 6: Ketimpangan terus menurun, karena meningkatnya pangsa konsumsi dari Kelompok 40 Terbawah dan Kelompok 40 Menengah
(pangsa konsumsi nasional, persen)

Period	Bottom 40	Middle 40	Top 20
Mar 2016	17,0	36,1	46,9
Mar 2017	17,1	36,5	46,4
Δ 2016-2017	+0,1	+0,4	-0,5

Sumber: Susenas

9. Perkiraan yang positif namun dengan ketidakpastian yang signifikan

Perkiraan ekonomi Indonesia cukup positif dengan pertumbuhan ekonomi global yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro yang terus berlanjut

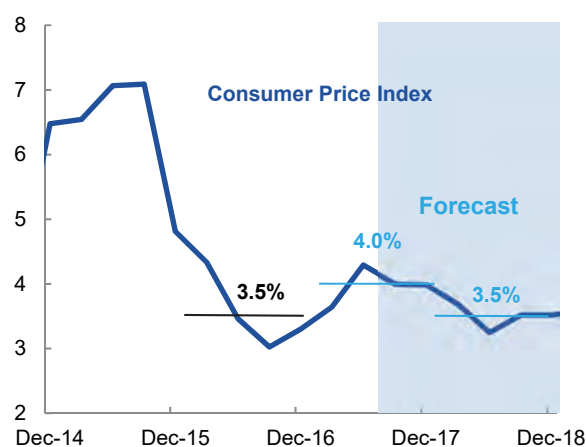
Perkiraan ekonomi untuk Indonesia masih tetap cukup positif, didukung oleh lingkungan eksternal yang baik, stabilitas ekonomi makro yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat terhadap reformasi dari pihak pemerintah. Perekonomian global terus mendukung penguatan ekonomi dan arus perdagangan internasional, serta kondisi moneter yang relatif akomodatif. Harga komoditas telah menurun dari puncaknya di awal tahun ini, namun tetap lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Meskipun ada tanda-tanda pelemahan, perekonomian dalam negeri terus menikmati pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan inflasi yang rendah. Defisit neraca transaksi berjalan meningkat dua kali lipat, namun masih relatif terkendali. APBN-P tahun 2017 dan pemotongan suku bunga BI baru-baru ini memberikan stimulus yang cukup besar.

Harga pangan yang berada di bawah perkiraan dan tidak adanya reformasi subsidi energi di Triwulan ke-4 mampu mengurangi tekanan inflasi, menurunkan perkiraan inflasi untuk tahun ini

Mengingat tingkat kenaikan harga yang berada di bawah perkiraan selama delapan bulan pertama tahun ini dan tidak adanya reformasi subsidi energi pada Triwulan ke-4, inflasi harga konsumen diproyeksikan rata-rata sebesar 4,0 persen tahun ini dan menurun menjadi 3,5 persen pada tahun 2018 (Gambar 50). Pemerintah telah mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan tarif listrik saat ini sampai akhir tahun 2017⁴⁹ dan menunda penyesuaian harga BBM bersubsidi, sehingga menjaga inflasi harga energi tetap terjaga dalam jangka pendek. Selain itu, kondisi cuaca yang menguntungkan saat ini dan program pemerintah untuk menghindari kekurangan pasokan pangan yang diperkirakan akan terus berlanjut, berkontribusi pada inflasi harga pangan yang rendah.

Gambar 50: Continued low food price inflation is expected to weigh on headline inflation in 2017 and 2018

(annual average change yoy, percent)



Sumber: BPS; World Bank staff calculations

Catatan: Food prices are a weighted average of the raw and processed food price components of CPI.

Proyeksi (*baseline*) inflasi mengasumsikan adanya sedikit kenaikan pada harga minyak mentah dan memperhitungkan dampak inflasi dari pemilihan kepala daerah pada tahun 2018 dan pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden pada tahun 2019⁵⁰. Risiko terhadap perkiraan inflasi berada pada sisi positif (*upside risks*) termasuk Pemerintah yang melanjutkan reformasi subsidi bahan bakar lebih awal dari perkiraan dan mengurangi subsidi, sehingga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar. Kondisi cuaca yang ekstrem juga dapat mengakibatkan gagal panen, sehingga menyebabkan berkurangnya persediaan makanan dan lonjakan biaya makanan.

Pertumbuhan PDB riil diperkirakan naik menjadi 5,1 persen tahun ini, menguat menjadi 5,3 persen pada 2018

Pertumbuhan PDB riil diperkirakan meningkat menjadi 5,1 persen tahun ini dan meningkat lebih lanjut menjadi 5,3 persen pada tahun 2018 (Tabel 7). Pertumbuhan konsumsi sektor swasta diproyeksikan tetap stabil tahun ini, terutama karena adanya efek peredam laju inflasi yang lebih tinggi. Namun demikian, tingkat pengangguran yang rendah, kenaikan gaji riil sebesar dua digit, pertumbuhan kredit konsumen yang lebih tinggi dan penurunan inflasi diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi sektor swasta tahun depan.

Konsumsi pemerintah

Sementara itu, konsumsi pemerintah akan melonjak pada tahun 2018, didukung oleh peningkatan kinerja penerimaan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan

⁴⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada bulan Juni mengumumkan bahwa pemerintah akan mempertahankan tarif listrik saat ini termasuk untuk kelompok pelanggan 900 VA karena perkiraan penurunan harga gas dan batubara.

⁵⁰ Indonesia akan menjalani serangkaian pemilihan umum pada tahun 2018 dan 2019, yang mencakup pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan di 171 pemerintah daerah, termasuk 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, dengan masa kampanye yang berlangsung pada tanggal 15 Februari - 23 Juni 2018. Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden akan diselenggarakan pada 17 April 2019, dan masa kampanye akan dimulai pada tanggal 13 Oktober 2018 - 13 April 2019.

diperkirakan akan pulih pada tahun 2017 dan melonjak pada tahun 2018

reformasi pajak yang lebih baik. Defisit fiskal diproyeksikan akan tetap berada di bawah batas maksimum sebesar 3,0 persen pada tahun 2017. Sebagai sinyal mengenai komitmennya terhadap disiplin fiskal, Rancangan APBN tahun 2018 yang diajukan oleh Pemerintah menyiratkan defisit sebesar 2,2 persen dari PDB.

Investasi diproyeksikan akan meningkat, sementara ekspor akan tetap tinggi, sehingga mengangakat pertumbuhan PDB

Dengan kondisi moneter global yang akomodatif, pelanggaran moneter yang cukup besar tahun lalu dan penurunan suku bunga kebijakan baru-baru ini di tahun ini, biaya pendanaan diperkirakan akan tetap rendah, sehingga mendukung pertumbuhan investasi pada tahun 2017 dan 2018. Belanja modal Pemerintah yang tinggi dan investasi asing langsung (FDI) yang tinggi juga akan menambah pengeluaran investasi swasta dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi global yang tinggi dan terus menguatnya perdagangan global diperkirakan akan mengangkat ekspor Indonesia, walaupun terjadi penurunan harga komoditas.

Tabel 7: Indikator ekonomi utama

(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain)

	Tahunan			Revisi dari IEQ sebelumnya
	2016	2017f	2018f	2017
1. Indikator ekonomi utama				
Produk Domestik Bruto (PDB)	5,0	5,1	5,3	-0,1
Pengeluaran konsumsi sektor swasta	5,0	5,0	5,2	-0,1
Konsumsi Pemerintah	-0,1	3,5	5,0	0,7
Pembentukan modal tetap bruto	4,5	5,0	5,1	-0,1
Ekspor barang dan jasa	-1,7	5,0	4,8	-2,9
Impor barang dan jasa	-2,3	3,2	3,8	-3,1
2. Indikator ekonomi lainnya				
Indeks Harga Konsumen	3,5	4,0	3,5	-0,3
Deflator PDB	2,5	3,9	3,2	0,2
3. Asumsi Ekonomi				
Nilai tukar (Rp/USD)	13300	13333	13500	-26
Harga minyak mentah Indonesia (USD/bl)	51	50	52	-3

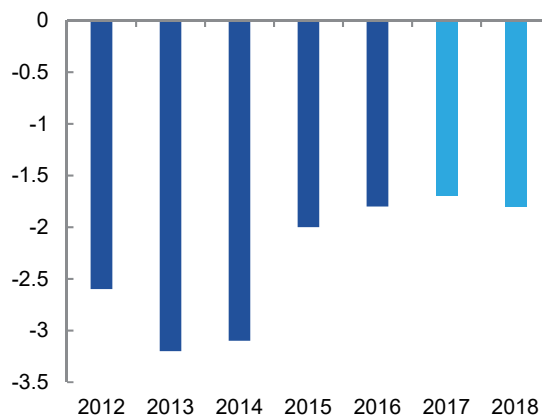
Sumber: BPS; BI; CEIC; proyeksi staf Bank Dunia

Catatan: Angka untuk tahun 2016 adalah hasil aktual. F singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan didalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB yang terakhir. Asumsi nilai tukar dan asumsi harga minyak mentah adalah data tahunan rata-rata. Revisi ini adalah terhadap proyeksi di IEQ edisi Maret 2017

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar di tahun 2018

Dengan ekonomi global yang terus mendukung dan nilai tukar perdagangan dari komoditas diperkirakan akan lebih tinggi dari tahun 2016, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan akan menyempit menjadi 1,7 persen dari PDB pada tahun 2017. Proyeksi nilai tukar perdagangan (*terms of trade* atau ToT) memburuk, permintaan dalam negeri yang tinggi, dan pertumbuhan dari para mitra dagang utama Indonesia yang diproyeksikan sedikit melemah, membuat perkiraan defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 1,8 persen dari PDB pada tahun 2018 (Gambar 51).

Gambar 51: Neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar secara moderat di tahun 2018
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: CEIC dan BI; perhitungan staf Bank Dunia

Ketidakpastian kebijakan global dan risiko geopolitik adalah risiko eksternal yang substansial

Risiko eksternal terhadap perkiraan perekonomian termasuk adanya ketidakpastian global jika *The Fed* menyimpang dari jalur kebijakan moneter dan normalisasi neraca yang dilakukan dengan sangat bertahap, melemahnya harga komoditas, dan penerapan langkah-langkah proteksionis yang lebih luas di antara negara-negara maju. Indonesia bergantung pada pendanaan eksternal baik untuk defisit keuangan Pemerintah maupun korporasi besar, dan oleh karena itu tetap sangat sensitif terhadap gejolak arus modal global.

Risiko dalam negeri yang utama mencakup penurunan konsumsi sektor swasta dan belanja investasi...

Perkiraan (*baseline*) mengasumsikan bahwa konsumsi sektor swasta dan pertumbuhan investasi akan meningkat pada tahun 2018. Namun demikian, ada tanda-tanda kelemahan di sektor ritel dan di antara perusahaan-perusahaan, yang ditandai oleh melemahnya penjualan eceran, impor barang modal yang berkontraksi, dan juga melemahnya sentimen bisnis. Melemahnya konsumsi dan/atau investasi swasta akan memberi masalah bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

...inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan...

Dengan adanya penurunan suku bunga baru-baru ini, Bank Indonesia telah memulai siklus pelonggaran moneter yang baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, Pemerintah telah mengumumkan rencananya untuk meningkatkan belanja fiskal dan memperlebar defisit fiskal. Kebijakan yang ekspansif ini bersama dengan pasar tenaga kerja yang ketat dapat menyebabkan meningkatnya tekanan inflasi, yang akan berdampak pada pertumbuhan konsumsi sektor swasta, dan oleh karena itu berdampak pula pada pertumbuhan PDB.

...dan dampak ekonomi politik yang merugikan

Seiring dengan semakin dekatnya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, peluang untuk menerapkan reformasi struktural yang sangat penting dan mungkin tidak populer untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mungkin akan semakin kecil. Jika reformasi struktural ini diabaikan, potensi pertumbuhan dapat melambat dan berdampak negatif bagi perkiraan perekonomian.

Reformasi struktural yang terus berlanjut sangat penting untuk meningkatkan potensi pertumbuhan

Sementara perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, tingkat pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir ini agak lesu, berkisar di angka 5 persen sejak Triwulan ke-1 2014, dan secara signifikan lebih rendah dari yang tercatat pada awal dekade ini. Sementara penyebab kurangnya percepatan tersebut saat ini tidaklah jelas, dua hipotesis yang masuk akal menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan reformasi struktural. Yang pertama adalah bahwa pertumbuhan yang mendarat saat ini bersifat sementara dan hasil dari ekonomi menyesuaikan diri dengan reformasi, seperti pemotongan subsidi dan peningkatan pemungutan pajak, yang memiliki biaya jangka pendek namun keuntungan jangka panjang. Yang kedua adalah bahwa pelaksanaan reformasi tidak berimbang ke pengalaman individu di lapangan, dan ketidakpastian kebijakan yang berlanjut di beberapa bidang tertentu telah mengurangi dampak positif dari reformasi. Efek gabungannya adalah bahwa reformasi belum mampu mengangkat potensi pertumbuhan PDB dari tingkat yang ada saat ini. Oleh karena itu, sementara Pemerintah tetap berkomitmen untuk menerapkan reformasi struktural, dan memang telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini, diperlukan adanya upaya baru untuk menerapkan reformasi struktural utama, dan terutama untuk memastikan penerapannya di lapangan, untuk memperluas potensi pertumbuhan ekonomi dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

B. Topik Fokus



Memobilisasi sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur⁵¹

Permintaan terhadap infrastruktur di Indonesia yang bertumbuh dengan cepat seiring dengan semakin meluasnya urbanisasi penduduk. Namun demikian, kurangnya investasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur yang besar, yang menghambat pertumbuhan Indonesia dan membatasi laju pengentasan kemiskinan. Dengan modal saham publik per orang hanya sepertiga dari rata-rata negara berkembang utama, Indonesia diperkirakan memiliki kesenjangan aset infrastruktur sebesar USD 1,5 triliun. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan dan, sebagai titik awal, telah menargetkan investasi tambahan di sektor transportasi, air bersih, energi dan sektor utama lainnya yang mencapai lebih dari USD 400 miliar dari tahun 2015-2019. Dengan memanfaatkan investasi sektor swasta dapat membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya yang besar dengan lebih efisien dan efektif. Memobilisasi sektor swasta untuk pembangunan infrastruktur memerlukan perbaikan dalam (i) lingkungan peraturan perundang-undangan yang kompleks untuk kemitraan pemerintah-swasta, (ii) proses perencanaan, penilaian dan seleksi proyek, (iii) transparansi dan efisiensi badan usaha milik negara yang mendominasi sektor infrastruktur, dan (iv) kedalaman perbankan lokal dan pasar modal.

a. Kurangnya investasi selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya defisit infrastruktur yang besar di Indonesia

Investasi di bidang infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan dan

Infrastruktur yang memadai dan terencana mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas dengan menurunkan biaya transportasi dan telekomunikasi, menghasilkan skala dan cakupan ekonomi dalam produksi, dan mendorong peningkatan sumber daya manusia. Meskipun

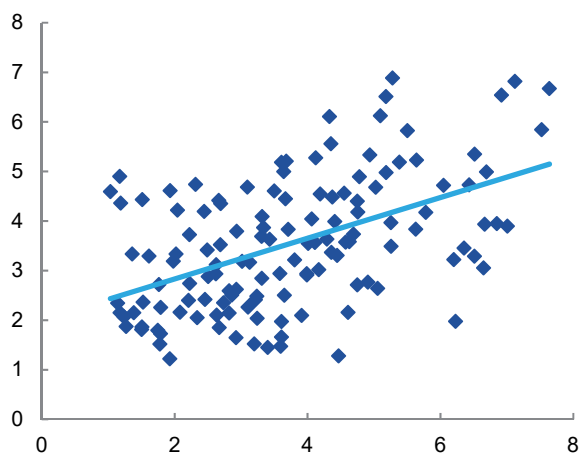
⁵¹ Artikel ini banyak mengambil sumber dari Program Penilaian Sektor Infrastruktur (InfraSAP - Infrastructure Sector Assessment Program) yang sedang berlangsung, yang dipimpin secara bersama oleh Indonesia Country Management Unit dan unit Infrastructure, PPPs and Guarantees Group dari Bank Dunia, dengan masukan dari Unit Transport, Water, Energy, Finance & Markets, and Governance Global Practices dari Bank Dunia dan IFC serta MIGA. Bank Dunia (2017f).

**kemakmuran
bersama**

responsivitas terhadap pertumbuhan infrastruktur berbeda-beda antar negara⁵², hubungannya sangat positif (Gambar 52). Secara rata-rata, kenaikan stok infrastruktur oleh 1 standar deviasi diperkirakan akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 3 poin persentase.⁵³ Infrastruktur juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dengan memungkinkan masyarakat miskin untuk mengakses peluang-peluang produktif.⁵⁴

Gambar 52: Peningkatan modal saham publik diperkirakan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi

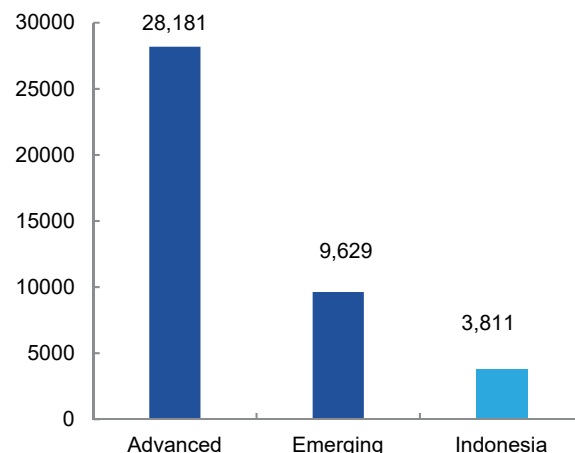
(sumbu-y: pertumbuhan PDB riil, 1980-2015; sumbu-x: pertumbuhan rata-rata stok modal publik secara riil, 1980-2015)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Dataset Investasi dan Stok Modal IMF (2017)

Gambar 53: Stok modal publik Indonesia per orang terhadap negara-negara pasar berkembang lainnya dan negara-negara maju rendah

(konstan 2010 USD)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data IMF (2017)

Catatan: Perkiraan tahun 2015. Data rata-rata tidak tertimbang dihitung untuk 14 negara maju dan 21 negara berkembang⁵⁵.

**Aset infrastruktur
Indonesia tertinggal
dari negara-negara
pasar berkembang
setara sebesar sekitar
USD 1,5 triliun**

Perbandingan stok modal publik⁵⁶ antar negara menggambarkan defisit infrastruktur Indonesia yang besar. Dalam hal per kapita, stok modal publik Indonesia diperkirakan mencapai USD 3.811 – sekitar sepertiga dari rata-rata untuk negara pasar berkembang dan negara berkembang (EMDE) lainnya dan sekitar seperdelapan dari rata-rata yang sesuai untuk negara-negara maju (Gambar 53). Secara absolut, kesenjangan dalam aset infrastruktur antara Indonesia dan negara pasar berkembang dan negara berkembang (EMDE) besar lainnya mencapai sekitar USD 1,5 triliun pada tahun 2015.⁵⁷ Angka ini akan lebih tinggi lagi jika

⁵² Lihat Bank Dunia (2013) untuk pembahasan yang lebih lengkap.

⁵³ Calderon dan Servén, 2017.

⁵⁴ Seneviratne dan Sun (2013) menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur akan menyebabkan penurunan indeks Gini sebesar 1-2 poin persentase di 5 negara ASEAN.

⁵⁵ Negara-negara tersebut adalah negara-negara berpenghasilan menengah dengan menggunakan klasifikasi World Economic Outlook dari IMF: Argentina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Chili, Tiongkok, Kolombia, Mesir, India, Yordania, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Polandia, Rumania, Rusia, Afrika Selatan, Thailand, Turki, dan Vietnam

⁵⁶ Dihitung dari dataset Dana Investasi dan Stok Modal IMF (Januari 2017). Modal infrastruktur merupakan komponen penting dari modal publik di sebagian besar negara. Stok modal publik juga mencakup komponen non-infrastruktur (misalnya mesin dan peralatan, persediaan, barang berharga dan tanah), tetapi data ini digunakan sebagai proxy jika tidak ada perkiraan antar negara yang sebanding.

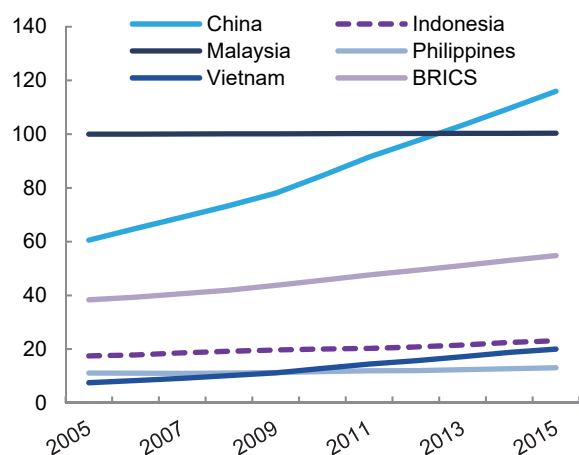
⁵⁷ Angka ini diperoleh dengan mengalikan perbedaan stok publik per kapita antara Indonesia dan EMDE (USD 5818) dengan jumlah penduduk Indonesia (261 juta) pada tahun 2015.

memperhitungkan investasi infrastruktur tambahan yang dibutuhkan Indonesia untuk penyesuaian iklim dan mitigasi.⁵⁸

Kurangnya investasi di bidang infrastruktur telah menyebabkan kemerosotan aset yang ada

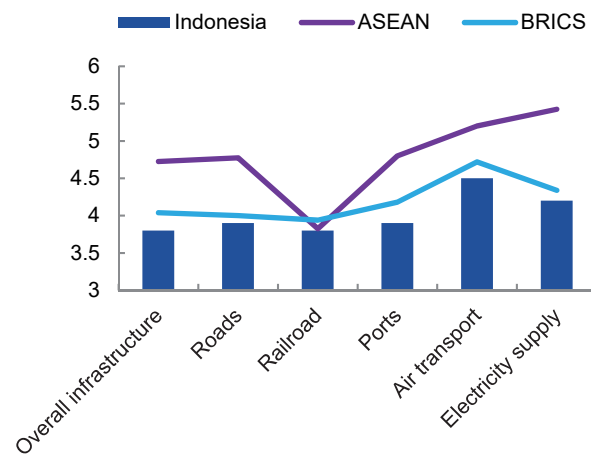
Akan tetapi Indonesia kurang memberi perhatian kepada infrastruktur publik, yang menyebabkan tumbuhnya defisit infrastruktur. Tingkat pertumbuhan Indonesia dalam stok modal publik per kapita pada umumnya tertinggal jauh dari Vietnam, Tiongkok, India dan Malaysia, bahkan dengan memperhitungkan perbedaan awal (Gambar 54). Investasi publik juga tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi: meskipun pertumbuhan PDB yang tinggi, sebesar 5,6 persen rata-rata dari tahun 2005-2015, stok modal publik Indonesia rata-rata tumbuh 2,8 persen per tahun selama dekade tersebut. Dengan demikian, tidak hanya jumlah infrastruktur di Indonesia yang paling rendah di kawasan⁵⁹ – tetapi kualitas dari infrastruktur juga tertinggal dari negara-negara ASEAN dan beberapa negara-negara pasar berkembang lainnya yang setara (Gambar 55).

Gambar 54: Stok modal publik per kapita telah tumbuh lebih lambat dari waktu ke waktu relatif terhadap kebanyakan negara-negara setara...
(pertumbuhan tahun-ke-tahun dari indeks stok publik per kapita)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan data IMF (2017).
Catatan: Stok modal publik Malaysia per kapita pada tahun 2005 digunakan sebagai tahun dasar indeks karena merupakan yang tertinggi di antara EMDE. BRICS adalah rata-rata tidak tertimbang dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan

Gambar 55: ... mengarah pada persepsi bahwa infrastruktur Indonesia memiliki kualitas yang relatif lebih rendah
(indeks kualitas infrastruktur; 1 (terburuk) sampai 7 (terbaik) poin)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia dengan menggunakan data dari Global Competitive Reporting World Economic Forum (2016-2017)
Catatan: Data untuk ASEAN adalah rata-rata tidak tertimbang dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina; BRICS adalah rata-rata tidak tertimbang dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan

Mengatasi defisit infrastruktur sepenuhnya adalah usaha jangka panjang yang harus segera dimulai

Pemerintah Indonesia mengakui adanya kebutuhan untuk mengatasi defisit infrastruktur sebagai prioritas nasional. Sebagai titik awal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) memperkirakan bahwa dibutuhkan adanya tambahan investasi infrastruktur sebesar Rp 5,4 triliun⁶⁰ (USD 415 miliar atau sekitar setengah dari PDB Indonesia) dari tahun 2015-2019. Ini menyiratkan pengeluaran rata-rata sebesar USD 83 miliar per tahun. Sebagian besar pengeluaran ini

⁵⁸ ADB (2017) memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia mencapai USD 1,1 triliun dari tahun 2016-2030. Dengan memperhitungkan penyesuaian iklim, angka ini akan meningkat menjadi USD 1,3 triliun.

⁵⁹ Seneviratne dan Sun, 2013.

⁶⁰ Presentasi Bappenas, "Prioritas Kedaulatan Energi dan Infrastruktur, RPJMN 2015-19," Desember 2014.

diperkirakan akan terjadi di sektor transportasi, diikuti oleh sumber daya listrik dan air bersih (lihat Kotak 6 untuk rincian lebih lanjut mengenai kebutuhan investasi yang diharapkan ini). Namun demikian, meskipun target RPJMN tersebut terpenuhi, untuk menutup kesenjangan infrastruktur yang besar di Indonesia akan memerlukan usaha yang jauh lebih besar lagi. Sebagai ilustrasi, jika arus investasi publik meningkat setiap tahun sesuai dengan target RPJMN⁶¹ dan dibuat beberapa asumsi tambahan⁶² berdasarkan tingkat depresiasi dan pertumbuhan penduduk, akan membutuhkan waktu 20 tahun bagi Indonesia untuk mencapai stok modal publik saat ini untuk menyamai rata-rata EMDE. Untuk menyamai rata-rata negara maju, akan memakan waktu sekitar 44 tahun.

Kotak 6: Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur yang signifikan dalam bidang transportasi, energi dan air bersih

Transportasi: Ada kesenjangan infrastruktur yang besar di jaringan jalan nasional, bandara, pelabuhan dan transportasi perkotaan. Nilai kapasitas jaringan yang saat ini belum terealisasi pembangunannya (*backlog*) diperkirakan sekitar 20 persen atau 16.000 lajur km jalan. Untuk memenuhi perkiraan pertumbuhan 5 persen per tahun untuk permintaan lalu lintas, diperkirakan harus ada tambahan jalur jalan sepanjang 3.000-4.000 km setiap tahunnya. Program Pembangunan Jalan Tol, yang menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 6.220 km pada tahun 2025, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp 720 triliun (USD 54 miliar). Di sektor pelabuhan, diperkirakan dibutuhkan dana sebesar USD 47 miliar hingga tahun 2030 untuk pembangunan pelabuhan. Diperlukan USD 7-13 miliar untuk investasi angkutan massal, karena RPJMN bertujuan untuk meningkatkan persentase perjalanan yang dilakukan dengan menggunakan transportasi umum di kota-kota besar dari 5-20 persen menjadi setidaknya 32 persen.

Tenaga Listrik: Permintaan telah meningkat rata-rata sebesar 7,1 persen per tahun sejak akhir tahun 2000an. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa permintaan tenaga listrik akan tumbuh rata-rata sekitar sebesar 8,8 persen per tahun antara tahun 2015-24, yaitu diperlukan adanya peningkatan produksi tenaga listrik dari 219,1 menjadi 464,2 terawatt jam (TWh) untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa pengeluaran investasi untuk infrastruktur tenaga listrik (pembangkit, transmisi dan distribusi) akan mencapai USD 95 miliar antara sekarang ini dan tahun 2025.

Air bersih dan sanitasi: RPJMN membutuhkan adanya investasi sekitar Rp 253 triliun (USD 20 miliar) selama lima tahun. Kementerian Pekerjaan Umum memproyeksikan bahwa bagian terbesar (47 persen) dari investasi tersebut akan berasal dari pemerintah daerah, dan sisanya dari sektor swasta dan pembiayaan bank.

Sumber: Bank Dunia (2017f)

b. Untuk menutup kesenjangan infrastruktur akan memerlukan peningkatan keterlibatan sektor swasta

Pemerintah telah mencurahkan sumber daya publik untuk infrastruktur...

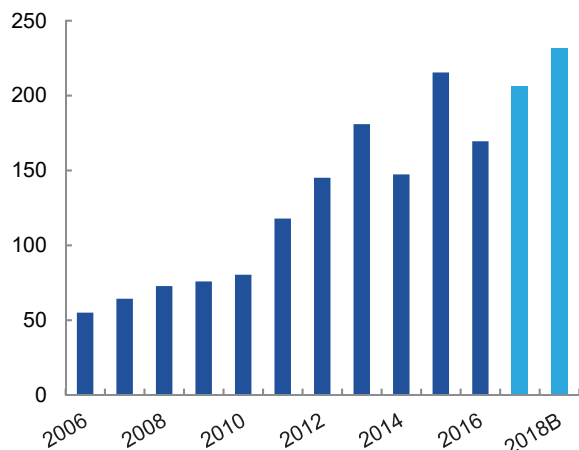
Menyadari adanya kebutuhan untuk mengatasi defisit infrastruktur yang besar ini, Pemerintah Pusat dan Daerah telah meningkatkan belanja modal dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, Pemerintah Pusat menghabiskan Rp 169 triliun (USD 12,7 miliar) untuk belanja modal, sepersepuluh dari total pengeluaran. Belanja modal telah meningkat secara nominal (Gambar 56), terlepas dari adanya suntikan modal yang cukup besar kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang sebagian besar untuk melaksanakan proyek infrastruktur prioritas (Gambar 57). Pada tahun 2016, suntikan tersebut adalah sebesar Rp 50,5 triliun (USD 3,8 miliar). Belanja

⁶¹ Proyeksi ini dilakukan dengan menjaga investasi publik sebagai stok modal tetap sebesar 8 persen (USD 83 miliar dibagi dengan USD 984 miliar, tingkat stok modal publik tahun 2015 di Indonesia).

⁶² Tingkat depresiasi rata-rata stok modal publik bagi negara-negara berpenghasilan menengah yang digunakan (3,5 persen per tahun). Pertumbuhan penduduk diasumsikan sebesar 0,8 persen setiap empat tahun.

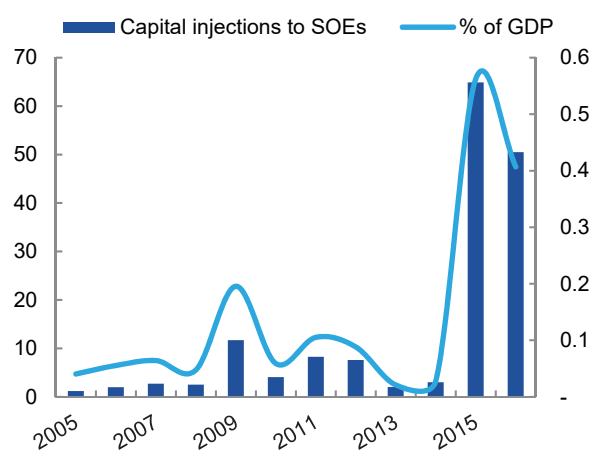
modal Pemerintah Daerah juga meningkat, sebesar Rp 250,6 triliun (USD 18,8 miliar) di tahun yang sama.⁶³

Gambar 56: Belanja modal oleh Pemerintah Pusat telah meningkat...
(belanja modal dalam Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: Data tahun 2017 adalah perkiraan dari APBN-P, data tahun 2018 adalah proyeksi dari APBN yang disetujui. Semua tahun lainnya mengacu pada pengeluaran aktual yang sudah diaudit.

Gambar 57: ...dan suntikan modal yang cukup besar telah diberikan kepada BUMN, terutama di tahun 2015-2016
(Rp triliun, Seb. Kiri; Persen PDB, Seb. Kanan)



Sumber: Neraca dari berbagai BUMN, perhitungan staf Bank Dunia

...akan tetapi meski penerimaan meningkat, sumber daya publik saja tidak dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar ini

Memungut lebih banyak penerimaan akan membantu Pemerintah untuk membelanjakan lebih banyak lagi untuk infrastruktur, namun demikian, sumber daya publik tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Pemerintah bertujuan untuk menaikkan rasio pajak sebesar 1 persen dari PDB per tahun sampai tahun 2020⁶⁴, dan sebagian dari penerimaan tambahan ini dapat dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, bahkan dalam skenario hipotetis di mana semua penerimaan pemerintah baru di tahun 2018-19 dialokasikan untuk infrastruktur,⁶⁵ total belanja modal⁶⁶ sepanjang tahun 2015-19 hanya akan mencapai Rp 5.180 triliun (USD 389,5 miliar). Ini jauh dari USD 1,5 triliun yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara pasar berkembang yang setara lainnya. Dalam skenario yang lebih realistis namun masih optimis di mana seperlima dari seluruh penerimaan baru di tahun 2018-19 dihabiskan untuk infrastruktur, total belanja modal mulai tahun 2015-2019 hanya mencapai Rp 1.497 triliun (USD 112,6 miliar), jauh dari target RPJMN dan bahkan lebih jauh lagi dari tujuan untuk mempersempit disparitas infrastruktur sebesar USD 1,5 triliun dengan negara-negara

⁶³ Data tahun 2016 mengenai belanja modal aktual oleh pemerintah daerah belum tersedia.

⁶⁴ Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan rasio pajaknya melalui serangkaian reformasi yang dikoordinasikan oleh Tim Reformasi di bawah Kementerian Keuangan. Dalam rapat perdana (*kick-off*) peluncuran pada tanggal 20 Desember 2016, Tim Reformasi menetapkan tujuan untuk meningkatkan rasio pajak sebesar sekitar 1 persen tahun-ke-tahun sampai tahun 2020.

⁶⁵ Ini tidak akan realistis karena beberapa wilayah pengeluaran telah dialokasikan dan mendapatkan tambahan secara otomatis seiring dengan meningkatnya penerimaan (misalnya pendidikan, jaminan sosial). Hal ini juga tidak dikehendaki karena infrastruktur bukan satu-satunya wilayah dengan kesenjangan belanja yang memiliki dampak sosial (misalnya kesehatan).

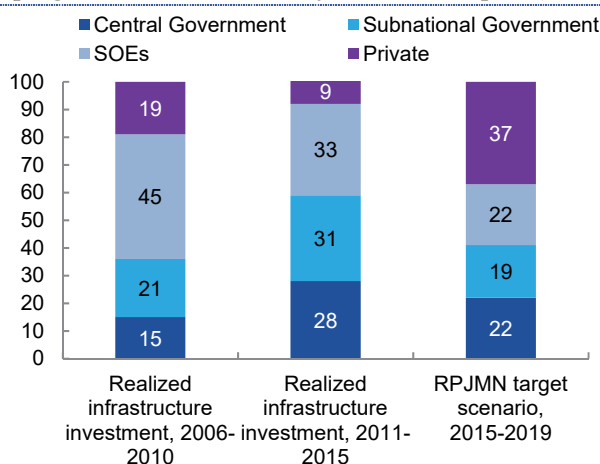
⁶⁶ Ini mengasumsikan bahwa belanja modal pemerintah daerah masih tetap berada pada tingkat tahun 2014 sebesar Rp 92,4 triliun (USD 7 miliar). Ini tidak termasuk suntikan modal ke BUMN.

pasar berkembang dan negara-negara berkembang (EMDEs - *emerging markets and developing economies*) lainnya.

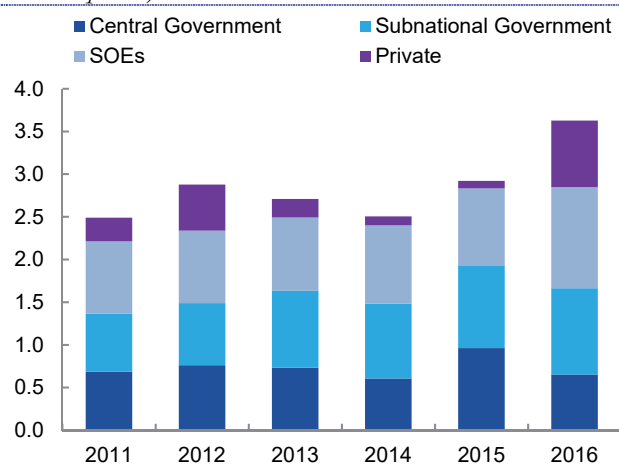
Untuk mengatasi kebutuhan infrastruktur di Indonesia akan memerlukan lebih banyak investasi sektor swasta ...

Untuk menutup kesenjangan infrastruktur Indonesia dengan EMDEs (*emerging markets and developing economies* - negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang) lain akan memerlukan peningkatan investasi sektor swasta. Ini bukan hanya karena terbatasnya sumber daya publik, namun karena adanya keuntungan efisiensi yang dapat dihadirkan oleh sektor swasta. Dengan mengalokasikan secara efisien risiko antara sektor publik dan swasta secara signifikan dapat memperbesar porsi infrastruktur yang dapat dibangun untuk tingkat komitmen dan risiko fiskal tertentu, yang berpotensi mengarah pada perluasan layanan infrastruktur yang lebih cepat. Selain itu, sektor swasta dapat membantu memberikan layanan infrastruktur dengan nilai yang sepadan dengan harganya (*value for money*) dengan lebih baik dibandingkan dengan proses pengadaan pemerintah yang biasanya dilakukan. Di Australia dan negara-negara OECD lainnya, proyek infrastruktur yang melibatkan kemitraan pemerintah-swasta (KPS)⁶⁷ memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat terlaksana dengan anggaran yang tersedia dan tepat waktu.⁶⁸ Studi dari negara-negara berkembang juga menunjukkan bahwa partisipasi sektor swasta di bidang telekomunikasi, distribusi tenaga listrik dan air bersih cenderung dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi operasional.⁶⁹

Gambar 58: Investasi swasta perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target Pemerintah...
(pangsa dari total investasi di infrastruktur inti, persen)



Gambar 59: ...akan tetapi investasi swasta di infrastruktur inti terus menurun sampai saat ini
(total investasi di infrastruktur inti sebagai bagian dari PDB, persen)



Sumber: Laporan audit dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, neraca BUMN, database Partisipasi Swasta Bank Dunia dalam Infrastruktur (PPI - Private Participation in Infrastructure).
Catatan: Menggunakan metodologi dari Bank Dunia (2015) dan AIPEG (2017) untuk data perkiraan BUMN tahun 2013-2016. Untuk pemerintah daerah, data tahun 2015-2016 mengacu pada jumlah yang dianggarkan.

...akan tetapi minat sektor swasta terhadap investasi

Pemerintah Indonesia berharap bahwa sektor swasta akan membiayai hampir dua pertiga investasi infrastruktur tambahan senilai USD 415 miliar selama tahun 2015-2019 (Gambar 58). Namun demikian, pangsa investasi infrastruktur ‘inti’⁷⁰ yang

⁶⁷ Didefinisikan sebagai kontrak jangka panjang antara pihak swasta dan badan pemerintah untuk menyediakan aset atau layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko dan tanggung jawab manajemen yang signifikan, dan remunerasi yang terkait dengan kinerja.

⁶⁸ Lihat, misalnya, *Allen Consulting Group* (2007) dan *Burger and Hawkesworth* (2011).

⁶⁹ Andres, Foster dan Guasch (2006); Gassner dan Pushak (2008).

⁷⁰ Transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih dan limbah, dan infrastruktur irigasi.

infrastruktur telah melemah selama ini

dibiayai oleh sektor swasta telah menurun dari rata-rata sebesar 19 persen pada tahun 2006-2010 (0,8 persen dari PDB) menjadi 9 persen pada tahun 2011-2015, atau 0,2 persen dari PDB (Gambar 59). Data untuk tahun 2016 tampaknya mengindikasikan adanya peningkatan dalam investasi sektor swasta, namun kenyataannya mencerminkan kemajuan yang tertinggal pada proyek-proyek yang telah dilelangkan sebelumnya.⁷¹ Peningkatan belanja infrastruktur swasta yang cukup besar memerlukan dihilangkannya hambatan utama yang menghambat keterlibatan sektor swasta dalam infrastruktur.

c. Beberapa kendala perlu diatasi untuk dapat memanfaatkan pembiayaan sektor swasta untuk infrastruktur

Di Indonesia, sektor swasta menghadapi empat tantangan utama ketika hendak berinvestasi di bidang infrastruktur. Pertama, lanskap hukum yang kompleks untuk PPP mengakibatkan penundaan dan pembatalan proyek, yang berlaku sebagai disinsentif bagi investasi baru. Kedua, banyaknya pemain yang berbeda dan kurangnya proses standar pada tahap identifikasi, perencanaan dan persiapan proyek telah menyebabkan sedikitnya proyek menarik yang dipasarkan. Ketiga, dominasi BUMN dalam penyediaan infrastruktur berisiko membatasi masuknya sektor swasta. Keempat, pembatasan di pasar modal dan ekuitas menyulitkan para pemain di sektor swasta untuk mengakses pembiayaan jangka panjang dalam mata uang lokal. Bagian ini membahas masing-masing kendala tersebut secara terinci.

i. Ketidakpastian hukum dan peraturan menghambat kepentingan sektor swasta**Peraturan-peraturan mengenai KPS yang tumpang tindih, tidak konsisten dan bertentangan mengakibatkan penundaan atau pembatalan proyek**

Indonesia memiliki banyak undang-undang, peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan KPS, yang menghasilkan kerangka hukum yang kompleks yang menimbulkan kebingungan antara para investor dan lembaga yang mengeluarkan kontrak. Tidak ada undang-undang yang secara menyeluruh mengatur KPS; sebaliknya, berbagai peraturan mengatur aspek-aspek tertentu dari siklus persiapan dan pengadaan proyek. Kerangka hukum KPS terdiri dari: (1) peraturan KPS utama, (2) undang-undang khusus sektor (UUKS) dan (3) UU KPS lainnya. Pada kategori pertama saja, diperkirakan ada 158 undang-undang dan peraturan nasional yang terkait dengan KPS.⁷² Beberapa undang-undang ini tumpang tindih atau tidak konsisten, dan interaksi antara undang-undang KPS yang lebih umum dan UUKS seringkali tidak jelas. Dengan gabungan masalah-masalah tersebut, peraturan-peraturan KPS utama umumnya memiliki posisi yang lebih rendah dalam hierarki perundangan dibandingkan dengan kebanyakan UUKS. Jika peraturan-peraturan tersebut bertentangan, maka proyek KPS akan ditunda sampai UUKS yang terkait diubah atau dikeluarkan keputusan khusus, atau akhirnya dibatalkan (lihat Kotak 7 untuk contoh).

Mengubah Undang-Undang Khusus Sektorial memakan waktu dan tidak dapat diprediksi

Memastikan konsistensi UUKS dengan peraturan KPS utama telah menjadi topik diskusi di antara pemangku kepentingan yang relevan untuk beberapa waktu, namun sedikit kemajuan telah dicapai di bidang ini. Mengubah UUKS melibatkan berbagai kementerian Indonesia, dan karenanya memerlukan koordinasi antar kementerian, yang membuat proses ini memakan waktu dan tidak dapat diprediksi.⁷³ Kompleksitas kerangka hukum ini mengkhawatirkan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan KPS, dan telah menyebabkan kurangnya koordinasi dan kebingungan di sepanjang siklus proyek.

⁷¹ Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Jawa Tengah dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan mencapai tahap persetujuan pembiayaan (financial close) pada tahun 2016, namun masing-masing dilelangkan pada tahun 2009 dan 2011.

⁷² Bank Dunia (2017f).

⁷³ Dari wawancara untuk InfraSAP Bank Dunia.

Kotak 7: Beberapa proyek KPS mengalami kesulitan karena kendala hukum dan peraturan

Pembatasan partisipasi sektor swasta. Pada bulan Februari 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air karena bunyi Pasal 33 Undang-Undang Dasar secara luas menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Mengikuti keputusan ini, proyek KPS PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta dibatalkan. Di bawah peraturan baru⁷⁴, sektor swasta tidak diizinkan mengoperasikan jaringan distribusi di proyek air minum. Mahkamah Konstitusi juga telah mengutip Pasal 33 beberapa kali untuk mencegah pembentukan regulator independen, meliberalisasi pasar tenaga listrik, atau memprivatisasi perusahaan milik negara yang terlibat dalam produksi energi (IEA, 2015).

- **Implikasi:** Oleh karena partisipasi sektor swasta diatur oleh undang-undang khusus sektoral, investor khawatir bahwa Mahkamah Konstitusi juga dapat membatalkan partisipasi sektor swasta dalam barang publik lainnya, yang menciptakan ketidakpastian jangka panjang.

Undang-undang yang tumpang tindih mengenai persetujuan DPRD: Secara hukum (PP No. 50/2007), setiap pemerintah daerah yang berencana untuk mengikat suatu perjanjian KPS dengan entitas sektor swasta dan memerlukan dana / dukungan APBD harus meminta persetujuan DPRD sebelum membuat kesepakatan semacam tersebut. Sebagai bagian dari proses ini, suatu rancangan perjanjian KPS harus diajukan ke DPRD untuk ditinjau. Namun demikian, Permendagri No. 96/2016 mewajibkan pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan DPRD mengenai mekanisme pembayaran proyek pada tahun anggaran pembayaran yang terkait. Oleh karena itu, tidak jelas apakah persetujuan DPRD sebelum membuat suatu perjanjian KPS termasuk komitmen APBD jangka panjang selama masa berlakunya perjanjian KPS, atau apakah persetujuan anggaran tersebut harus didapatkan untuk pembayaran untuk setiap tahun anggaran.

- **Implikasi:** Mengamankan persetujuan DPRD setelah selesainya pekerjaan konstruksi merupakan risiko yang cukup besar untuk proyek KPS (misalnya Proyek PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah - *Waste-to-Energy*) Bandung dihentikan karena tidak mendapatkan persetujuan seperti ini). Peserta lelang sektor swasta akan berhati-hati dalam mengajukan penawaran yang mungkin kemudian tidak akan mendapatkan persetujuan atas mekanisme pembayaran yang diajukannya.

Pisahkan persyaratan untuk kelayakan proyek (*outline business case* - OBC). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia memiliki persyaratan terpisah untuk persiapan OBC, yaitu studi kelayakan awal. Ini tidak praktis karena semua badan pemerintah yang mengeluarkan kontrak (GCA - *government contracting agencies*) harus mempersiapkan OBC untuk proyek KPS sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bappenas, namun juga harus menyerahkan OBC ke Kementerian Keuangan sesuai dengan persyaratan mereka jika dibutuhkan adanya dana dukungan tunai infrastruktur (*Viability Gap Funding* - VGF). Meskipun persyaratannya tampaknya tumpang tindih secara substansial, untuk dapat memenuhi persyaratan Kementerian Keuangan dapat menimbulkan upaya tambahan yang signifikan, misalnya untuk menyusun analisis biaya dan manfaat sosial, model keuangan, dan analisis yang menunjukkan bahwa VGF adalah upaya terakhir.

- **Implikasi:** Mematuhi dua persyaratan yang terpisah memakan waktu bagi GCA, dan dapat memperlambat proses persiapan proyek.

Kesalahan penetapan tarif di sektor infrastruktur inti dapat menghalangi minat sektor swasta

Peraturan tarif yang dirancang dengan buruk di sektor tertentu juga akan menghambat kepentingan sektor swasta. Di sektor air minum, tarif rata-rata yang dibayarkan konsumen ke PAM adalah sebesar USD 0,28 per m³, yang nampaknya rendah dan sebagian menjelaskan kurangnya minat investor / operator swasta.⁷⁵ Di sektor tenaga listrik, metodologi penentuan tarif listrik saat ini tidak memberi insentif kepada PLN untuk memperbaiki efisiensi, menghambat kredibilitasnya sebagai mitra penyedia listrik swasta (*independent power producer* / IPP). Dengan biaya saat ini ditambah rumusan margin 7 persen, PLN diberi kompensasi terlepas dari apakah biaya tersebut dikeluarkan secara efektif atau tidak, yang mendorong timbulnya inflasi yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi (*cost inflation*).

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (“PP No. 122/2015”) dan peraturan pelaksanaannya

⁷⁵ Bank Dunia (2017f).

Selain itu, ketidakpastian mengenai penetapan tarif dan seringnya dilakukan perubahan tarif juga dapat menghambat investasi swasta. Pada bulan Januari 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan *feed-in tariff* (harga patokan pembelian harga energi berdasarkan biaya produksi energi baru dan terbarukan) untuk sumber energi terbarukan, menyusul keluhan dari pemerintah pusat dan daerah bahwa *feed-in tariff* yang diberlakukan pada tahun 2014 terlalu tinggi.

Meskipun sudah ada perbaikan, mendapatkan perizinan dan persetujuan untuk proyek KPS masih sulit dilakukan

Kendala yang lebih umum di iklim investasi Indonesia juga menghambat investasi swasta di bidang infrastruktur. Meskipun ada upaya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu dan sistem perizinan daring (*online*) jalur cepat⁷⁶, hasil wawancara dengan para investor menunjukkan bahwa sistem perizinan masih rumit. Perizinan dan persetujuan sering tertunda karena masalah teknis, prosedur yang tidak jelas, atau tanggapan yang lamban dari instansi pemerintah dalam meninjau dan menyetujui permohonan.

ii. Kurangnya insentif dan kapasitas untuk mengidentifikasi proyek yang dipersiapkan dengan baik dan layak secara komersial selama siklus proyek

Kelemahan sektor publik dalam perencanaan, penilaian dan penjaminan mutu proyek mengakibatkan kurangnya proyek-proyek yang layak untuk mendapatkan pinjaman bank (*bankable*)

Mengidentifikasi, memilih dan mempersiapkan proyek KPS yang layak pasar melibatkan banyak pelaku, baik di tingkat daerah maupun pusat (Gambar 60). Menurut peraturan, usulan proyek-proyek infrastruktur baru harus berasal dari Badan Pemerintah yang Mengeluarkan Kontrak (GCA - *Government Contracting Authorities*)⁷⁷ di sektor atau wilayah tempat proyek berada. GCA bertanggung jawab atas semua aspek persiapan proyek, mulai dari studi pendahuluan hingga penyelesaian persyaratan untuk kelayakan proyek (*Outline Business Cases - OBCs*),⁷⁸ pengadaan dan pelaksanaan Proyek yang diidentifikasi oleh GCA sebagai berpotensi sebagai KPS diteruskan ke Bappenas, badan perencanaan pusat nasional, yang bertanggung jawab untuk penyaringan usulan tersebut dan membantu GCA dalam pengembangan OBC. Berdasarkan dokumen usulan proyek yang diterima, Bappenas mengidentifikasi beberapa pilihan proyek yang akan diterbitkan di dalam Buku KPS tahunan. Setelah Kemenkeu menyetujui OBC, GCA dapat mengajukan dana pembangunan proyek dari Fasilitas Pembangunan Proyek Kemenkeu. Kemenkeu juga memutuskan proyek mana yang akan menerima Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (*Viability Gap Funding - VGF*) dan mendukung penggunaan fasilitas pembayaran ketersediaan layanan atau *Availability Payment (AP)* jika berkesuksesan (lihat Kotak 8 untuk penjelasan mengenai instrumen pembiayaan ini). Kemenkeu juga dapat menetapkan sarana pembiayaan infrastruktur lainnya - misalnya Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur (Indonesia

⁷⁶ Pada akhir tahun 2015, BKPM mengeluarkan kebijakan perizinan yang memungkinkan para investor dengan investasi senilai minimal Rp 100 miliar (USD 7 juta) atau berencana untuk mempekerjakan setidaknya 1.000 pekerja untuk memproses izin prinsip mereka dalam waktu tiga jam. Pada tahun 2016, BKPM menambahkan lebih banyak lagi perizinan untuk diproses melalui program jalur cepat dan memperluas pelaksanaannya ke beberapa sektor infrastruktur.

⁷⁷ Meliputi semua badan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proyek infrastruktur, mulai dari kementerian, departemen, dan badan pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah dan instansi-instansi mereka.

⁷⁸ Dalam hal ini, OBC menetapkan analisis awal mengenai kelayakan proyek KPS yang diusulkan, termasuk aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, alokasi risiko, lingkungan hidup dan sosial, untuk menginformasikan pengambilan keputusan selanjutnya mengenai proyek tersebut.

Infrastructure Finance - IIF),⁷⁹ PT. SMI⁸⁰ dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) – untuk memberikan saran teknis dan bantuan lainnya dalam persiapan, pengadaan dan transaksi proyek.

Gambar 60: Mengidentifikasi, menyeleksi dan mempersiapkan proyek infrastruktur KPS melibatkan banyak pelaku



Kotak 8: Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa instrumen pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan KPS

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan serangkaian instrumen fiskal dan kontrak untuk memfasilitasi partisipasi sektor swasta dan meningkatkan kelangsungan hidup proyek-proyek KPS yang potensial. Secara khusus, Pemerintah Indonesia memperkenalkan:

- (i) Dana Pembangunan Proyek di Kemenkeu untuk mendukung perekrutan penasihat transaksi profesional untuk tahap awal pembangunan proyek infrastruktur yang ditetapkan untuk dibangun dengan skema KPS;
- (ii) Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Funding - VGF) – ini adalah kontribusi Pemerintah untuk sebagian biaya pembangunan proyek KPS yang secara ekonomi layak tetapi secara komersial tidak layak.⁸¹ Jika disetujui, VGF ini memberikan subsidi modal untuk melakukan upaya buy down (*buy down* adalah sebuah metode pembiayaan di mana pembeli berusaha untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih rendah untuk beberapa tahun pertama atau mungkin selama masa pinjaman – pent.) untuk biaya proyek;
- (iii) Jaminan Pemerintah untuk menutup risiko politik dan kinerja pemerintah; dan
- (iv) Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment - AP) - ini merupakan pembayaran berkala oleh Menteri / Ketua / Kepala Daerah kepada badan swasta untuk menyediakan layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria yang ditetapkan di dalam perjanjian KPS.

Instrumen VGF dan AP tersebut mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek tertentu (misalnya VGF pada Proyek Air Minum Umbulan; AP untuk proyek jaringan *backbone* serat optik Palapa Ring), namun belum diterapkan secara luas. Sebagian dari permasalahannya adalah instrumen-instrumen tersebut adalah instrumen yang relatif baru (VGF diperkenalkan pada tahun 2012-13 dan AP pada tahun 2015), jadi serapan instrument-instrumen mungkin hanya masalah waktu saja. Namun demikian, peraturan dan standar akuntansi untuk instrumen-instrumen tersebut dianggap terlalu rumit oleh GCA, diperburuk oleh kenyataan bahwa kedua instrumen tersebut diatur dan dikelola oleh Direktorat Jenderal yang berbeda di dalam Kemenkeu. Juga tidaklah mungkin untuk memadukan kedua instrumen tersebut, yaitu memanfaatkan VGF untuk mensubsidi sebagian AP agar KPS menjadi layak.

Kapasitas GCA untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan KPS terbatas...

Dari identifikasi proyek hingga perencanaan dan persiapan, tidak ada proses yang jelas untuk mengalokasikan proyek antara sektor publik dan swasta. GCA memiliki kemampuan yang terbatas untuk secara efektif menganalisis kelangsungan hidup proyek, dan jarang mempersiapkan studi pendahuluan yang baik mengenai

⁷⁹ PT. *Infrastructure Financing Facility* (seharusnya PT Indonesia Infrastructure Finance - pent.) adalah perusahaan swasta, anak perusahaan dari PT. SMI yang menyediakan pembiayaan proyek dengan mata uang lokal dalam bentuk pinjaman, ekuitas dan jaminan risiko non-politik.

⁸⁰ PT. Sarana Multi Infrastruktur adalah lembaga keuangan bukan bank yang mengkhususkan diri untuk pembiayaan infrastruktur. Perusahaan ini didirikan sebagai badan usaha milik negara pada bulan Februari 2009.

⁸¹ Suatu proyek dianggap layak secara komersial jika diharapkan akan memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutup biayanya dan menghasilkan tingkat pengembalian keuangan yang dapat diterima. Kelangsungan ekonomi juga mengakibatkan munculnya biaya / manfaat sosial dan lingkungan.

pelaksanaan KPS potensial⁸² (misalnya kelayakan finansial, kebutuhan secara menyeluruh, penjelasan mengenai nilai yang sepadan dengan biayanya (*value for money*)). Hanya segelintir proyek yang diteruskan oleh GCA ke Bappenas yang memiliki data yang mendasarinya (misalnya perkiraan biaya, perkiraan pendapatan) dan komitmen dari GCA pemilik proyek. Selain itu, peraturan pengadaan dan pagu (*cap*) remunerasi melarang GCA untuk merekrut penasihat internasional yang memenuhi syarat untuk menyiapkan proyek dengan standar yang memadai yang dapat menarik pembiayaan swasta. Karena biaya persiapan proyek dianggap sebagai bagian dari pengeluaran modal GCA, hanya sedikit insentif bagi GCA untuk mendanai studi berbiaya tinggi yang tampaknya tidak dapat dengan segera mencapai target fisiknya (misalnya peningkatan ukuran atau cakupan proyek). GCA dengan demikian enggan mengeluarkan biaya di muka agar proyek dapat menjadi layak secara komersial dan memungkinkan dilakukannya pelelangan yang kompetitif secara internasional yang akan menarik cukup banyak persaingan dan investor yang berkualitas.

...akibatnya hanya sedikit saja usulan KPS yang dapat dilaksanakan

Karena keterbatasan staf dan anggaran, Unit KPS Bappenas tidak memiliki kapasitas untuk dapat secara aktif menyaring setiap usulan sebelum dimasukkan ke dalam Buku KPS. Hal ini mengakibatkan sedikit saja proyek yang ada di dalam Buku KPS yang akan dilaksanakan sebagai KPS. Selain itu, penerbitan daftar proyek PKS yang berbeda-beda namun sering tumpang tindih menyebabkan pasar kehilangan kepercayaan pada Buku KPS.⁸³ Meskipun Bappenas memiliki anggaran yang terbatas untuk mendukung GCA dalam menyelesaikan OBC, namun sumber daya yang ada cukup memadai untuk mengatasi kurangnya persiapan proyek dari pihak GCA.

Dukungan yang tidak terkoordinasi dapat mengakibatkan proyek-proyek yang secara komersial tidak layak diajukan sebagai KPS...

Indonesia telah mengambil langkah-langkah dalam mengembangkan kerangka kelembagaan untuk mendanai dan membiayai infrastruktur, namun oleh karena adanya birokrasi dan kurangnya mekanisme pelaksanaan yang tepat untuk menciptakan proses (*pipelines*) proyek yang baik (terlepas dari apakah proyek tersebut didanai oleh sektor publik atau swasta) telah merusak proses pelaksanaannya. Meskipun instrumen pendukung Pemerintah yang berbeda-beda (VGF, AP, dll) telah dikembangkan, berbagai fungsi di Kemenkeu menetapkan proyek ke setiap instrumen pendanaan tersebut tanpa adanya penilaian yang terkoordinasi. Oleh karena dukungan pemerintah ini hanya tersedia melalui proses terpusat, ada kekhawatiran bahwa ketersediaan dukungan Pemerintah ini menjadi insentif bagi GCA untuk mengajukan proyek-proyek untuk KPS, sehingga hanya proyek-proyek yang memerlukan dukungan Pemerintah agar dapat layak secara komersial yang ditetapkan sebagai KPS.

...sementara proyek-proyek yang layak secara komersial justru dialokasikan ke BUMN, bukan dibawa ke pasar

Kelemahan dalam perencanaan, penilaian dan penjaminan mutu proyek tersebut telah mengakibatkan proyek yang paling layak secara komersial dilaksanakan melalui pengadaan publik atau secara langsung diberikan ke BUMN. Namun, untuk memaksimalkan pembiayaan secara agregat untuk pembangunan infrastruktur, pembiayaan swasta harus terlebih dahulu diupayakan untuk proyek yang disiapkan secara menyeluruh, yang layak untuk mendapatkan pinjaman bank (*bankable*), dengan instrumen seperti VGF, AP dan jaminan pemerintah yang dicadangkan untuk pemanfaatan yang bijaksana untuk meningkatkan daya tarik proyek yang melibatkan risiko inheren.

⁸² Berdasarkan hasil pembahasan tim InfraSAP dengan Direktorat KPSRB Bappenas.

⁸³ Berdasarkan hasil wawancara tim InfraSAP dengan para investor sektor swasta.

iii. Dominasi BUMN dapat menghambat minat sektor swasta

BUMN telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan stok infrastruktur di Indonesia...

Didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah terutama mengandalkan badan usaha milik negara untuk melaksanakan rencana infrastruktur yang ambisius di Indonesia.⁸⁴ Sebagai kontributor yang penting bagi perekonomian Indonesia, BUMN diperkirakan menyumbang sepertiga dari total belanja infrastruktur dan diharapkan dapat memberikan kontribusi seperlima dari investasi tambahan di tahun 2015-19 (lihat Gambar 58). Pendekatan ini sebagian besar merupakan respons pragmatis terhadap kebutuhan mendesak akan kapasitas baru, dan juga cara untuk menghindari inefisiensi yang ada dalam siklus proyek. Proses pengadaan BUMN lebih cepat, dan mereka lebih bersedia dan mampu mengambil risiko lebih banyak dibandingkan dengan pemegang konsesi sektor swasta. Mereka juga bersedia melaksanakan proyek non-komersial sebagai bagian dari mandat mereka sebagai ‘agen pembangunan’.

...namun mereka tidak selalu memiliki kapasitas untuk dapat menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara efisien...

Meskipun peran mereka menonjol, tidak semua BUMN dapat menyelesaikan pekerjaan infrastruktur secara efisien. Sementara aset dan ekuitas BUMN meningkat dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan telah menurun dan laba tetap mendarat sebagai bagian dari PDB (Gambar 61). Perusahaan-perusahaan swasta yang terdaftar di bursa efek juga pada umumnya mengungguli BUMN yang tercatat di bursa efek dalam hal tingkat pengembalian ekuitas (*return on equity*) / tingkat pengembalian aktiva (*return on assets*) di beberapa sektor infrastruktur utama (Gambar 62). Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa BUMN tidak selalu dikelola dengan baik dari perspektif keuangan, dan oleh karena itu tidak didorong untuk mencapai tata kelola dan standar efisiensi yang sama untuk proyek-proyek infrastruktur. Di sektor transportasi, misalnya, pelabuhan yang dikelola oleh BUMN menunjukkan kinerja operasional yang kurang baik dibandingkan dengan beberapa usaha patungan antara operator internasional dan Pelindo.⁸⁵ Di sektor air minum, 73 persen perusahaan daerah air minum (PDAM) mengalami kerugian, dengan tarif rata-rata yang lebih rendah dari biaya per unit, dan sebanyak hampir 50 persen PDAM diklasifikasikan sebagai tidak sehat secara finansial oleh Pemerintah.

...dan dapat meningkatkan risiko fiskal jika tidak dipantau secara ketat

Karena BUMN sangat bergantung pada keuangan publik dan harus mematuhi batas maksimal pinjaman⁸⁶ dari bank lokal, BUMN menghadapi batasan tentang sampai seberapa jauh mereka dapat meningkatkan belanja infrastruktur. BUMN memiliki akses terhadap berbagai subsidi Pemerintah yang eksplisit (misalnya untuk melaksanakan kewajiban layanan publik) dan subsidi implisit (misalnya jaminan Pemerintah dan suntikan modal) Namun demikian, Pemerintah telah membatasi penggunaan suntikan modal pada tahun 2017 dan harus memastikan bahwa defisit fiskal tidak melebihi 3 persen. Meskipun utang BUMN yang dijamin saat ini kurang

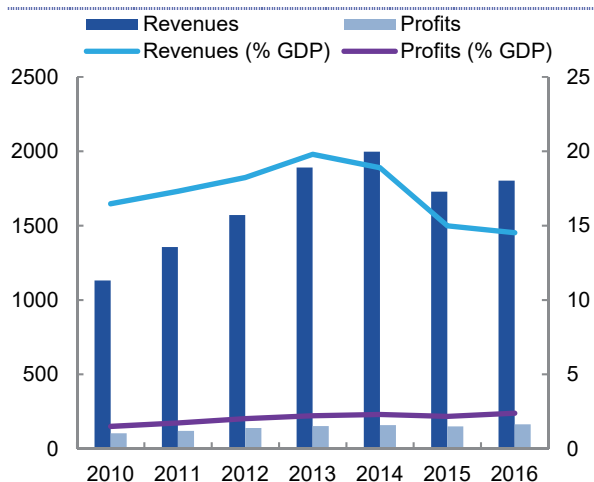
⁸⁴ Di sektor tenaga listrik, PLN menyumbang 70 persen dari total kapasitas terpasang dan tetap dominan dalam penyediaan transmisi dan distribusi. Di sektor jalan tol, Jasa Marga adalah operator terbesar, yang memiliki sekitar 70 persen dari semua jalan tol yang beroperasi. Pelabuhan komersial dikelola oleh empat BUMN (Pelindo I sampai IV) yang beroperasi di bawah konsesi yang panjang (30-50 tahun), dan kedua BUMN operator bandara (Angkasa Pura I dan II) yang mengoperasikan sebagian besar bandara di Indonesia. Layanan penyediaan air minum dan sanitasi disediakan terutama oleh perusahaan daerah air minum (PDAM).

⁸⁵ Pelindo adalah BUMN. Sumber: Penilaian sektor transportasi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2007f).

⁸⁶ Bank Indonesia (BI) memberlakukan batas pinjaman bank komersial bagi satu entitas atau kelompok peminjam. Untuk satu nama, batas maksimal pinjaman (SBL - single borrower limit) adalah 20 persen dari modal bank; untuk satu kelompok peminjam tunggal, batas tersebut adalah 25 persen; dan untuk pihak terkait batas tersebut adalah 10 persen. Namun demikian, secara praktis, batas pinjaman ditentukan secara internal dan dapat dikelola secara aktif untuk pihak yang telah berpengalaman sebagai peminjam yang merupakan nasabah utama.

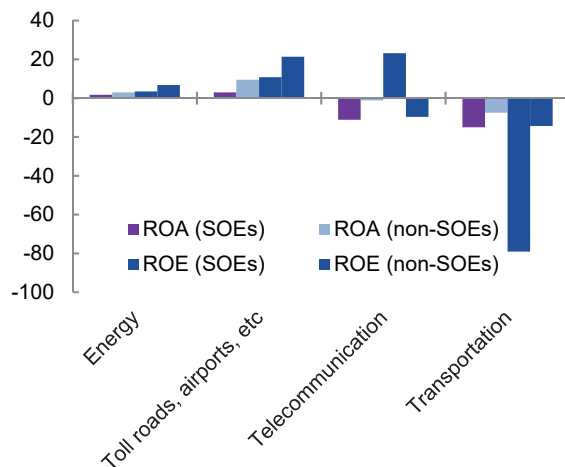
dari 1,0 persen dari PDB, diperlukan adanya pemantauan ketat terhadap kewajiban kontinjensi dan kinerja keuangan BUMN untuk memastikan bahwa risiko fiskal tetap tidak terlalu besar. Kendala-kendala ini semakin memperkuat anggapan bahwa investasi swasta yang lebih besar di bidang infrastruktur sangat dibutuhkan.

Gambar 61: Pendapatan BUMN telah menurun dan laba tetap mendarat sebagai bagian dari PDB
(Rp triliun, Seb. Kiri; Persentase PDB, Seb. Kanan)



Sumber: Kementerian BUMN dan pemberitaan pers, perhitungan staf Bank Dunia.

Gambar 62: ... dan BUMN yang terdaftar di bursa saham memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan swasta di sebagian besar sektor infrastruktur
(tingkat pengembalian ekuitas (return on equity) dan tingkat pengembalian aktiva (return on assets), persen)



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Agustus 2017), perhitungan staf Bank Dunia.

Ada tanda-tanda bahwa dominasi BUMN mungkin telah menurunkan investasi swasta (*crowded out*) dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur inti...

Akses istimewa terhadap pembiayaan dan penunjukan langsung proyek-proyek ke BUMN telah menurunkan investasi swasta (*crowding out*). Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, sektor swasta hanya menyumbang 9 persen dari belanja infrastruktur inti pada tahun 2015. Penurunan ini juga terlihat di tingkat sektoral. Di sektor tenaga listrik, pada tahun 2015, PLN menyumbang 70 persen dari total kapasitas pembangkit yang terpasang sementara penyedia listrik swasta (*independent power producer / IPPs*) menyumbang 21 persen dan sisanya oleh perusahaan listrik swasta dan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (*captive generation*).⁸⁷ PLN juga tetap menjadi kekuatan yang dominan dalam penyediaan transmisi dan distribusi, walaupun UU Ketenagalistrikan 2009 mengizinkan perusahaan listrik swasta di luar wilayah layanan PLN untuk menghasilkan dan menjual tenaga listrik.⁸⁸ Dalam transportasi, sebagian besar konsesi jalan tol dimiliki / dikendalikan oleh BUMN sementara sektor swasta hanya menyumbang 33 persen dari total panjang jalan yang telah terbangun dan kurang dari 15 persen dari sisi jalan yang sedang dibangun atau kontrak pembangunan jalan yang diberikan / proyek jalan yang penunjukannya diberikan.⁸⁹ Dominasi operasional keempat BUMN pelabuhan telah

⁸⁷ The Oxford Institute for Energy Studies: “Permintaan Tenaga Listrik Indonesia dan Sektor Batubara: Mengekspor atau memenuhi permintaan dalam negeri?” Dikutip dari Penilaian Sektor Energi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2017f).

⁸⁸ Penilaian Sektor Energi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2017f).

⁸⁹ Penilaian Sektor Transportasi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2017f).

menyebabkan terbatasnya penyertaan modal investor swasta di luar beberapa usaha patungan antara operator internasional dan pelabuhan.⁹⁰

...oleh karena adanya akses yang mudah terhadap pembiayaan...

Efek *crowding out* tersebut sebagian karena BUMN, menurut sifatnya, memiliki akses yang lebih mudah terhadap sumber pendanaan Pemerintah. Dengan demikian, BUMN dan kreditor / penjamin mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan kelayakan komersial proyek dengan harapan bahwa kerugian perusahaan akan ditutup oleh APBN. Dalam pelelangan pembangunan jalan tol, misalnya, tingkat pengembalian internal yang dapat diterima untuk BUMN bisa serendah 13 persen, sedangkan para pesaing swasta mencapai 16 persen.⁹¹ Selain itu, tidak ada kebijakan dividen yang ditetapkan untuk BUMN, dengan pembayaran dividen yang ditetapkan berdasarkan kasus per kasus. Tingkat pengembalian ekuitas di bawah pasar dapat juga memberi BUMN keunggulan yang tidak adil atas para pesaing mereka.

... dan pemanfaatan penunjukan langsung

Dengan melakukan penunjukan langsung proyek-proyek infrastruktur ke BUMN mungkin juga menghalangi sektor swasta dari investasi infrastruktur. Untuk mempercepat penyerahan proyek infrastruktur, Pemerintah telah melakukan tujuh proyek penunjukan langsung atau program *grossir* (termasuk multi proyek) melalui Peraturan Presiden kepada BUMN di proyek kereta api ringan, kereta api berkecepatan tinggi, jalan tol, pelabuhan laut, dan tenaga listrik. Namun demikian, penunjukan langsung ini menciptakan persepsi pasar bahwa proyek-proyek yang lebih layak diberikan ke BUMN melalui penunjukan langsung, yang selanjutnya menghalangi kepentingan sektor swasta. Dalam hal pelabuhan, misalnya, banyak pembangunan baru pelabuhan komersial besar telah diberikan ke ke Pelindo melalui penunjukan langsung dalam beberapa tahun terakhir ini.⁹²

iv. Instrumen jangka panjang untuk pembiayaan dengan mata uang lokal untuk proyek infrastruktur terbatas

Pembiayaan dengan mata uang lokal jangka panjang untuk infrastruktur tidak banyak tersedia di Indonesia

Mengingat pendapatan banyak proyek infrastruktur di Indonesia adalah dalam mata uang Rupiah, instrumen keuangan jangka panjang dalam mata uang lokal sangatlah penting untuk menarik pemain swasta. Hal ini tidak hanya untuk menghindari volatilitas yang terkait dengan pasar keuangan internasional, namun juga untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dan tingginya biaya keuangan internasional oleh karena tingginya premi risiko dan lindung nilai valuta asing. Namun demikian, pasar surat utang dan pasar modal Indonesia masih tergolong baru, yang membatasi tersedianya pembiayaan jangka panjang dalam bentuk Rupiah. Sisa dari bagian ini berfokus pada sejumlah tantangan yang dipilih di pasar perbankan dan pasar modal yang menghambat masuknya investasi swasta ke sektor infrastruktur.

Sektor perbankan yang kecil dan sangat terkonsentrasi tidak memfasilitasi pengembangan instrumen keuangan

Sektor perbankan Indonesia relatif kecil, yang nilainya sebesar sekitar setengah dari PDB, kurang dari banyak negara-negara tetangga dan negara-negara pasar berkembang besar lainnya (Gambar 63). Untuk mencapai sistem perbankan dengan ukuran yang sebanding dengan negara-negara lain di kawasan (relatif terhadap PDB) pada tahun 2019-2020 akan mensyaratkan pertumbuhan aset perbankan sebesar 20-25 persen setiap tahunnya;⁹³ Namun demikian, aset perbankan tersebut hanya

⁹⁰ Di pelabuhan, misalnya, Pelindo sudah memiliki banyak lahan yang bisa digunakan untuk pengembangan pelabuhan, yang menyulitkan sektor swasta untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar.

⁹¹ Penilaian Sektor Transportasi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2017f).

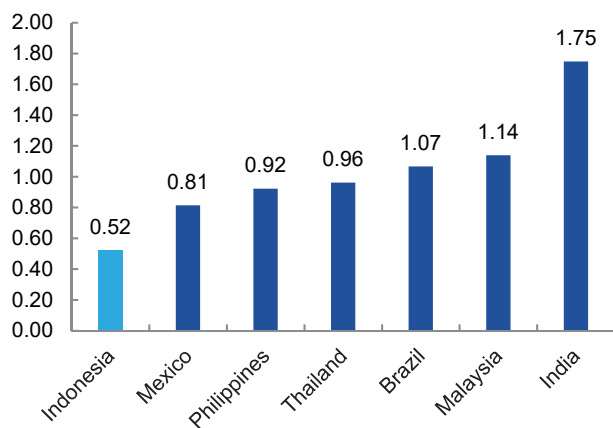
⁹² Penilaian Sektor Transportasi untuk InfraSAP. Bank Dunia (2017f).

⁹³ Dengan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 5 persen per tahun selama empat tahun ke depan.

infrastruktur yang sesuai...

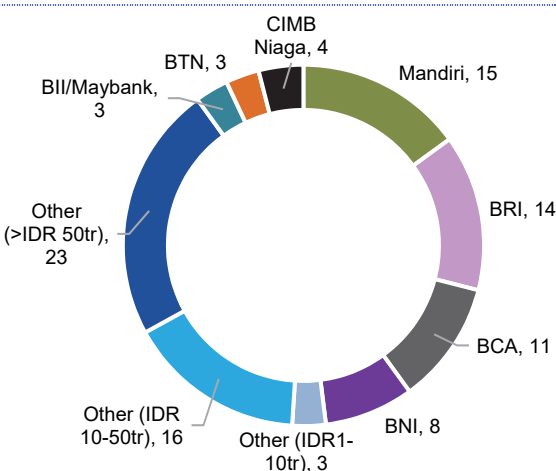
tumbuh sebesar 6 persen dari tahun 2015-16 dan 9 persen pada tahun lalu. Aset perbankan tumbuh terlalu lambat untuk dapat secara efektif mendukung dan memasok kebutuhan infrastruktur Indonesia. Selain itu, pinjaman daerah juga sangat terkonsentrasi: empat bank (Bank Mandiri, BRI, BNI dan BCA⁹⁴) menyumbang setengah dari total aset perbankan (Gambar 64) dan mendominasi pasokan pembiayaan dalam bentuk Rupiah ke sektor infrastruktur. Bank-bank ini memperoleh keuntungan dari margin bunga bersih yang sebanding⁹⁵, yang dapat memberi sedikit insentif bagi mereka untuk berinovasi, memperluas penawaran produk atau memperdalam analisis kredit sehingga mereka dapat menerapkan kredit yang lebih kompleks dalam mata uang lokal (misalnya pembiayaan infrastruktur beragunan (*recourse infrastructure financing*) yang terbatas⁹⁶).

Gambar 63: Sektor perbankan di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan sektor perbankan di negara-negara setara di kawasan...
(rasio aset perbankan terhadap PDB)



Sumber: Bank Dunia, IMF

Gambar 64: ... dan aset perbankan cukup terkonsentrasi
(pangsa total aset perbankan, persen)



Sumber: Bank Indonesia, perhitungan staf Bank Dunia

...dan ada keterbatasan likuiditas bagi pinjaman infrastruktur

Sektor perbankan juga secara substansial tersegmentasi, yang membatasi likuiditas yang tersedia untuk pinjaman infrastruktur. Bank BUMN (Bank Mandiri, BRI dan BNI) lebih fokus untuk mendukung BUMN dan nama perusahaan-perusahaan

⁹⁴ Bank Mandiri, BRI dan BNI adalah bank negara, sedangkan BCA adalah bank swasta.

⁹⁵ 5,6-6,1 persen pada tahun 2016, dibandingkan dengan 2,5-3,0 persen untuk negara-negara lain di kawasan

⁹⁶ Pembiayaan beragunan (*recourse financing*) memberi pemberi pinjaman hak penuh terhadap aset pemegang saham yang diagunkan atau arus kas pemegang saham untuk melunasi pinjaman dalam hal terjadinya gagal bayar oleh SPV (Special Purpose Vehicle – SPV adalah sebuah perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus atau fokus yang terbatas – pent.). Jika proyek atau SPV gagal untuk memberikan pelunasan kepada pemberi pinjaman dengan pembayaran yang dipersyaratkan atau gagal untuk mencapai kinerja tertentu sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak, maka pemberi pinjaman akan mendapatkan hak alih bayar (*recourse*) terhadap aset dan pendapatan pemegang saham tanpa batasan. Dalam kasus pembiayaan “terbatas” atau “non-recourse”, perusahaan pemilik proyek adalah SPV dalam bentuk Perusahaan Terbatas, sehingga hak pemberi pinjaman terbatas terutama atau seluruhnya terhadap aset proyek dalam hal terjadi gagal bayar. Pembiayaan beragunan terbatas (*limited recourse finance*), yaitu pembiayaan proyek yang sebenarnya, dapat meringankan beban neraca pemilik proyek.

besar.⁹⁷ Sponsor swasta yang kurang mapan tidak mungkin mendapatkan dana dari bank-bank BUMN, dan bank swasta lokal yang lebih besar (khususnya BCA) dan bank asing sangat selektif. Sebagian besar pembiayaan hutang untuk proyek infrastruktur dilakukan melalui pinjaman korporasi, berdasarkan pada kekuatan neraca peminjam dan seringkali oleh karena adanya hubungan baik. Ini berarti bahwa: a) jumlah yang dapat dipinjam oleh sponsor swasta dibatasi oleh neraca mereka, dan b) BUMN sering memiliki keuntungan, karena bank lebih bersedia memberikan pinjaman kepada mereka karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah (mengingat perusahaan adalah milik negara).

Jangka waktu pinjaman korporasi yang pendek dan tidak adanya pembiayaan beragunan terbatas (*limited recourse*) menyulitkan investasi di bidang infrastruktur

Karena kurangnya penilaian kredit dan penataan keuangan, semua pemberi pinjaman utama dalam bentuk Rupiah bergantung pada pinjaman bergaya pinjaman korporasi senior (*senior corporate loan*) yang tidak memfasilitasi pinjaman infrastruktur. Namun demikian, jangka waktu pinjaman (*tenor*) dari pinjaman korporasi pendek (3-7 tahun), dengan kemungkinan perpanjangan sampai 10 tahun dalam kasus yang luar biasa. Ketidakcocokan jangka waktu antara jangka waktu pinjaman dan siklus hidup proyek infrastruktur menciptakan risiko tambahan untuk pembiayaan ulang (*refinancing*) hutang untuk menyebarkan pembayaran selama usia pakai aset. Selain itu, bahkan pinjaman untuk proyek-proyek tertentu umumnya mendapat hak alih bayar (*recourse*) terhadap sponsor utama, dan bukan dilakukan berdasarkan hak alih bayar terbatas (*limited recourse*). Ini sebagian karena persiapan proyek yang buruk, sebagaimana dibahas di atas, menciptakan risiko yang tidak mau ditanggung oleh bank. Selain itu, keterampilan teknis, pengalaman dan motivasi perusahaan untuk mengelola kredit pembiayaan beragunan (*recourse*) sampai batas tertentu tidak berkembang di pasar bank lokal.

Pasar obligasi merupakan sumber pembiayaan infrastruktur yang kurang dimanfaatkan

Meskipun sektor infrastruktur merupakan sumber penerbitan obligasi korporasi terbesar kedua dengan 16 persen dari total obligasi yang beredar (Gambar 65), pasar obligasi sebagian besar hanya dapat diakses oleh entitas besar dan terkenal. Proyek infrastruktur baru sejauh ini belum mampu mendapatkan pendanaan dari sumber ini kecuali jika penggalangan dana dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki aset operasional yang cukup besar. Ini karena proyek mandiri (*stand-alone*), terutama yang bersifat perintisan (*greenfield*), biasanya memiliki risiko terlalu besar bagi investor obligasi, yang cenderung lebih mudah menerima BUMN dan perusahaan yang sudah terkenal. Selain itu, akan diperlukan penataan struktur obligasi yang signifikan untuk suatu proyek mandiri untuk mengurangi sebagian besar risiko kredit sebelum dapat melakukan pinjaman di pasar modal. Namun demikian, obligasi terstruktur ini tidak umum dilakukan di Indonesia karena budaya kreditnya tidak lazim⁹⁸. Penggunaan

⁹⁷ Misalnya, sekitar 64 persen (Rp 65,5 triliun atau Rp 4,9 miliar) dari total pinjaman kepada PLN berasal dari bank lokal. Pinjaman dari Bank Mandiri, BRI dan BNI secara keseluruhan naik 49 persen (Rp 51 triliun atau USD 3,8 miliar) untuk proyek jalur cepat dan non-jalur cepat, sementara BCA menyumbang 8 persen dan 6 persen lagi oleh bank lokal yang lebih kecil.

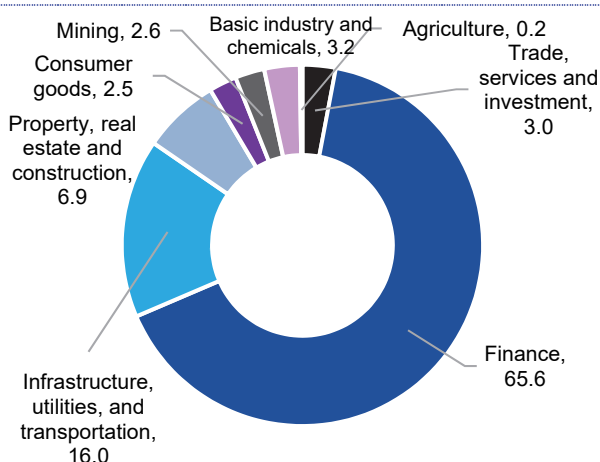
⁹⁸ Sebagian besar investor Indonesia hanya mengenal obligasi korporasi sederhana tanpa struktur yang akan meningkatkan kualitas kredit obligasi melebihi peringkat kredit perusahaan itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini, hanya ada satu penerbitan obligasi korporasi yang memiliki peningkatan kredit dalam bentuk jaminan kredit parsial.

obligasi terstruktur juga terhambat oleh tidak adanya struktur *Special Purpose Vehicle* (SPV)⁹⁹ yang dapat digunakan untuk menerbitkan obligasi proyek¹⁰⁰.

Investor lembaga dalam negeri sebagian besar fokus pada keuntungan jangka pendek...

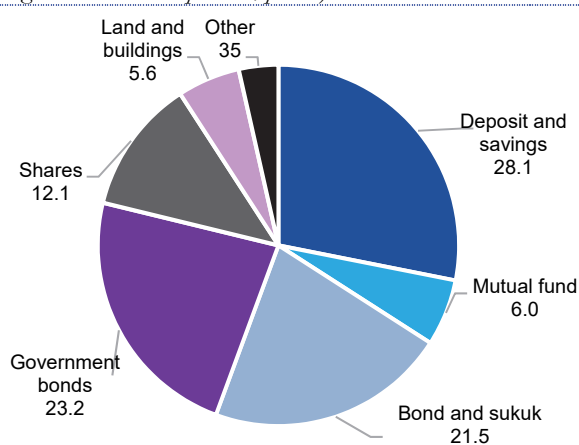
Investor lembaga (dana pensiun, jaminan sosial, dan perusahaan asuransi jiwa) dengan kewajiban jangka panjang memiliki posisi yang tepat untuk melakukan investasi infrastruktur. Namun demikian, basis kelembagaan dalam negeri di Indonesia juga kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan dengan besarnya kebutuhan pendanaan dalam negeri. Secara gabungan, besarnya dana jaminan sosial, dana pensiun swasta, industri asuransi, dan investasi kolektif mencapai Rp 1.394 triliun (12,3 persen dari PDB), atau USD 110 miliar. Aset dana pensiun (gabungan pemerintah dan swasta) adalah 5 persen dari PDB, jauh di bawah Filipina (10 persen dari PDB) dan Malaysia (40 persen dari PDB). Selain itu, sebagian besar aset investor lembaga diinvestasikan secara konservatif dengan perspektif yang relatif singkat. Misalnya, hampir 30 persen aset dana pensiun diinvestasikan dalam bentuk deposito bank (Gambar 66).

Gambar 65: Sektor infrastruktur merupakan sumber penerbitan obligasi korporasi terbesar kedua
(pangsa obligasi korporasi yang masib beredar, persen)



Sumber: Bursa Efek Indonesia (Agustus 2017)

Gambar 66: Sepertiga aset dana pensiun diinvestasikan pada deposito bank dengan keuntungan dalam jangka yang relatif pendek
(pangsa investasi dana pensiun, persen)



Sumber: OJK (Juli 2017), perhitungan staf Bank Dunia

...dan dana kelolaan (funds) infrastruktur belum banyak dikenal (gain ground), sebagian karena adanya hambatan regulasi

Investasi di bidang infrastruktur melalui dana kelolaan dapat menurunkan risiko langsung bagi investor, namun industri pendanaan di Indonesia kurang berkembang, selain reksadana. Alih-alih berinvestasi secara langsung di perusahaan yang melaksanakan proyek infrastruktur baru, investor dapat berinvestasi secara tidak langsung melalui dana yang dikelola secara profesional, yang pada gilirannya akan berinvestasi pada proyek-proyek baru atau proyek-proyek yang sudah ada. Sifat pribadi dari transaksi individual ini (yang mungkin berbentuk hutang, ekuitas atau kuasi-ekuitas) memungkinkan manajer investasi menegosiasikan dan menyusun

⁹⁹ Suatu SPV akan memungkinkan dilakukannya *ring-fencing* (transfer aset berbasis proteksi dari satu tujuan ke tujuan lainnya – pent.) dari operasi tertentu – aset atau proyek tunggal – dengan efisiensi administrasi yang tinggi (terutama efisiensi pajak), yang secara jelas terpisah dari operasi lain (aset dan kewajiban) dari pemilik proyek / sponsor. Karena struktur SPV ini tidak ada di Indonesia, suatu proyek harus dimasukkan kedalam entitas perusahaan, yang tunduk pada persyaratan yang sama seperti yang diterapkan pada perusahaan biasa.

¹⁰⁰ Ini adalah obligasi yang terkait dengan proyek tertentu dan yang pembayarannya bergantung terutama pada aliran pendapatan proyek.

kesepakatan untuk mengelola risiko dengan lebih baik. Namun demikian, meskipun pelaku sektor swasta telah berusaha untuk membangun dana kelolaan infrastruktur dalam negeri di Indonesia, namun upaya ini belum berhasil¹⁰¹, yang terlihat dari minimnya pemanfaatan dalam bentuk dana kelolaan baru atau tindak lanjut atau pertumbuhan dana kelolaan yang ada. Hal ini terutama disebabkan oleh kelemahan peraturan seperti struktur dari dana kelolaan ini, yang tidak mempergunakan standar yang diakui secara internasional, dan adanya perlakuan peraturan yang berbeda (perpajakan, jenis investasi, dan batasan) untuk berbagai jenis investor lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berusaha mengatasi kelemahan ini dengan memperkenalkan jenis dana kelolaan baru yang diakui (yaitu dana kelolaan infrastruktur), namun sejauh ini belum ada dana kelolaan yang terbentuk berdasarkan kerangka kerja baru ini.

**Sekuritisasi
dipromosikan
sebagai sarana untuk
daur ulang aset**

Sekuritisasi¹⁰² dapat menjadi cara yang efektif untuk memobilisasi investasi swasta di bidang infrastruktur, namun baru mulai berkembang di Indonesia baru-baru ini saja. Meskipun kerangka peraturan untuk sekuritisasi dalam negeri sudah ditetapkan pada tahun 2008, hanya satu jenis sekuritisasi (sekuritas berbasis hipotek) yang telah diterbitkan sampai saat ini. Sekuritisasi yang didukung oleh jenis aset lain atau entitas lain tidak terwujud, sebagian karena kurangnya motivasi ekonomi untuk melakukan sekuritisasi, namun juga karena kurangnya lingkungan yang mendukung (yaitu masalah seputar perpajakan, akunting dan kepemilikan berdasarkan hukum). Namun demikian, karena banyak BUMN mulai merasakan tekanan pada neraca mereka, sekuritisasi sekarang ini sedang diupayakan secara aktif. Pada bulan Agustus 2017, suatu sekuritisasi berbasis infrastruktur sebesar Rp 2 triliun telah diterbitkan, yang didukung oleh pendapatan di masa depan dari tol Jagorawi yang dioperasikan oleh Jasa Marga, suatu BUMN.¹⁰³ Namun demikian, tidak jelas apakah tantangan dalam lingkungan yang mendukung telah ditangani secara memadai dan menyeluruh atau tidak. Selain itu, masih belum dilakukan diversifikasi basis investor, karena sebagian besar menargetkan jumlah investor dalam negeri yang sama.

d. Upaya untuk mengurangi hambatan terhadap investasi swasta sedang dilakukan

**Inisiatif yang belum
lama ini dilakukan
oleh pemerintah
berupaya untuk
memperbaiki proses
identifikasi dan
penyiapan proyek**

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa ada hambatan terhadap keterlibatan sektor swasta di bidang infrastruktur dan telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasinya. Dari tahun 2014–2016, Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa perubahan institusional untuk memperbaiki koordinasi dan kapasitas instansi pemerintah untuk mendukung alur proses proyek-proyek KPS. Ini termasuk pembentukan Unit KPS di Kementerian Keuangan (Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur), penyusunan prosedur operasi standar untuk operasi Unit KPS, persetujuan dan pendanaan dari Fasilitas Pembangunan Proyek (PDF - *Project Development Facility*) di Kemenkeu dan

¹⁰¹ Misalnya, pada tahun 2015, dari Rp 20 triliun dari total nilai outstanding dana kelolaan yang ditengarai sebagai dana kelolaan swasta, kurang dari 5 persen yang diinvestasikan dalam portofolio ekuitas swasta yang sebenarnya. Yang lainnya diinvestasikan dalam ekuitas publik atau dibentuk sebagai proxy untuk investasi surat utang tunggal

¹⁰² Sekuritisasi mengacu pada penerbitan surat utang yang pembayarannya didukung oleh pendapatan proyek atau sekelompok proyek, tanpa adanya dukungan dari pemilik atau sponsor proyek. Dalam konteks infrastruktur, contoh di negara-negara pasar berkembang mencakup sekuritisasi arus kas di masa depan yang diterima dari biaya pemakaian untuk layanan air bersih di Kolombia dan sekuritisasi arus kas di masa depan yang diterima dari Otoritas Jalan Tol Nasional India setelah selesainya bagian tertentu dari jalan tol di India Utara.

¹⁰³ Selain itu, pada saat laporan ini disusun, sekuritisasi yang didukung oleh piutang di sektor kelistrikan diperkirakan mencapai Rp 4 triliun sedang dipersiapkan dan diharapkan segera diluncurkan.

revitalisasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). KPPIP telah melaksanakan beban tugas yang mengesankan dalam hal menerbitkan panduan, peraturan dan membantu dalam mengembangkan proyek dan mengajukannya. Pada bulan Juli 2017, KPPIP mencatat bahwa sebanyak 20 proyek dengan nilai Rp 33,5 triliun (USD 2,5 miliar) telah dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional karena telah selesai atau hampir selesai.

Upaya untuk memperbaiki lingkungan peraturan perundang-undangan untuk KPS sedang dilakukan

Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah untuk mengklarifikasi dan merampingkan rezim hukum. Pada bulan Maret 2015, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No. 38/2015 untuk memperkenalkan perubahan-perubahan penting terhadap peraturan pelaksanaan PPP di Indonesia, mis. memperluas jenis infrastruktur yang dapat dikembangkan melalui skema KPS, memperkenalkan mekanisme penunjukan langsung dan memperluas jenis skema pengembalian investasi yang dapat diadopsi dalam proyek infrastruktur. Diskusi tentang peningkatan Perpres 38/2015 sedang berlangsung, yang dapat menambah kejelasan rezim hukum PPP jika diundangkan. Penting bagi peraturan baru untuk menetapkan sistem identifikasi proyek yang komprehensif di tingkat GCA, dimana proyek yang paling menarik bagi sektor swasta (atau yang paling diuntungkan dari keterlibatan sektor swasta) dimasukkan melalui proses K3 yang rinci. . Pedoman internasional seperti Pedoman UNCITRAL tentang Undang-undang Kemitraan Publik-Swasta / Konsesi, Prinsip Inti EBRD untuk Undang-Undang Konsesi Modern dan Prinsip-prinsip OECD untuk Pemerintahan Publik Kemitraan Publik-Swasta, juga harus dipertimbangkan saat mempersiapkan rancangan Undang-Undang Infrastruktur.

Kriteria yang jelas dalam mengalokasikan proyek antara sektor publik dan swasta diperlukan

Terlepas dari kemajuan yang signifikan, Indonesia masih berjuang dengan membuat sebuah proses yang secara efektif akan menyaring proyek secara terpadu sehingga cara penyampaian optimal dipilih berdasarkan karakteristik proyek dan juga tujuan Pemerintah Indonesia. Untuk itu, penyesuaian tertentu sepanjang siklus proyek identifikasi proyek dan persiapan proyek dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan proyek PPP yang sesuai ke pasar. Untuk memulai, GCA perlu dilatih dalam skrining proyek, persiapan OBC, dan penilaian awal, sehingga pipa proyek mengembangkan proyek yang lebih kuat. Bappenas dan Unit KPS Depkeu adalah institusi pemerintah pusat yang berada di posisi terbaik untuk membantu GCA dalam hal ini. Secara khusus, Depkeu harus berfokus pada penerapan nilai untuk penilaian uang (lihat Kotak 9) di tingkat GCA dan pemerintah pusat. Langkah selanjutnya mencakup kriteria yang jelas untuk GCA yang proyeknya paling tepat untuk dijadikan PPP, mensosialisasikan kriteria untuk membangun kapasitas PPP di tingkat departemen atau pemerintah daerah, dan menerapkan proses sistematis untuk mempekerjakan penasihat profesional untuk memastikan bahwa proyek tersebut terstruktur agar menarik bagi sektor swasta. (see

Kotak 9: Menilai 'nilai uang' proyek KPS

Istilah 'value for money' digunakan di Inggris dalam kaitannya dengan beberapa tes berbeda berdasarkan penilaian strategis, ekonomi, komersial dan finansial. Ini mengacu pada konsep umum untuk memberikan tingkat layanan yang baik untuk uang yang dikeluarkan, dan terkadang dengan perbandingan teknis spesifik pilihan pembiayaan / kontrak alternatif.

Alat yang menonjol saat menilai nilai uang dari proyek PPP melibatkan perbandingan opsi PPP dengan proyek referensi sektor publik, yaitu 'kompiler sektor publik' (PSC). Alat spreadsheet PSC dikembangkan oleh HM Treasury dan telah banyak disalin ke seluruh dunia. PSC membandingkan biaya penawaran sekarang bersih untuk proyek KPS terhadap bentuk pengiriman yang paling efisien sesuai dengan proyek referensi sektor publik yang dibeli secara tradisional. Dengan demikian, PSC berfungsi sebagai biaya pengiriman risiko yang disesuaikan dengan risiko hipotetis proyek. Namun, memastikan ketahanan PSC sulit dilakukan, dan mungkin terbuka untuk manipulasi untuk memperkuat atau melemahkan kasus PPP (misalnya tergantung pada tingkat diskonto yang dipilih atau nilai yang dikaitkan dengan risiko yang ditransfer).

Selain aspek kuantitatif yang biasanya disertakan dalam komparator sektor publik yang 'keras', nilai uang mencakup aspek kualitatif dan biasanya melibatkan unsur penghakiman dari pihak pemerintah.

Menerapkan nilai untuk penilaian uang akan memperbaiki kualitas PPP yang telah ada dalam perencanaan

Namun, memobilisasi sejumlah besar investasi swasta masih memerlukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan adanya proyek terencana dan disiapkan dengan baik yang menarik sektor swasta. Meskipun Pemerintah Indonesia memiliki banyak elemen dalam program PPP yang sukses, penyesuaian tertentu sepanjang siklus proyek identifikasi proyek dan persiapan proyek dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan proyek PPP yang sesuai ke pasar. Penting untuk mengembangkan pendekatan terpadu terhadap infrastruktur yang secara agnostik mengintegrasikan jalur karya umum masyarakat, trek BUMN, dan jalur PPP, dan mengurangi kelemahan setiap jalur. Proyek yang mewakili nilai uang paling banyak bagi masyarakat pada umumnya harus dikembangkan, dan nilai relatif untuk uang harus menentukan jalur pengadaan apa yang dipilih. Kotak 10 mengilustrasikan contoh daftar periksa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi mode pengiriman yang paling relevan untuk proyek infrastruktur.

Kotak 10: Daftar periksa untuk mengidentifikasi moda pelaksanaan proyek yang paling relevan untuk proyek infrastruktur

Ukuran dan profil proyek:

- Apakah ada pengeluaran modal awal yang besar dan waktu pengembalian yang panjang?
- Apakah ukuran proyek memiliki pembenaran bagi masalah hukum, biaya, teknis, dan finansial dari moda pelaksanaan pembangunannya?
- Apakah dengan adanya peningkatan kualitas dalam tahap perancangan dan konstruksi dapat menghasilkan penghematan selama tahap operasi proyek?
- Apakah penghematan tersebut memiliki pembenaran bagi biaya transaksi tambahan yang ada dalam penggabungan (*bundling*) kontrak konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam satu kontrak?

Pendapatan dan pemakaian:

- Apakah biaya pemakaian dapat dikenakan, apakah harganya terjangkau bagi sebagian besar pemakai, dan apakah hal ini dapat diterima secara politis?
- Apakah biaya pemakaian mencukupi untuk menutup sebagian besar biaya modal dan operasional?
- Apakah pemakaian dapat dipantau?

Kualitas:

- Apakah kuantitas dan kualitas keluaran atau hasil proyek dapat secara efisien ditentukan dan diukur?
- Apakah inovasi desain dibutuhkan untuk mencapai peningkatan efisiensi dan nilai yang sepadan dengan biayanya (*value for money*)?

Ketidakpastian dan risiko:

- Berapakah tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kondisi teknologi masa depan?
- Risiko apa yang masing-masing sektor (publik vs swasta) paling mampu mempengaruhi dan mengelola?
- Apakah permintaan (*demand*) relatif dapat diprediksi selama masa proyek?
- Siapa yang paling baik ditempatkan untuk mempengaruhi permintaan layanan berbasis infrastruktur?
- Apakah sektor swasta bersedia dan mampu menanggung sebagian atau seluruh risiko permintaan?
- Apakah ada risiko integritas tertentu dalam hal korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya yang patut mendapat perhatian?

Persaingan:

- Apakah akan ada cukup banyak peserta lelang yang memenuhi syarat dalam hal proyek KPS / konsesi untuk memastikan adanya proses pelelangan yang kompetitif?

Pemerintah telah melakukan upaya untuk menarik modal swasta

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah telah berusaha membuat kemajuan dalam upaya menarik modal swasta. Upaya ini mencakup (i) mengizinkan kepemilikan asing yang lebih besar di sektor-sektor tertentu, dan dalam beberapa kasus memperkenankan partisipasi sektor swasta secara penuh, misalnya di jalan tol; (ii) menerapkan peraturan mengenai percepatan pembebasan tanah¹⁰⁴; (iii) mengizinkan KPS untuk menggunakan fasilitas pembayaran ketersediaan layanan (*availability payments*)¹⁰⁵; dan (iv) berusaha untuk menangani keseluruhan koordinasi pembangunan infrastruktur nasional dengan membentuk badan koordinasi terpusat untuk perizinan, pengembangan KPS dan penyelesaian proyek strategis dan prioritas. Selanjutnya, Kemenkeu (melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, DJPPR) telah membentuk berbagai instrumen pembiayaan seperti Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (*Viability Gap Fund*), Fasilitas Pembangunan Proyek

¹⁰⁴ Undang-Undang Pembebasan Tanah No.2/2012, Perpres No.71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (operasional di tahun 2015)

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Keuangan PMK no. 190/PMK.08/2015

(*Project Development Facility*) dan Jaminan Infrastruktur (lihat Kotak 8 sebelumnya). Pemerintah juga telah meluncurkan suatu skema untuk memobilisasi pembiayaan dari investor lembaga dalam negeri (Kotak 11).

Kotak 11: Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memobilisasi pembiayaan dari investor lembaga dalam negeri

Di awal tahun 2017, Pemerintah Indonesia meluncurkan suatu skema yang disebut Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) untuk memanfaatkan, antara lain, dana pensiun yang dikelola dan dana asuransi untuk mendukung pengembangan proyek infrastruktur strategis, terutama melalui pembiayaan ekuitas proyek. Untuk menarik dana PINA, proyek harus mendukung target prioritas pembangunan nasional, memiliki manfaat sosial dan ekonomi, secara komersial layak, dan memenuhi kriteria kesiapan.

Berdasarkan tersebut, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI, perusahaan pembiayaan infrastruktur milik negara) dan PT TASPEN, perusahaan dana pensiun milik pemerintah daerah, telah melakukan investasi bersama pada tahap awal portofolio perusahaan jalan tol. Pada bulan Februari 2017, Jalan Tol Waskita menerima ekuitas senilai Rp 3,5 triliun (USD 264 juta) dengan skema PINA ini. Ekuitas senilai Rp1,5 triliun selanjutnya sedang dalam tahap finalisasi untuk Bandara Kertajati di Jawa Barat, sehingga total realisasi investasi berdasarkan skema PINA ini menjadi Rp 5 triliun.

Diperlukan adanya pengembangan lebih lanjut dari pasar perbankan dan pasar modal lokal untuk memobilisasi investasi sektor swasta di bidang infrastruktur

Untuk dapat memobilisasi lebih banyak pembiayaan dari pasar modal untuk infrastruktur, diperlukan adanya upaya lebih lanjut untuk (i) meningkatkan tabungan menjadi investasi jangka panjang, (ii) mengatasi kelemahan produk pasar modal yang tersedia untuk menyalurkan dana ke sektor infrastruktur, dan (iii) mendorong partisipasi investor asing. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan insentif menjadi tabungan jangka panjang, seperti mengenakan denda pajak untuk penarikan awal, mempermudah proses pengalihan tabungan pensiun jika terjadi perubahan pekerjaan, dan memperkenalkan “pilihan investasi baku (default)” berbasis usia bagi mereka yang tidak ingin membuat pilihan investasi mereka sendiri untuk mendorong durasi investasi yang lebih tepat bagi tabungan. Selain itu, kebijakan harus diubah untuk mendorong investasi jangka panjang yang tepat oleh investor lembaga. Ini harus mencakup tinjauan peraturan tentang pengelolaan kewajiban (liability), pengukuran kinerja, dan pengelolaan risiko investor lembaga. Harus diberlakukan suatu kerangka kerja pelaporan dan pengukuran kinerja yang tepat dengan menggunakan tolok ukur portofolio jangka panjang yang sesuai dengan struktur tanggung jawab dana pensiun atau dana jaminan sosial, daripada dengan target kinerja jangka pendek. Sementara itu, mengingat sumber pembiayaan dalam negeri saat ini kecil, harus dilakukan upaya agar Rupiah menarik dan dapat menjadi ajang investasi bagi investor asing. Hambatan bagi partisipasi investor asing di pasar dalam negeri dan penerbitan obligasi global dengan denominasi Rupiah harus diatasi. Selain itu, mungkin ada cara untuk mengenalkan dana infrastruktur yang berfokus pada Indonesia di mana investor internasional dan dalam negeri dapat berinvestasi secara bersama-sama.

Pendekatan yang seimbang antara BUMN dan sektor swasta akan membantu memastikan bahwa sumber daya dimaksimalkan dengan sangat efisien

Sementara BUMN akan tetap menjadi bagian inti dari lansekap pembangunan infrastruktur Indonesia di masa mendatang, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan daya saing, transparansi dan efisiensi di sektor-sektor di mana BUMN mendominasi untuk dapat memanfaatkan investasi swasta untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, model yang ada saat ini dengan menggunakan BUMN sebagai wahana utama untuk pembangunan infrastruktur harus dinilai untuk memastikan bahwa sumber daya dapat dimaksimalkan dengan cara yang paling efisien. Misalnya, jika BUMN mengembangkan proyek yang secara komersial layak untuk sektor swasta, BUMN tersebut sesungguhnya mengganti sumber pembiayaan eksternal untuk infrastruktur.

Jika BUMN memperoleh manfaat dari dukungan publik dalam berbagai bentuk, sumber daya publik yang terbatas sedang digunakan di mana sebenarnya sektor swasta dapat membiayai proyek-proyek tersebut.

Transparansi dan efisiensi yang lebih besar di sektor-sektor di mana BUMN mendominasi akan menciptakan ruang bagi keterlibatan sektor swasta

Mengingat kebutuhan investasi infrastruktur yang sangat besar, pendekatan dengan cara yang pragmatis menuntut BUMN dan sektor swasta untuk mengisi kesenjangan pembiayaan dan memberikan efisiensi yang lebih tinggi untuk pengiriman dan operasi. Hal ini mensyaratkan adanya penurunan dominasi BUMN melalui pembukaan sektor untuk persaingan, meninggalkan atau mereformasi proses penunjukan langsung untuk memungkinkan proses penyaringan yang lebih ketat dan transparan berdasarkan pada kriteria yang jelas, dan, jika memungkinkan, menghilangkan monopoli di sektor dan membiarkan para pelaku sektor swasta bersaing dengan monopoli BUMN untuk menciptakan persaingan pasar. Peningkatan batasan anggaran juga diperlukan untuk menanamkan disiplin keuangan yang lebih besar bagi BUMN dan untuk menciptakan kesetaraan dalam persaingan (*level playing field*) dengan sektor swasta. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa sistem kewajiban pelayanan publik (*public service obligation* - PSO) meminimalkan kemungkinan kompensasi yang berlebihan dan kurang untuk pemberian layanan, mendorong BUMN untuk mencari modal ekuitas sesuai dengan persyaratan pasar dari pasar modal, menghapus penggunaan subsidi yang secara implisit diberikan, dan mengembangkan kebijakan dividen yang formal.

Pemerintah Indonesia telah memulai suatu program untuk menarik investasi ke aset BUMN

Salah satu perkembangan nyata dan menjanjikan adalah program ambisius dari Kementerian BUMN untuk meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastrukturnya. Kementerian BUMN telah mengidentifikasi lebih dari 80 proyek dengan perkiraan investasi sekitar USD 70 miliar melalui investasi langsung, IPO, obligasi, dan sekuritisasi untuk memobilisasi lebih banyak pembiayaan komersial untuk infrastruktur. Agar program ini sukses, BUMN harus siap untuk bermitra dengan perusahaan swasta. Selain memastikan penataan struktur setiap proyek, BUMN harus menerapkan praktik tata kelola yang baik. Investor akan melakukan uji kelayakan (*due diligence*) terhadap BUMN, dan menghendaki agar standar dan persyaratan tata kelola perusahaan dasar diarahkan untuk mendapatkan tingkat efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Untuk memahami persyaratan calon mitra swasta, Kementerian BUMN harus terlibat lebih awal dan seringkali terlibat dengan sektor swasta, dengan mengupayakan pasar yang terbuka dan transparan. Selain pembiayaan, sektor swasta dapat memberikan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman operasional, meningkatkan efisiensi dan memberi kenyamanan yang lebih besar kepada pemodal. Keberhasilan beberapa struktur ini akan berjalan seiring dengan masuknya operasi sektor swasta, misalnya melalui investor ekuitas atau melalui kontrak perəkayasaan, pengadaan dan konstruksi (EPC) berbasis kinerja dan/atau kontrak operasi dan pemeliharaan (O&M).

Catatan ini menjelaskan beberapa kendala untuk mencapai pembiayaan maksimum untuk pembangunan infrastruktur dengan memobilisasi investasi sektor swasta. Sementara proses perencanaan dan pengadaan proyek yang terkoordinasi dengan baik, partisipasi BUMN yang seimbang, kerangka hukum dan peraturan yang kondusif dan pasar modal lokal yang berfungsi dengan baik sangatlah penting, ada banyak permasalahan lain di luar cakupan catatan saat ini yang juga harus ditangani. Ini termasuk perlindungan lingkungan dan sosial, dan tantangan khusus sektor. Kelompok Bank Dunia saat ini sedang memberi pendampingan kepada Pemerintah Indonesia mengenai penilaian sektor infrastruktur dengan fokus pada memobilisasi pembiayaan sektor swasta. Peta jalan akan dipresentasikan kepada Pemerintah Indonesia dengan rincian solusi untuk hal-hal tersebut di atas dan kendala lainnya dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

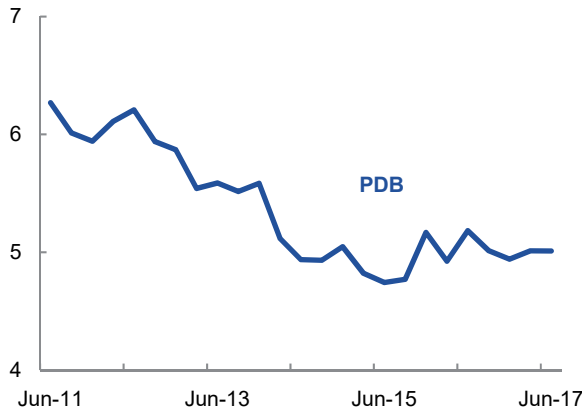
Referensi

- ADB. 2017. *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. Philippines: Asian Development Bank.
<https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf>
- Allen Consulting Group and the University of Melbourne. 2007. "Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia." *Report to Infrastructure Partnerships Australia*. The Allen Consulting Group, Melbourne.
- Aschauer, D. A. 1989. "Is public expenditure productive?" *Journal of Monetary Economics* 23(2): 177-200.
- Bappenas. 2014. "Prioritas Kedaulatan Energi dan Infrastruktur, RPJMN 2015-19". Presentation, December 2014. https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16611/4981/
- _____. 2017. *Public Private Partnerships: Infrastructure Project Plan in Indonesia*. Jakarta.
https://www.bappenas.go.id/files/9314/8767/3599/PPP_BOOK_2017.pdf
- Bank Indonesia. 2017. *Quarterly Balance of Payment Report: Realization*. August. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2017 "Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Mendukung Pengendalian Inflasi." Press release, July 27 2017. http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_195517.aspx
- Bank of Japan. 2017. Statement on Monetary Policy, July 20 2017.
https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2017/k170720a.pdf
- Burger, P., and H. Ian. 2011. "How to Attain Value for Money: Comparing PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement." OECD. *Journal on Budgeting*, Volume 2011/1.
- CNBC. July 27, 2017. "Big oil reports could put the brakes on the earnings-fueled rally".
<https://www.cnbc.com/2017/07/27/big-oil-reports-could-put-the-brakes-on-the-earnings-fueled-rally.html>
- Directorate General of Budget Financing and Risk Management. 2017. Press Release, Government Debt Securities Auction Plan on August 22, 2017.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/KP_DJPPR_LelangSUN-220817_eng.pdf
- EIU. 2017. "Indonesia economy: Quick View – Inflation picks up on the back of Ramadan, June 7th".
http://viewswire.eiu.com.libproxy-wb.imf.org/index.asp?layout=VWArticleVW3&article_id=485513432
- IMF. 2017. "Estimating the stock of public capital in 170 countries, January 2017".
https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/pdf/csupdate_jan17.pdf
- Indonesia Investments. 2017. "Opinion Piece: Is Indonesia's Purchasing Power Actually Weak, August 02, 2017?". <https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/opinion-piece-is-indonesia-s-purchasing-power-actually-weak/item8055>
- Kementerian Keuangan. January 25, 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/ini-enam-langkah-strategis-pemerintah-dan-bi-untuk-jaga-inflasi-2017>.
- Ligthart, E., P. Bom. 2009. How Productive is Public Capital ? A Meta-Regression Analysis. International Studies Program. Atlanta, Georgia State University.
<http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0912.pdf>

- Moody's Investor Service. 2017. "Moody's: Thailand and Indonesia show high levels of restructured loans, but loss buffers strong, August 24, 2017". https://www.moodys.com/research/Moodys-Thailand-and-Indonesia-show-high-levels-of-restructured-loans--PR_371593
- Price Waterhouse Cooper. 2016. *Indonesian Infrastructure: STabel Foundations for Growth*. Second Edition. <https://www.pwc.com/id/en/cpi/asset/indonesian-infrastructure-sTabel-foundations-for-growth.pdf>
- Sahoo, Pravakar; Dash, Ranjan Kumar; Nataraj, Geethanjali. 2010. 'Infrastructure development and economic growth in China' IDE Discussion Paper No. 261. Institute of Developing Economies.
- Salaam Gateway. April 02, 2017. http://www.salaamgateway.com/en/story/indonesia_pushing_early_beef_imports_ahead_of_ramadan_will_review_process_for_india_buffalo_meat_-salaam02042017164159/
- Seneviratne, Dulani and Sun, Yan. February. 2013. *Infrastructure and Income Distribution in ASEAN-5: What are the Links?*. IMF Working Paper. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1341.pdf>
- The Guardian. August 9, 2017. "Markets fall after Trump threatens North Korea with 'fire and fury'- as it happened". <https://www.theguardian.com/business/live/2017/aug/09/markets-rattled-us-north-korea-tensions-trump-fire-and-fury-business-live>
- The New York Times. August 13, 2017. <https://www.nytimes.com/2017/08/13/business/economy/japan-second-quarter-gdp-rises.html?mcubz=0>
- Xinhuanet. July 17, 2017. "Thai urges gov't agencies to speed up rubber purchase". http://news.xinhuanet.com/english/2017-07/17/c_136450651.htm
- World Bank. 2013. *Indonesia Economic Quarterly: Continuing Adjustment*. October 2013. Jakarta: World Bank
- _____. 2014. *Indonesia Economic Quarterly: Hard choices*. October 2014. Jakarta: World Bank
- _____. 2017a. *Indonesia Economic Quarterly: Staying the course*. March 2017. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017b. *Commodity Market Outlook*. April 2017. Washington, DC: World Bank
- _____. 2017c. *Global Economic Prospects: A Fragile Recovery*. June 2017. Washington, DC: World Bank
- _____. 2017d. *Indonesia Economic Quarterly: Upgraded*. June 2017. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017e. "Key Legal and Regulatory Constraints on PPP Projects and the PPP Framework in Indonesia". 31 July 2017. Jakarta: World Bank.
- _____. 2017f. *Infrastructure Assessment Program*. September 2017. Mimeo. Washington, DC: World Bank

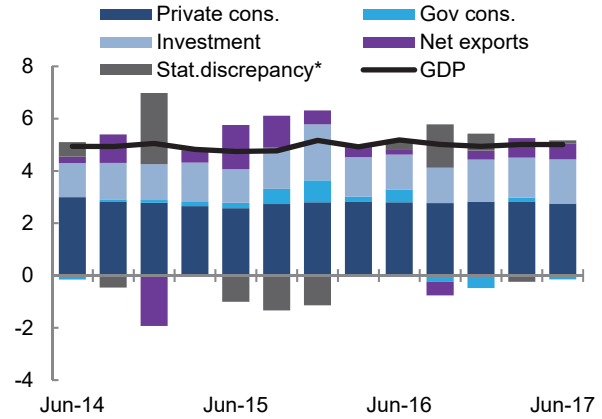
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB riil
(*pertumbuhan triwulanan yoy, persen*)



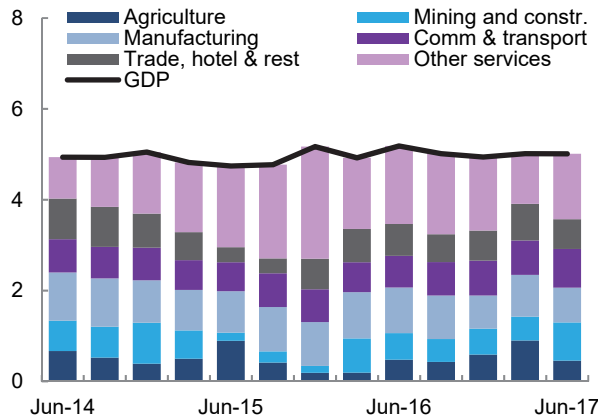
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



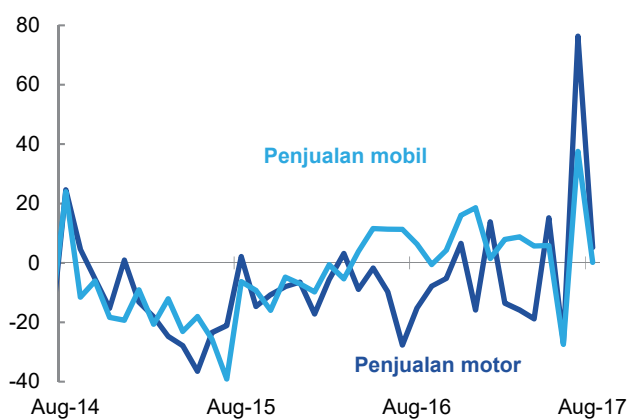
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia
Catatan: * sudah termasuk perubahan inventori.

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(*kontribusi terhadap pertumbuhan PDB riil yoy, poin persentase*)



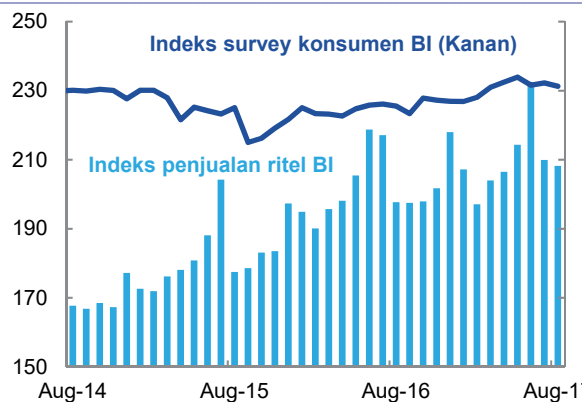
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor
(*pertumbuhan yoy, persen*)



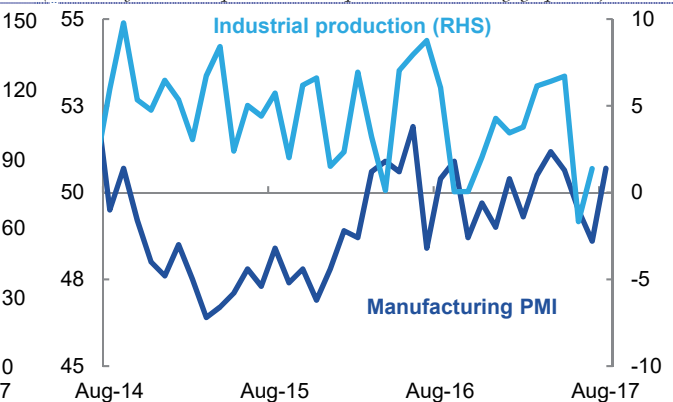
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(*tahun dasar penjualan eceran 2010=100*)



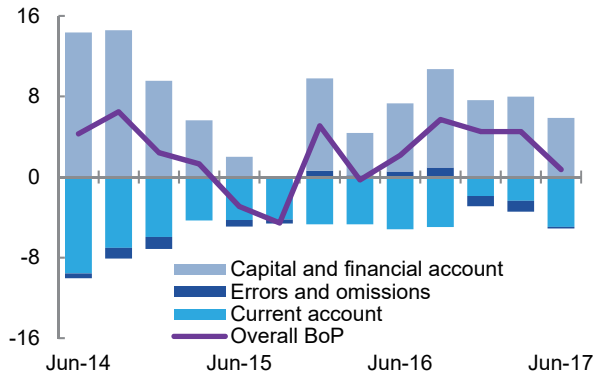
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri dan Manufaktur PMI
(*indeks difusi PMI; pertumbuhan produksi industri yoy, persen*)



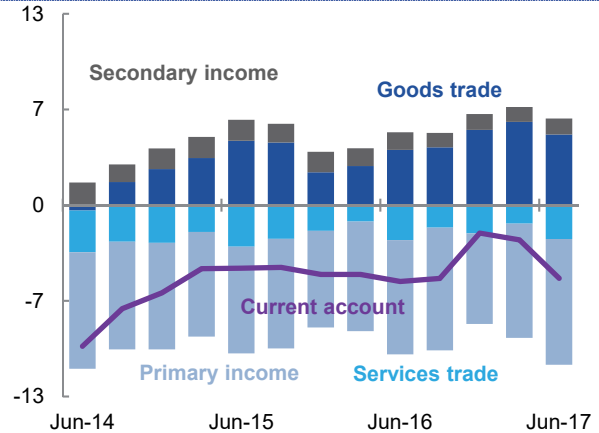
Sumber: BPS; Nikkei/Markit; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran
(USD miliar)



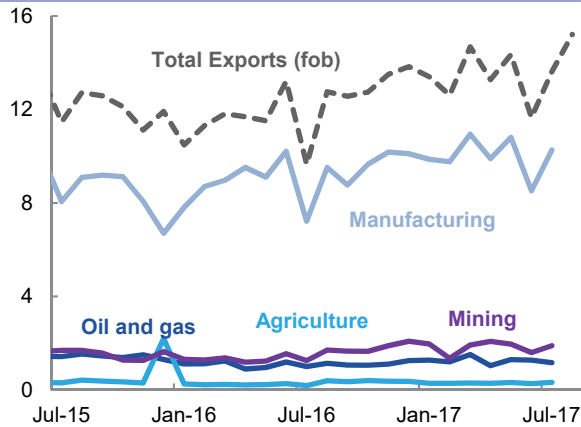
Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan
(USD miliar)



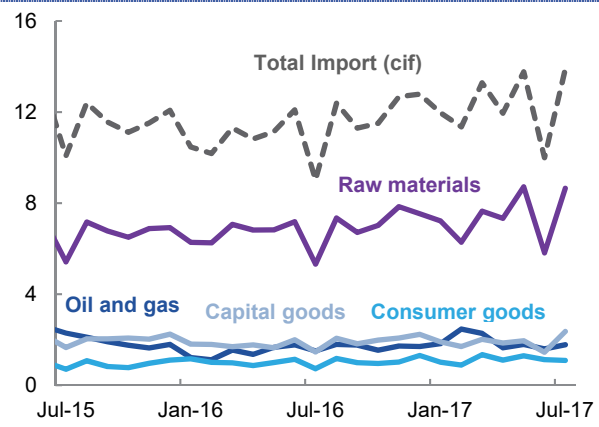
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(USD miliar)



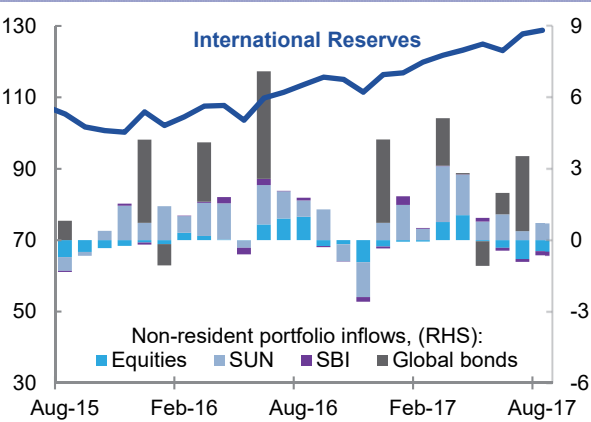
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(USD miliar)



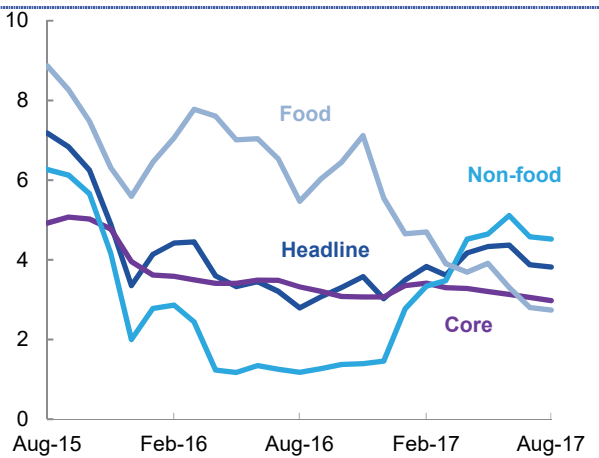
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal
(USD miliar)



Sumber: BI; Kemenkeu
Catatan: SUN adalah Surat Utang Negara, SBI adalah sertifikat Bank Indonesia

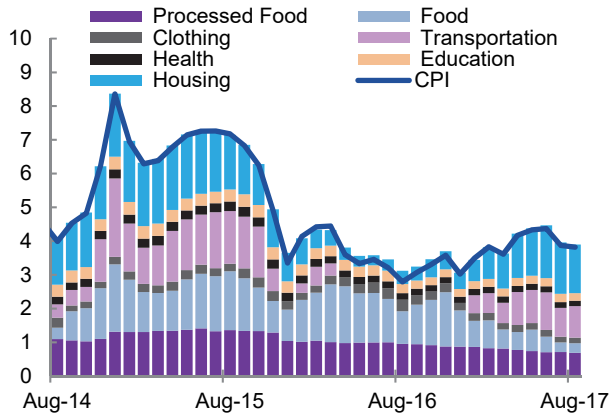
Lampiran Gambar 12: Inflasi
(pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian IHK bulanan

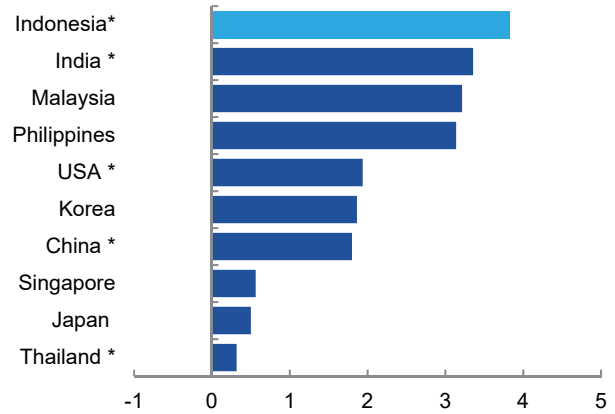
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara

(pertumbuhan yoy, persen)

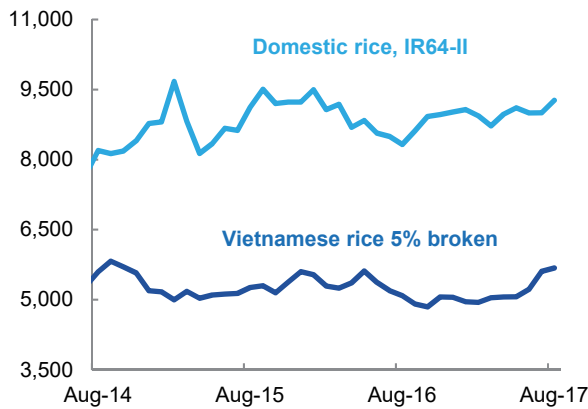


Sumber: BPS; CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: *Data Agustus 2017; yang lain Juli.

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional

(harga grosir, IDR per kg)

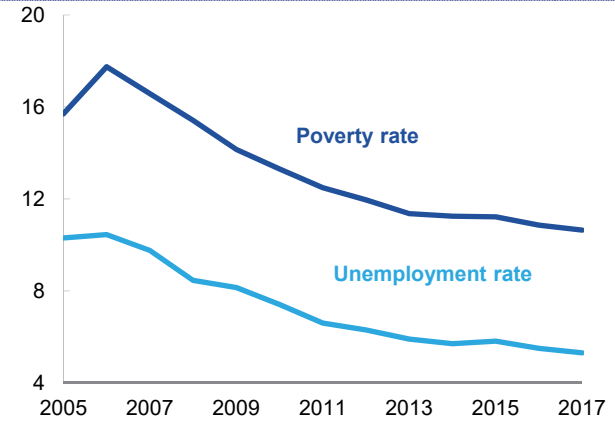


Sumber: Cipinang wholesale rice market; FAO

Catatan: "5% broken" mengacu pada kualitas penggilingan beras. 5 persen merupakan proporsi biji pecah selama proses penggilingan.

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran

(persen)



Sumber: BPS

Catatan: Garis kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional

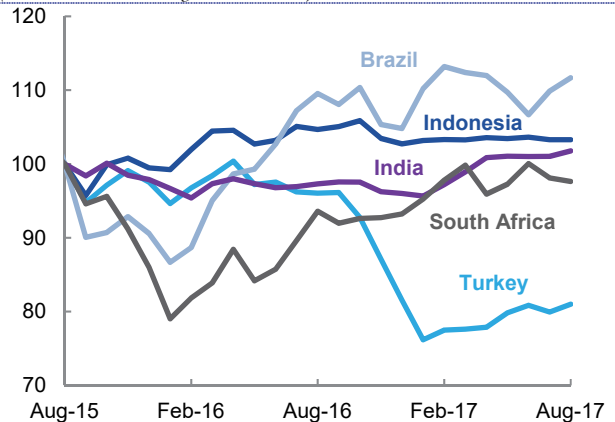
(indeks harian, June 5, 2015=100)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

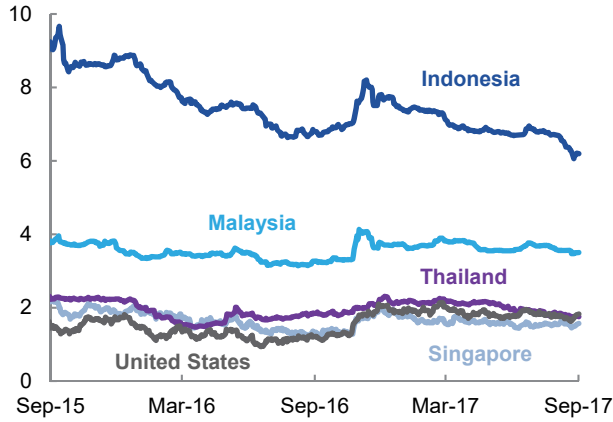
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS

(indeks bulanan, May 2015=100)



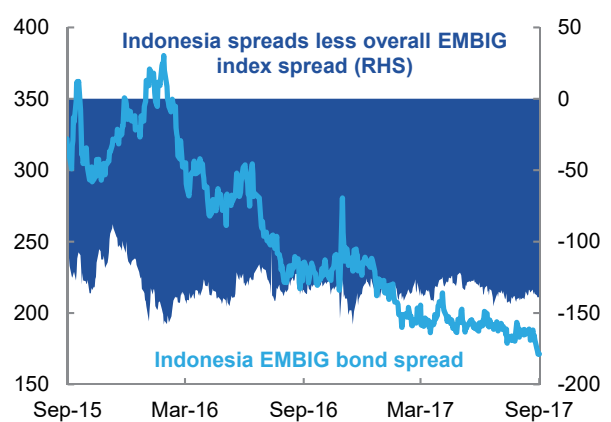
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal (persen)



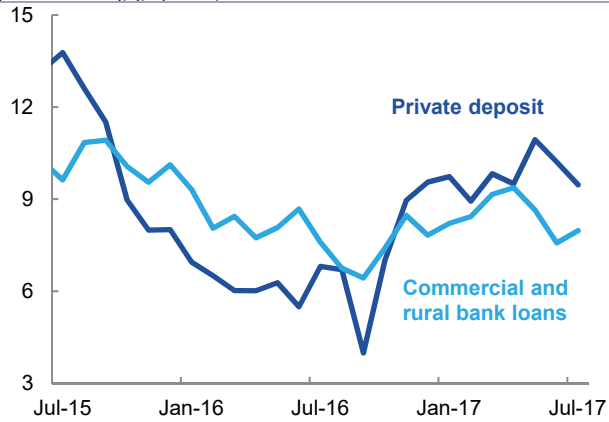
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS terhadap kelompok negara-negara EMBIG Global (basis poin)



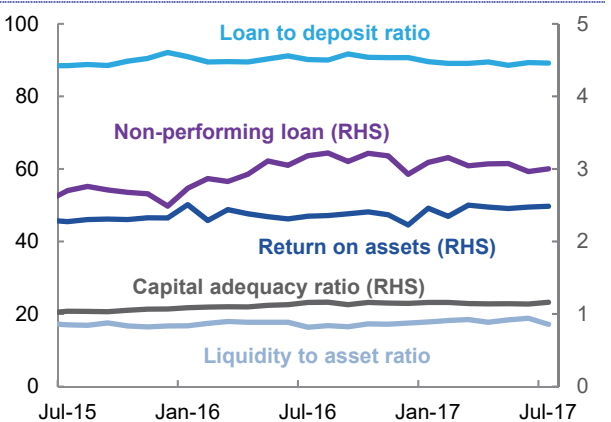
Sumber: JP Morgan

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito (pertumbuhan yoy, persen)



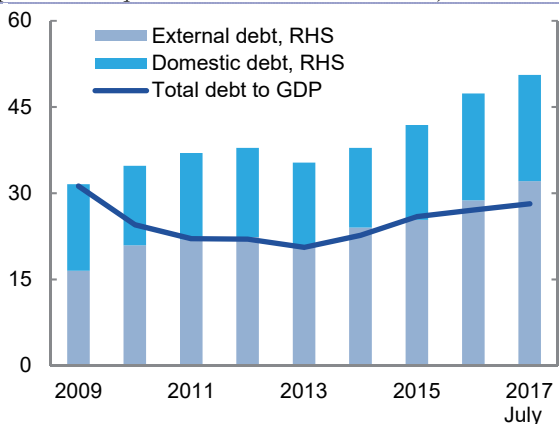
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan (persen)



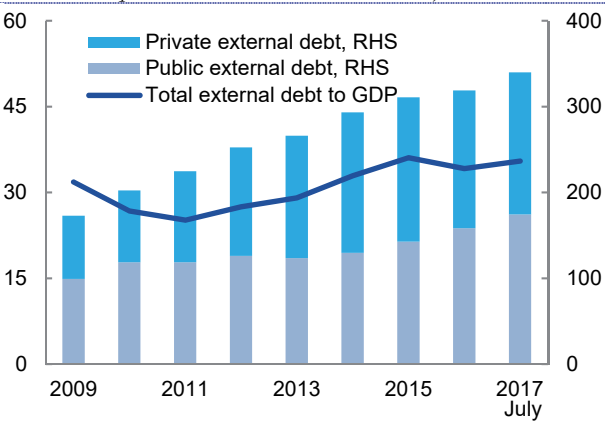
Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah (persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan)



Sumber: BI; MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri (persen terhadap PDB, Kiri; USD miliar, Kanan)



Sumber: BI; Perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan proyeksi anggaran belanja Pemerintah

(IDR triliun)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN
A. Penerimaan dan hibah	1,211	1,338	1,439	1,550	1,508	1,556	1,736
1. Penerimaan pajak	874	981	1,077	1,147	1,240	1,285	1,473
2. Penerimaan non-pajak	331	352	355	399	256	262	260
B. Pengeluaran	1,295	1,491	1,651	1,777	1,807	1,864	2,133
1. Pemerintah pusat	884	1,011	1,137	1,204	1,183	1,154	1,367
2. Transfer ke pemerintah daerah	411	481	513	574	623	710	766
C. Neraca utama	9	-53	-99	-93	-142	-126	-178
D. SURPLUS / DEFICIT	-84	-153	-212	-227	-298	-308	-397
(persen dari PDB)	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-1.6	-2.9

Sumber: MoF; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: Budget balance sebagai persentase dari PDB menggunakan PDB yang direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran

(USD miliar)

	2014	2015	2016	2015	2016					2017	
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	
Neraca Pembayaran	15.2	-1.1	12.1	5.1	-0.3	2.2	5.7	4.5	4.5	4.5	0.7
<i>Persen dari PDB</i>	1.7	-0.1	1.3	2.4	-0.1	0.9	2.3	1.9	1.9	1.9	0.3
Neraca berjalan	-27.5	-17.5	-16.9	-4.7	-4.7	-5.2	-5.0	-1.9	-2.4	-2.4	-5.0
<i>Persen dari PDB</i>	-3.1	-2.0	-1.8	-2.2	-2.2	-2.2	-2.0	-0.8	-1.0	-1.0	-2.0
Neraca perdagangan	-3.0	5.4	8.5	0.5	1.5	1.4	2.4	3.2	4.4	4.4	2.5
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-24.5	-22.9	-25.2	-5.2	-6.2	-6.6	-7.4	-5.1	-6.8	-6.8	-7.4
Neraca modal & keuangan	44.9	16.9	28.8	9.2	4.2	6.8	9.8	7.6	8.0	8.0	5.9
<i>Persen dari PDB</i>	5.0	2.0	3.1	4.3	1.9	2.9	4.0	3.2	3.3	3.3	2.3
Investasi langsung	14.7	10.7	15.9	2.8	2.8	3.3	6.5	3.3	2.8	2.8	4.6
Investasi porfolio	26.1	16.2	19.0	4.3	4.4	8.3	6.6	-0.3	6.6	6.6	7.4
Investasi lain	4.3	-10.1	-6.2	2.3	-3.1	-4.7	-3.2	4.8	-1.3	-1.3	-6.2
Kesalahan & pembulatan	-2.2	-0.4	0.1	0.6	0.2	0.5	0.9	-1.0	-1.1	-1.1	-0.2
Cadangan devisa*	111.9	105.9	116.4	105.9	107.5	109.8	115.7	116.4	121.8	121.8	123.1

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode

Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Neraca Nasional (% perubahan)¹								
PDB riil	4.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0	4.9	5.0
Investasi riil	11.4	8.5	8.9	9.1	5.0	4.4	5.0	4.5
Konsumsi riil	4.6	4.1	5.1	5.4	5.7	4.7	4.9	4.3
Swasta	3.7	4.8	5.1	5.5	5.5	5.3	4.8	5.0
Pemerintah	14.2	0.3	5.5	4.5	6.7	1.2	5.3	-0.1
Ekspor riil, barang dan jasa	30.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.1	-2.1	-1.7
Impor riil, barang dan jasa	26.6	17.3	15.0	8.0	1.9	2.1	-6.4	-2.3
Investasi (% PDB)	20	31	31	33	5.0	4.4	5.0	4.5
Nominal PDB (milyar dolar AS)	165	755	893	918	915	891	861	933
PDB per kapita (dolar AS)	857	3,167	3,688	3,741	3,668	3,532	3,371	3,603
Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)²								
Penerimaan dan hibah	20.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7	13.1	12.5
Penerimaan bukan pajak	9.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8	2.2	2.1
Penerimaan pajak	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9	10.8	10.4
Pengeluaran	22.4	15.2	16.5	17.3	17.3	16.8	15.7	15.0
Konsumsi	4.0	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0	4.5	4.6
Modal	2.6	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4	1.9	1.4
Bunga pinjaman	5.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5
Subsidi	6.3	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7	1.6	1.4
Surplus/defisit	-1.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.1	-2.6	-2.5
Utang Pemerintah	97.9	24.5	23.1	23.0	24.9	24.7	27.4	28.3
Utang luar negeri pemerintah	51.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2	11.9	11.3
Total utang luar negeri (juga utang swasta)	87.1	26.8	25.2	27.5	29.1	32.9	36.1	34.2
Neraca Pembayaran (% PDB)³								
Neraca pembayaran keseluruhan	..	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7	-0.1	1.3
Neraca transaksi berjalan	4.8	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-1.8
Ekspor, barang dan jasa	42.8	22.0	23.8	23.0	22.5	22.3	19.9	18.0
Impor, barang dan jasa	33.9	19.2	21.2	23.2	23.2	22.7	19.3	17.1
Transaksi berjalan	8.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3	0.6	0.9
Neraca transaksi keuangan	..	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0	2.0	3.0
Penanaman modal langsung, neto	-2.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	1.7
Cadangan devisa bruto (USD billion)	29.4	96	110	113	99	112	106	116
Moneter (% change)³								
Deflator PDB ¹	20.4	8.3	7.5	3.8	5.0	5.4	4.0	2.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	6.3	4.8
Kredit domestik	..	22.8	24.6	23.1	21.6	11.6	10.4	7.9
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) ⁴	8,392	9,087	8,776	9,384	10,460	11,869	13,389	13,309
Harga-harga (% perubahan)¹								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.4	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4	3.4	3.0
Indeks harga konsumen (rata-rata)	3.7	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4	6.4	3.5
Harga minyak mentah Indonesia (US\$ per barel) ⁵	28	79	112	113	107	60	36	51

Sumber: 1 BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dan rebased, 2 MoF dan Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator perkembangan Indonesia

	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kependudukan¹								
Penduduk (juta)	213	242	245	248	251	254	258	261
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	42	50	51	51	52	53	53.7	55
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	55	51	51	50	50	49	49.0	49
Angkatan Kerja²								
Angkatan kerja, total (juta)	98	117	117	120	120	122	122	125
Laki-laki	60	72	73	75	75	76	77	77
Perempuan	38	45	44	46	45	46	46	48
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	45	38	36	35	35	34	33	32
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	17	19	21	22	20	21	22	21
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	37	42	43	43	45	45	45	47
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	8.1	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	6.2	5.6
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	104	374	421	446	487	548	623	697
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	73	212	234	249	272	303	331	354
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	31	30	29	28	28	29	28
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2	10.9
Di perkotaan	14.6	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3	7.8
Di perdesaan	22.4	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2	14.1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	11.0	10.2	9.5	9.2	9.0	9.3	9.0
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	9.5	9.7	8.8	8.6	8.6	11.1	9.8
GINI indeks	0.30	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.1
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	47.3	46.2
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	..	0.40	0.40	0.39	0.59	0.53	0.59	0.60
Kesehatan dan Gizi¹								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.16	0.29	..	0.20
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	33	32	30	29	28	27	..
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	22	16	16	15	15	14	14	..
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	41	27	26	25	24	24	23	..
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	265	165	156	148	140	133	126	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	76	78	80	82	81	75	75	76
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	2.0	2.9	2.7	2.9	2.9	2.8
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	0.7	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4
Pendidikan³								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	92	92	93	92	93	97	97
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	49	49	50	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	61	60	60	61	65	66	66
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	49	50	50	51	51
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	16	14	15	16	18	20	21
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	53	50	54	54	55	56	55
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	92	93	93	95	95
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) ⁵	..	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.3
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) ⁵	..	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	20.6	20.0
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	78	85	85	86	86	87	87	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	93	93	94	94	94	94	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	68	76	77	77	78	79	80	..
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	44	57	58	59	60	61	61	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	64	70	71	71	72	72	72	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	30	44	45	46	47	48	48	..
Lainnya								
Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik)	3.3
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8	18	18	19	19	17	17	17

Sumber: ¹ World Development Indicators; ² BPS (Sakernas); ³ BPS (Susenas) dan Bank Dunia; ⁴ MoF, Bappenas, dan Perhitungan staf Bank Dunia, hanya mencakup belanja pada Raskin, Askes, Beasiswa untuk keluarga miskin, dan PKH dan realisasi; ⁵ MoF; ⁶ Inter-Parliamentary Union



Australian Government

Department of Foreign Affairs and Trade

Supported by funding from the Australian Government
(Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the
Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis
(SEMEFPA) program.